

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Filosofis

Secara filosofis, penelitian ini menggunakan filsafat konstruktivisme. Filsafat konstruktivisme merupakan upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Konstruktivisme sebagai aliran filsafat, banyak memengaruhi konsep ilmu pengetahuan, teori belajar dan pembelajaran. Konstruktivisme menawarkan paradigma baru dalam dunia pembelajaran. Sebagai landasan paradigma pembelajaran, konstruktivisme menyerukan perlunya partisipasi aktif murid dalam proses pembelajaran, perlunya pengembangan murid belajar mandiri, dan perlunya murid memiliki kemampuan untuk mengembangkan pengetahuannya sendiri. Tokoh ternama aliran ini adalah Piaget dan Vygotsky. Konsep belajar konstruktivis didasarkan kepada kerja akademik para ahli psikologi dan peneliti yang peduli dengan konstruktivisme. Jean Piaget (1896–1980): Pelopor konstruktivisme kognitif yang menyatakan bahwa anak-anak membangun pengetahuan secara aktif melalui interaksi langsung dengan lingkungan fisik. (Bustomi, dkk., 2024: 1).

Filsafat konstruktivisme dalam pendidikan berpandangan bahwa murid membangun pengetahuannya sendiri secara aktif, bukan hanya menerima informasi secara pasif dari guru. Konstruktivisme merupakan sebuah teori yang sifatnya membangun, membangun dari segi kemampuan, pemahaman, dalam proses pembelajaran. Sebab dengan memiliki sifat membangun maka dapat diharapkan keaktifan dari pada murid akan meningkat kecerdasannya. Teori pembelajaran konstruktivisme ini memberikan pengaruh yang kuat dalam dunia pendidikan. Akibatnya, orientasi pembelajaran di kelas mengalami pergeseran. Orientasi pembelajaran bergeser dari berpusat pada guru mengajar ke pembelajaran berpusat pada *murid*. Murid tidak lagi diposisikan bagaikan bejana kosong yang siap diisi. Dengan sikap pasrah murid disiapkan untuk dijejali

informasi oleh gurunya.

Teori pembelajaran konstruktivisme ini memberikan pengaruh yang kuat dalam dunia pendidikan. Akibatnya, orientasi pembelajaran di kelas mengalami pergeseran. Orientasi pembelajaran bergeser dari berpusat pada guru mengajar ke pembelajaran berpusat pada *murid*. Murid tidak lagi diposisikan bagaikan bejana kosong yang siap diisi. Dengan sikap pasrah murid disiapkan untuk dijejali informasi oleh gurunya. (Hasbi, dkk. 2023: 361).

Berpikir kritis sangat diperlukan dalam dunia pendidikan saat ini. Menurut Seifer berpikir kritis berbeda dari berpikir logis (Silviana, 2018: 5). Berpikir logis adalah berpikir secara praktis, sementara berpikir kritis adalah berpikir secara konseptual. Berpikir kritis mampu melihat di luar jangkauan apa yang nampak, mampu membedakan mana yang tidak penting dan mana yang penting. Berpikir kritis tidak semata-mata mengetahui apa yang nampak atau aktual. Sementara itu berpikir kreatif adalah berpikir dengan imajinasi. Berpikir kreatif sering disalah-pahami sebagai kemampuan berpikir yang dibutuhkan untuk bidang tertentu saja misal dalam bidang seni. Padahal berpikir kreatif juga dibutuhkan dalam bidang lain seperti sains dan teknologi. Berpikir kreatif adalah berpikir *out of the box*. Galileo Galilei tidak akan menemukan prinsip inerti jika ia tidak berpikir secara kreatif. Einstein tidak akan tercatat sebagai pencetus teori relativitas jika ia tidak berpikir kreatif, dan banyak lagi contoh yang lain. Berpikir kritis dan kreatif dapat tumbuh subur dalam lingkungan yang mengimplementasikan pembelajaran konstruktivisme (Rahmat sinaga, 2018: 3).

Salah satu peran yang dapat disumbangkan oleh konstruktivisme dalam pendidikan adalah pembelajaran yang berorientasi pemecahan masalah (*problem solving*) (Hendrayanto, 2019: 4). Jonassen berpendapat bahwa *problem solving* merupakan salah satu aktivitas kognitif manusia yang otentik dan kompleks. Manusia dihadapkan pada tantangan untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. *Problem solving* adalah masalah

yang dihadapi manusia nyaris sepanjang hidupnya (Umbara, 2017: 33).

Namun demikian pembelajaran di sekolah umumnya justru kurang mendukung pembelajaran yang mengedepankan *problem solving*. Pembelajaran di sekolah lebih mengedepankan pembelajaran yang bersifat *content-based*, dimana menurut Jonassen pembelajaran *content-based* memiliki kelemahan. Pertama, pembelajaran ini kurang alami karena tujuan pembelajaran tidak terkait langsung dengan kebutuhan riil manusia akibatnya murid kurang memiliki motivasi. Kedua, pengetahuan bermakna tidak cukup diperoleh melalui satu cara atau satu sudut pandang. Pengetahuan akan lebih bermakna jika diperoleh lewat banyak sudut pandang. Pembelajaran *problem solving* mudah terealisasi dengan pendekatan konstruktivisme yang menekankan proses, berorientasi pada kebutuhan murid dan kolaborasi (Handayani & Sujatmiko, 2019: 106-111).

Beberapa fitur dari konstruktivisme diantaranya adalah: kolaborasi, belajar aktif (*active learning*), pengalaman belajar, menekankan proses belajar, dan asesmen yang lebih komprehensif.

1. *Scaffolding*

Salah satu fitur menonjol dari KMB yang selaras dengan konstruktivisme adalah *scaffolding*. Metode ini merupakan pengurutan pembelajaran dengan suatu bantuan dan saat performa membaik maka bantuan tersebut perlahan dikurangi secara bertahap. *Scaffolding* merupakan istilah lain dari *zone of proximal development* (ZPD) yang diperkenalkan oleh Vygorsky. Melalui ZPD, pembelajaran berlangsung saat murid menyelesaikan masalah di luar batas kemampuannya, tapi masih memiliki potensi berkembang, di bawah bimbingan atau kolaborasi dengan rekan yang lebih mampu. *Scaffolding* salah satunya dilakukan melalui *peer instruction* dalam salah satu pembelajaran alternatif yang ditawarkan.

2. Diferensiasi pembelajaran

Diferensiasi pembelajaran merupakan metode pembelajaran yang mendukung teori konstruktivisme. Tomlinson dan Eidson

mengajukan lima elemen dalam diferensiasi pembelajaran yakni: konten, proses, produk, afeksi dan lingkungan pembelajaran (Dinda Bariqul Zahfa, 2019). Kelima elemen ini sudah mendapatkan perlakuan yang memadai dalam proses pembelajaran. Setelah guru merancang tujuan pembelajaran dan alur pembelajaran agar murid mendapatkan konten yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan, ia memberikan beberapa alternatif pembelajaran sehingga proses dapat disesuaikan dengan kondisi *murid*. Guru melakukan asesmen awal (pretes), asesmen formatif, dan asesmen sumatif untuk menghasilkan produk murid dengan kemampuan seperti yang ditetapkan dalam capaian pembelajaran. Guru menciptakan suasana pembelajaran yang mengedepankan kolaborasi dan bukan persaingan sehingga afeksi terhadap lingkungan sekolah tumbuh. Melalui *project-based learning* guru menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembelajaran yang lebih bermakna. Dalam belajar sesuatu murid telah mempunyai prakonsep berdasarkan pengalaman yang telah di perolehnya (Umbara, 2017: 33). Dalam hal ini guru perlu mencermati prakonsep ini dalam menanamkan konsep-konsep baru. Apabila prakonsep ini tidak diperhatikan, kemungkinan akan terjadi miskonsepsi atau konsep yang salah. Apabila murid mempunyai miskonsepsi yang tidak dikoreksi atau dibiarkan, maka akan menyulitkan murid untuk belajar sesuatu secara benar.

Menurut teori konstruktivisme penerapan dalam belajar dapat digunakan model pembelajaran yang melibatkan beberapa tahap yaitu: pengenalan; pembelajaran kompetensi; pemulihan; pendalaman; dan pengayaan.

Pengenalan merupakan tahap pemberian hal-hal yang konkret dan mudah dengan contoh-contoh sederhana yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahap ini, guru perlu mencermati melalui penilaian prakonsep atau kompetensi awal yang dimiliki murid untuk maju ke tahap berikutnya. Tahap pembelajaran kompetensi merupakan

tahap di mana murid mulai beranjak dari mengenali kompetensi baru ke menguasai kompetensi dasar. Hasil penilaian akan menunjukkan apakah murid perlu diberi tahapan pemulihan, yaitu tahap di mana murid memulihkan prakonsep menjadi suatu konsep/kompetensi secara benar.

Pendidikan pada hakikatnya merupakan proses memanusiakan manusia. Pendidikan tidak hanya berorientasi pada sekadar pengembangan kemampuan intelektual, tetapi merupakan proses yang memungkinkan manusia mengembangkan seluruh potensi dirinya agar mampu menjalani kehidupan secara bermakna, bertanggung jawab, dan bermartabat. Dalam perspektif filosofis, pendidikan berkaitan dengan proses pembentukan manusia seutuhnya, baik dalam dimensi pengetahuan, sikap, moral, kepribadian, maupun kemampuan untuk hidup bersama dalam masyarakat.

Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak dapat direduksi menjadi kegiatan transfer pengetahuan dari pendidik kepada *murid*. Pendidikan merupakan proses pembentukan manusia melalui interaksi yang berlangsung secara sadar, terarah, dan berkelanjutan. Ki Hadjar Dewantara memandang pendidikan sebagai proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya (Dewantara, 2013: 20). Sikap tersebut memberikan fondasi filosofis bahwa proses pendidikan wajib menuntun murid agar tumbuh selaras dengan potensi uniknya, sekaligus cakap mengarungi kehidupan sebagai elemen masyarakat.

Dalam konstelasi ini, pendidikan mengemban fungsi individual sekaligus sosial. Pada ranah individual, pendidikan berperan melejitkan potensi murid agar bertransformasi menjadi pribadi yang kaya wawasan, terampil, matang secara emosional, serta memiliki integritas moral yang kokoh. Sementara pada ranah sosial, pendidikan membekali murid agar mampu beradaptasi dalam kehidupan kolektif, menghormati

sesama, patuh pada regulasi, mengemban kewajiban, serta menyumbang kontribusi riil bagi kemaslahatan publik. indikator keberhasilan pendidikan tidak boleh sebatas bertumpu pada capaian akademis, melainkan wajib ditinjau dari kualitas kepribadian dan tindakan nyata murid di lapangan.

Pendidikan juga sarat akan muatan nilai. Setiap dinamika pendidikan pada prinsipnya mengandung visi mengenai profil manusia ideal yang ingin dikonstruksi. Manakala orientasi pendidikan diarahkan untuk melahirkan insan yang jujur, amanah, disiplin, toleran, mencintai tanah air, serta peka terhadap kondisi sosial, maka pendidikan secara otomatis tengah mengoperasikan fungsi penguatan karakter. Oleh karena itu, penanaman karakter bukanlah agenda eksternal yang terpisah, melainkan esensi hakiki yang menyatu dalam tubuh pendidikan itu sendiri.

Dalam perspektif filosofis, kepribadian bertumpu pada kualitas moral yang mengejawantah dalam pola pikir, sikap batin, pengambilan keputusan, hingga tindakan konkret seseorang. Kepribadian tidak dapat dikonstruksi sebatas lewat transfer wawasan teoretis, melainkan harus melalui proses peresapan mendalam serta pembiasaan nilai dalam realitas harian. Atas dasar itulah, penguatan karakter menuntut adanya ekosistem pendidikan kondusif yang memfasilitasi murid untuk mengidentifikasi nilai, meresapi maknanya, meyakini urgensinya, hingga mengaktualisasikannya dalam perbuatan riil.

Kerangka berpikir tersebut sejalan dengan tesis Thomas Lickona yang menyatakan bahwa penguatan karakter mengandaikan keterpaduan antara dimensi *Moral Knowing*, *Moral feeling*, dan *Moral Action*. Watak yang utuh tidak sekadar menuntut individu paham mengenai kebajikan, melainkan juga memiliki kepekaan emosi untuk mencintai kebajikan tersebut serta kapasitas untuk mengaplikasikannya dalam perbuatan nyata (Lickona, 1991: 51). Dengan demikian, pendidikan karakter memosisikan diri sebagai jembatan yang

menyatukan aspek wawasan, kesadaran batin, kepekaan perasaan, hingga tindakan moral.

Berdasarkan perspektif ini, disimpulkan bahwa pembentukan kepribadian menghendaki siklus pendidikan yang komprehensif. Pemahaman kognitif seputar doktrin nasionalisme, misalnya, belum menjadi jaminan otomatis bahwa murid akan memiliki watak nasionalis. Murid dituntut mampu menyelami esensi persatuan, menghargai heroisme pluralisme, memiliki rasa kepemilikan terhadap negara, peka terhadap problematika masyarakat, serta cakap menerjemahkan gagasan tersebut ke dalam perilaku harian. Dengan kata lain, institusi pendidikan wajib mengonversi nilai yang mulanya bersifat konseptual-teoretis menjadi nilai yang dihayati dan diejawantahkan secara riil.

Dalam konteks penguatan karakter nasionalis, siklus transformasi ini memegang peranan yang kian krusial, sebab nasionalisme bukan sebatas doktrin politik atau materi kewarganegaraan, melainkan sebuah kesadaran nilai yang mengikat jati diri, persatuan, kewajiban, serta loyalitas pada bangsa. Lembaga sekolah menempati posisi strategis dalam mengonstruksi kesadaran tersebut karena menjadi ekosistem yang mempertemukan murid dengan stimulasi wawasan, keteladanan figur, regulasi tata tertib, serta pembiasaan sosial secara berkelanjutan.

Sistem pendidikan nasional Indonesia pun menyediakan payung hukum yang kokoh bagi akselerasi karakter *murid*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan nasional mengemban fungsi mengoptimalkan kapabilitas sekaligus membangun watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Visi pendidikan nasional juga ditargetkan agar murid berkembang menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta bertransformasi menjadi warga negara yang

demokratis dan penuh tanggung jawab (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3).

Regulasi tersebut membuktikan bahwa pembentukan kepribadian merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari visi besar pendidikan nasional. Orientasi pendidikan tidak boleh tereduksi hanya demi memburu kompetensi akademik semata, melainkan wajib diarahkan pada pemantapan kualitas manusia dan integritas kewargaan. Dalam koridor penelitian ini, pembentukan watak nasionalis diposisikan sebagai pilar strategis dalam mencetak murid yang memiliki komitmen kuat sebagai warga negara sekaligus memiliki kepedulian tinggi terhadap masa depan bangsa.

Dari sudut pandang filosofis, penanaman watak nasionalis juga bertautan erat dengan visi pendidikan dalam mengonstruksi tatanan kehidupan kolektif yang harmonis. Masyarakat Indonesia dicirikan oleh pluralisme sosial yang meliputi keragaman suku, agama, bahasa, kultur, hingga latar belakang sosial ekonomi. Di tengah realitas tersebut, lembaga pendidikan mengemban amanah untuk menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa kemajemukan merupakan elemen fundamental dari jati diri bangsa. Oleh karena itu, sifat nasionalis tidak dibentuk lewat upaya penyeragaman, melainkan melalui stimulasi agar murid cakap meng*apresiasi* perbedaan sekaligus memiliki loyalitas tunggal terhadap keutuhan bangsa.

Atas dasar pemikiran tersebut, watak nasionalis sepatutnya dimaknai sebagai kualitas kepribadian yang mendorong murid untuk mencintai tanah air, meng*apresiasi* identitas nasional, merawat persatuan, menghormati pluralisme, mendahulukan kemaslahatan publik, serta mengemban kewajiban selaku warga negara. Profil kepribadian inilah yang kelak menjadi fondasi utama bagi tumbuhnya semangat patriotik.

Semangat patriotik merepresentasikan orientasi sikap dan perbuatan yang mencerminkan kesediaan untuk memberikan

sumbangsih, pengabdian, serta tanggung jawab bagi nusa dan bangsa. Dalam ekosistem kehidupan *murid*, heroisme patriotisme tidak lagi harus diartikan sebagai perjuangan fisik layaknya masa perang kemerdekaan. Manifestasi patriotisme kontemporer dapat diejawantahkan melalui komitmen belajar yang sungguh-sungguh, ikhtiar menjaga persatuan, kepatuhan pada regulasi, penghormatan pada simbol dan identitas negara, pelestarian lingkungan, apresiasi atas keragaman, raihan prestasi, serta partisipasi aktif dalam agenda yang maslahat bagi masyarakat luas.

Secara filosofis, gerakan pendidikan karakter nasionalis memiliki korelasi linier dengan penguatan jiwa patriotik. Pendidikan berperan sebagai saluran prosesnya, karakter nasionalis bertindak selaku orientasi nilai yang disasar, sedangkan jiwa patriotik memosisikan diri sebagai wujud aktualisasi konkret dari nilai tersebut dalam ranah sikap dan tindakan. Hubungan timbal balik ini membuktikan bahwa pendidikan karakter nasionalis tidak boleh mandek pada penguasaan teori tentang nasionalisme, melainkan wajib diarahkan pada pembentukan disposisi moral dan perilaku nyata yang mencerminkan rasa cinta serta tanggung jawab terhadap negara.

Dalam peta jalan manajemen pendidikan, siklus pembentukan kepribadian tersebut mustahil dipasrahkan hanya pada proses instruksional formal di kelas semata. Karakter murid diuji dan dibentuk oleh keseluruhan akumulasi pengalaman pendidikan, yang meliputi intervensi kebijakan sekolah, pola kepemimpinan, muatan kurikulum, iklim pembelajaran, keteladanan dewan guru, kultur sekolah, wadah aktivitas *murid*, pembiasaan harian, penguatan eksternal, hingga harmonisasi hubungan sekolah dengan lingkungan sosial sekitar. Maka dari itu, penanaman watak nasionalis menuntut adanya sistem tata kelola yang terencana, terorganisasi, terealisasi secara konsisten, serta terpantau lewat evaluasi yang berkesinambungan.

Alur pemikiran ini melandasi dasar filosofis yang krusial bagi

studi berjudul *Manajemen Pendidikan Karakter Nasionalis dalam Penguatan Jiwa Patriotik*. Internalisasi karakter nasionalis tidak dipandang sebagai sebuah agenda suplemen yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian integral yang menyatu dengan keseluruhan ekosistem pendidikan. Manajemen pendidikan di sini hadir sebagai instrumen vital guna memastikan bahwa nilai-nilai kebangsaan dapat diimplementasikan ke dalam ranah kebijakan, program kerja, ragam aktivitas, kultur sekolah, materi pembelajaran, hingga pembiasaan perilaku warga sekolah secara konsisten.

Merujuk pada uraian tersebut, hakikat pendidikan dalam rangka mengonstruksi kepribadian manusia dapat disintesis ke dalam poin-poin berikut. Pertama, pendidikan merupakan sebuah ikhtiar memanusiakan manusia melalui optimalisasi seluruh potensi batin dan lahirnya. Kedua, pendidikan mengemban dimensi moral dan muatan nilai lantaran didesain untuk mencetak manusia yang memiliki kualitas kepribadian unggul. Ketiga, karakter dibentuk melalui siklus pendidikan terpadu yang meleburkan ranah wawasan, kesadaran batin, penghayatan nilai, habituasi, keteladanan figur, serta tindakan riil. Keempat, penguatan karakter nasionalis memosisikan diri sebagai bagian dari proses rekonstruksi manusia dan warga negara yang memiliki kepekaan kebangsaan. Kelima, watak nasionalis yang tertanam secara konsisten ditargetkan mampu mengonversi diri menjadi penguatan jiwa patriotik murid dalam wujud sikap, tindakan, dan kontribusi konkret bagi kemaslahatan bangsa dan negara.

Filsafat konstruktivisme dalam pendidikan bertindak sebagai fondasi fundamental dalam menyelami hakikat, target, dinamika, serta kompas arah penyelenggaraan pendidikan. Pada dasarnya, aktivitas pendidikan tidak pernah bergulir dalam ruang yang steril nilai, melainkan selalu bertolak dari cara pandang tertentu mengenai hakikat manusia, proyeksi kehidupan yang ideal, konstruksi ilmu pengetahuan, tatanan nilai, serta profil masyarakat yang dicita-citakan. Oleh sebab itu,

akselerasi kepribadian murid tidak dapat diisolasi dari filsafat pendidikan yang mendasari operasional lembaga pendidikan tersebut.

konstruktivisme berupaya mengurai jawaban atas problem mendasar perihal profil manusia seperti apa yang ingin dicetak lewat jalur pendidikan, klaster nilai apa yang wajib disemaikan, jenis wawasan apa yang perlu dikembangkan, serta proyeksi kehidupan pascapendidikan. Rangkaian pertanyaan tersebut memiliki relevansi langsung dengan agenda penguatan karakter, sebab watak berkaitan erat dengan kualitas kemanusiaan yang menjadi target akhir pendidikan. Sistem pendidikan yang melulu mematok keberhasilan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan teknis rentan melahirkan manusia yang kompeten secara intelektual, namun miskin integritas moral dan abai terhadap tanggung jawab sosial. Sebaliknya, pendidikan yang menyelaraskan perkembangan intelektual dengan pembentukan moral dan karakter berkomitmen melahirkan insan yang tidak sekadar cerdas, melainkan juga piawai mendayagunakan kecerdasannya demi kemaslahatan dirinya, masyarakat, nusa, dan bangsa.

Dalam perspektif ini, gerakan pendidikan karakter menempati kedudukan yang sangat fundamental, sebab watak merupakan representasi dari kualitas kemanusiaan yang ingin diwujudkan lewat proses pendidikan. Institusi pendidikan tidak sebatas membekali kemampuan kognitif murid untuk memahami sesuatu, melainkan turut membimbing mereka untuk memilah apa yang bernilai, bagaimana semestinya bersikap, serta bagaimana mengaktualisasikan pengetahuan dan potensinya secara bertanggung jawab.

Gagasan dan pemikiran Ki Hadjar Dewantara menyajikan dasar filosofis yang sangat kokoh bagi pemahaman di atas. Pendidikan dikonseptualisasikan sebagai sebuah proses menuntun tumbuh kembangnya segenap kekuatan kodrat yang ada pada diri anak, demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik selaku individu maupun bagian dari anggota masyarakat (Dewantara,

2013: 20). Formulasi ini mengisyaratkan bahwa dinamika pendidikan wajib memperhatikan perkembangan murid secara komprehensif. Proses pendidikan tidak boleh sekadar berorientasi pada pengejaran kecerdasan intelektual, melainkan harus membangun kapasitas murid agar mampu hidup secara bermartabat di tengah ekosistem sosialnya.

Pandangan Ki Hadjar Dewantara juga memosisikan pendidikan dalam relasi yang intim dengan kebudayaan. Pendidikan mengemban fungsi memfasilitasi manusia untuk tumbuh selaras dengan kultur serta lingkungan sosial tempat ia berpijak. Dalam konstelasi Indonesia, lembaga pendidikan dengan demikian memikul amanah besar untuk mencetak insan yang memahami serta meng^{ap}resiasi khazanah nilai budaya bangsa, sekaligus tangguh dalam mengantisipasi disrupsi perubahan zaman. Gerakan pendidikan karakter nasionalis menempati posisi relevan dalam kerangka berpikir ini, lantaran nasionalisme merupakan bagian dari kesadaran batin murid terhadap identitas serta dinamika kehidupan kebangsaannya.

Dari perspektif filosofis, pembentukan karakter juga bertaut dengan postulat bahwa manusia merupakan makhluk yang dapat dididik (*educandum*) sekaligus memiliki kapasitas mandiri untuk merekonstruksi dirinya. Manusia tidak dilahirkan dengan kondisi karakter yang sudah final, melainkan kepribadian tersebut berkembang lewat akumulasi pengalaman, interaksi sosial, stimulasi pendidikan, pembiasaan harian, keteladanan figur, serta siklus refleksi mendalam terhadap ragam nilai yang dijumpai dalam roda kehidupan. Oleh sebab itu, institusi pendidikan memegang mandat strategis untuk mendampingi murid dalam mengonstruksi kualitas moral dan integritas kepribadiannya.

Penanaman watak dalam koridor filosofis ini bukan sekadar aktivitas mekanis memasukkan sederet daftar nilai ke dalam diri *murid*. Pendidikan karakter merupakan sebuah proses pembentukan manusia agar cakap menakar nilai, memilih kebajikan, meresapinya ke dalam

kalbu, serta menjadikannya sebagai kompas utama dalam bertindak. gerakan penguatan karakter mengemban tiga pilar dimensi utama, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis.

Secara ontologis, pendidikan karakter bertitik tolak dari hakikat manusia sebagai makhluk yang dibekali potensi moral serta kapasitas untuk berkembang. Manusia mempunyai independensi kehendak dan tanggung jawab personal dalam menetapkan orientasi pilihan hidupnya. Atas dasar itu, sekolah wajib menuntun murid agar bertumbuh menjadi pribadi yang andal dalam mendayagunakan kebebasan hakikinya secara bertanggung jawab.

Secara epistemologis, pendidikan karakter tidak sebatas berkuat pada tata cara murid merengkuh informasi kognitif mengenai kebajikan, melainkan bagaimana nilai tersebut ditelaah, dihayati, dan dimaknai lewat pengalaman empiris. Wawasan moral perlu dibangun melalui stimulasi pembelajaran yang dialogis, ruang diskusi, interaksi sosial, aktivitas kontemplasi, serta keteladanan nyata. Murid dituntut memperoleh panggung terbuka untuk menyelami alasan logis *mengapa* sebuah nilai dipandang baik sekaligus bagaimana cara *mengaplikasikannya* dalam realitas kehidupan.

Secara aksiologis, pendidikan karakter bertumpu pada ranah nilai yang diposisikan sebagai pedoman luhur dalam dinamika hidup manusia. Pendidikan berkewajiban membimbing murid untuk jeli memilah perbuatan yang baik dan buruk, serta menumbuhkan komitmen kuat untuk konsisten memilih serta menjalankan kebajikan. Dalam konteks kehidupan bernegara, dimensi aksiologis ini berafiliasi dengan nilai persatuan, rasa tanggung jawab, keadilan, toleransi atas pluralisme, kepedulian sosial, serta dedikasi rasa cinta terhadap bangsa dan negara.

Berlandaskan pada alur pemikiran tersebut, gerakan pendidikan karakter nasionalis dalam studi ini tidak diartikan sebagai ikhtiar untuk memupuk fanatisme kebangsaan secara sempit (*chauvinisme*). Semangat nasionalisme wajib ditempatkan dalam

koridor nilai yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, kemajemukan, integrasi persatuan, kehidupan demokratis, serta keadilan sosial. Dengan demikian, watak nasionalis yang ingin diakselerasi merupakan tipe karakter kebangsaan yang adaptif, inklusif, akuntabel, serta selaras dengan falsafah Pancasila.

Filsafat pendidikan Pancasila menyajikan dasar fundamental bagi pemaknaan holistik tersebut. Pancasila tidak semata-mata diposisikan sebagai dasar hukum negara, melainkan bertindak sebagai mata air nilai yang memberikan kompas arah bagi dinamika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, kiblat pendidikan karakter dalam ruang lingkup Indonesia perlu ditargetkan pada rekonstruksi manusia yang cakap menghayati nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial.

Prinsip persatuan yang terpatri dalam sanubari Pancasila mempunyai korelasi yang sangat erat dengan kepribadian nasionalis. Persatuan sama sekali bukan berarti mengeliminasi perbedaan, melainkan menumbuhkan kapabilitas untuk hidup berdampingan secara harmonis di tengah kemajemukan bersandarkan kesadaran kolektif sebagai satu bangsa. Dalam iklim sekolah, murid perlu ditempa menjadi individu yang toleran menghargai perbedaan sekaligus memiliki loyalitas tunggal terhadap keutuhan persatuan Indonesia.

Pada titik kulminasi inilah, gerakan pendidikan karakter nasionalis bertautan langsung dengan akselerasi penguatan jiwa patriotik. Nilai nasionalisme menyuguhkan fondasi kesadaran perihai jati diri serta kemaslahatan bangsa, sedangkan patriotisme mempertontonkan dorongan kuat untuk mengejawantahkan rasa cinta tersebut ke dalam bentuk tindakan nyata dan pengabdian tulus. Oleh sebab itu, tata kelola pendidikan karakter nasionalis dapat diposisikan sebagai salah satu saluran strategis untuk melejitkan potensi jiwa patriotik pada diri *murid*.

Semangat patriotik dalam konstelasi pendidikan modern tidak

lagi sebatas diartikan sebagai keberanian mengorbankan jiwa di medan pertempuran. Manifestasi patriotisme kontemporer dapat diejawantahkan melalui beragam tindakan positif dalam dinamika kehidupan harian. Murid dapat mengaktualisasikan jiwa patriotik tersebut lewat komitmen belajar yang sungguh-sungguh, ikhtiar menjaga nama baik institusi sekolah dan negara, menghormati simbol-simbol resmi negara, merawat benang persatuan, mematuhi regulasi tata tertib, mengapresiasi kemajemukan, melestarikan khazanah kebudayaan bangsa, menjaga kelestarian lingkungan, mengukir prestasi, serta memberikan sumbangsih nyata bagi kemaslahatan masyarakat luas [1991: 51–53].

Filsafat pendidikan menyajikan fondasi bahwa gerakan penguatan karakter harus bermuara pada rekonstruksi manusia yang memiliki keselarasan utuh antara dimensi wawasan, moralitas, kepribadian, hingga tindakan riil. Murid tidak boleh sekadar mandek sebagai individu yang menghafal teori nilai nasionalisme, melainkan wajib bertransformasi menjadi insan yang meresapi nilai tersebut serta cakap mengaplikasikannya dalam kenyataan hidup. Dalam koridor penelitian ini, indikator keberhasilan tata kelola pendidikan karakter nasionalis pada akhirnya ditinjau dari seberapa jauh nilai-nilai kebangsaan tersebut mengkristal menjadi orientasi sikap dan perilaku keseharian murid sehingga mampu memperkokoh semangat patriotisme dalam diri mereka.

Konstruktivisme dalam pendidikan membawa implikasi logis terhadap tata kelola dan manajemen institusi pendidikan. Manakala target utama pendidikan tidak sebatas mencetak murid yang cerdas secara intelektual namun juga berintegritas secara karakter, maka seluruh konstelasi ekosistem pendidikan wajib dikerahkan demi meraih target tersebut. Internalisasi karakter sama sekali tidak boleh dibebankan secara parsial kepada guru Pendidikan Pancasila atau figur pendidik tertentu saja. Pembentukan kepribadian pada hakikatnya merupakan

tanggung jawab kolektif seluruh warga sekolah dan harus melebur ke dalam kultur organisasi lembaga.

Dalam peta jalan manajemen pendidikan, implikasi tersebut mengisyaratkan bahwa klaster nilai karakter nasionalis wajib ditransformasikan ke dalam visi, misi, dan tujuan sekolah, perencanaan program kerja, pengorganisasian kapasitas sumber daya, pengeksekusian agenda pendidikan, keteladanan manajerial pimpinan, iklim pembelajaran kelas, aktivitas ekstrakurikuler, habituasi harian, kultur lingkungan sekolah, hingga fungsi pengawasan dan evaluasi [1972: 4]. filsafat pendidikan menyuguhkan dasar normatif yang kuat bagi jalannya roda manajemen pendidikan karakter.

Interaksi tersebut membuktikan bahwa manajemen pendidikan tidak melulu bergerak pada wilayah administratif-mekanis. Sistem manajemen pendidikan mengemban dimensi filosofis yang kental, sebab setiap keputusan manajerial yang diputuskan pada dasarnya mengandung proyeksi mengenai arah tujuan pendidikan dan profil manusia seperti apa yang ingin dicetak. Dalam studi ini, manajemen pendidikan didesain untuk menjamin bahwa program penguatan karakter nasionalis dapat bergulir secara terstruktur, konsisten, dan berkelanjutan demi memberikan kontribusi nyata bagi akselerasi jiwa patriotik *murid*.

Bersandarkan pada rangkaian pemaparan di atas, dapat disintesis bahwa filsafat pendidikan menyuguhkan dasar pemikiran fundamental mengenai hakikat manusia, tatanan nilai, target, dan arah kebijakan pendidikan; gerakan pendidikan karakter bertindak sebagai saluran pembentukan manusia berbasis nilai-nilai tersebut; karakter nasionalis memosisikan diri sebagai salah satu orientasi nilai kebangsaan yang wajib diakselerasi; sedangkan jiwa patriotik bertindak selaku bentuk aktualisasi konkret dari rasa cinta, tanggung jawab, dan dedikasi pengabdian terhadap nusa dan bangsa.

B. Enam Sistem Nilai

Setiap komunitas manusia atau masyarakat tidak terlepas dari sistem nilai yang melandasi kehidupan mereka. Hal tersebut sejalan dengan Achmad Sanusi (2015: 14–15) yang memandang bahwa kehidupan manusia pada dasarnya selalu berada dalam suatu sistem nilai. Nilai berfungsi sebagai landasan yang memberikan arah terhadap cara manusia berpikir, berbicara, bersikap, mengambil keputusan, dan bertindak dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Oleh karena itu, sistem nilai tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma yang bersifat abstrak, tetapi merupakan pedoman yang memengaruhi pilihan dan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang pendidikan, keberadaan sistem nilai menjadi penting karena pendidikan tidak hanya diarahkan untuk mengembangkan kemampuan intelektual, tetapi juga membentuk manusia yang memiliki orientasi nilai dalam menjalani kehidupannya. Sanusi menghubungkan persoalan nilai dengan pembentukan akhlak, moral, dan karakter manusia.

Menurut Sanusi, sistem nilai mencakup enam kategori yang saling berhubungan, yaitu nilai teologis, nilai logis-rasional, nilai fisik-fisiologis, nilai etis, nilai estetis, dan nilai teleologis. Keenam nilai tersebut tidak dimaksudkan untuk dipahami secara terpisah, tetapi sebagai suatu kesatuan yang memberikan arah secara komprehensif terhadap kehidupan manusia (Sanusi, 2015: 18).

a. Nilai Teologis

Nilai teologis merupakan dimensi nilai yang memberikan dasar ketuhanan bagi pikiran, sikap, dan tindakan manusia. Nilai ini menempatkan hubungan manusia dengan Tuhan sebagai fondasi spiritual dan moral dalam menjalankan kehidupan. Dalam pemikiran Sanusi, nilai teologis dapat diwujudkan melalui berbagai aspek, antara lain Ketuhanan Yang Maha Esa, iman, ibadah, tauhid, ihsan, istighfar, doa, keikhlasan, pertobatan, ijtihad, kekhusyukan, istiqamah, dan *jihad fi sabilillah* (Sanusi, 2015: 35). Nilai teologis memberikan orientasi bahwa tindakan manusia

tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan praktis, tetapi harus memiliki landasan spiritual dan pertanggungjawaban moral. Dalam konteks pendidikan, nilai teologis menjadi dasar dalam membentuk murid agar memiliki kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, sikap, dan perilaku merupakan bagian dari tanggung jawab manusia kepada Tuhan.

Dalam penelitian ini, nilai teologis memiliki relevansi dengan pembentukan karakter nasionalis karena nasionalisme dan patriotisme tidak ditempatkan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai religius. Sebaliknya, kecintaan terhadap tanah air, menjaga persatuan, menghormati sesama, melaksanakan tanggung jawab, serta memberikan kontribusi positif bagi bangsa dapat dimaknai sebagai bagian dari pengamalan nilai moral yang bersumber dari keyakinan terhadap Tuhan. Dalam koridor rasa cinta tanah air dan kerelaan berkorban demi nusa dan bangsa (nasionalisme dan patriotisme), QS. At-Taubah ayat 122.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya: Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. (QS. At-Taubah: 122)

Menurut ahli tafsir kontemporer, Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi yaitu pada Syekh Muhammad Mahmud al-Hijazi dalam “*Tafsir al-Wadlih*” (1413 H: Juz 2, hal. 30) menjelaskan ayat di atas sebagai berikut:

“Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa belajar ilmu adalah suatu kewajiban bagi umat secara keseluruhan, kewajiban yang tidak mengurangi kewajiban jihad, dan mempertahankan tanah air juga merupakan kewajiban yang suci. Karena tanah air membutuhkan orang yang berjuang dengan pedang (senjata), dan juga orang yang berjuang dengan argumentasi dan dalil. Bahwasannya memperkuat moralitas jiwa, menanamkan nasionalisme dan gemar berkorban, mencetak generasi yang berwawasan ‘cinta tanah air sebagian dari iman’, serta

mempertahankannya (tanah air) adalah kewajiban yang suci. Inilah pondasi bangunan umat dan pilar kemerdekaan mereka.”

Ayat lain yang menjelaskan nasionalisme dan patriotisme karena di antara fungsi negara adalah melindungi rakyat/warganya dari rasa ketakutan dan kelaparan terdapat pada Q.S. *al-Qurays* ayat 3 dan 4.

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (٣) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ هَ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (٤)

Artinya, "Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah) (3). Yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut (4)."

Imam Fahrudin Ar-Razi, dalam *Tafsir Mafatihul Ghaib*, (2000/1420 H, juz XXXII: hal. 298) menjelaskan, ketahuilah bahwasanya kenikmatan itu ada dua jenis; menolak bahaya dan memberi manfaat. Nikmat yang pertama lebih penting. Oleh karena itu para ulama mengatakan, bahwa mencegah diri dari bahaya hukumnya wajib, sedangkan mendapat kemanfaatan hukumnya tidak wajib. Oleh karena itu, Allah menjelaskan nikmat menolak bahaya di dalam surah *al-Fiil*, dan nikmat mendapat manfaat di dalam surah ini. Melihat dua nikmat yang besar ini, Allah memerintahkan mereka beribadah kepada-Nya maka Allah berfirman: "Maka hendaklah mereka menyembah Allah".

Al-Maraghi menjelaskan, hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik Kakbah, yakni Dzat yang menjaga Kakbah dari tentara bergajah dari Habasyah dan lainnya dan yang mengokohkan kedudukan Kakbah dalam jiwa-jiwa manusia serta Dialah satu-satunya yang berhak untuk mereka agungkan dan muliakan. Ibnu Abbas berkata: "Yang demikian itu (nikmat kelapangan rezeki dan rasa aman suku Quraisy penduduk Makkah) sebab doa Nabi Ibrahim ketika ia berdoa: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan" (QS Al-Baqarah: 126) (Syamsudin Al-Qurthubi. 1384 H/1964 M. *Tafsir Al-Qurthubi*. Mesir: Darul Kutub al-Mishriyah, juz XXX: hal. 209).

Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadits riwayat Imam Tirmidzi yang sangat masyhur dalam diskursus nasionalisme-patriotisme: *"Demi Allah, sesungguhnya engkau (Makkah) adalah bumi Allah yang paling aku cintai. Seandainya aku tidak terusir darimu, niscaya aku tidak akan pernah keluar meninggalkanmu"* (HR. Tirmidzi).

Selaras dengan esensi hadits tersebut, terdapat sebuah ungkapan dari para ulama yang sangat populer di Indonesia, khususnya di kalangan umat Islam dan warga *nahdliyyin*, yaitu: *"hubbul wathon minal iman"* (cinta tanah air merupakan bagian dari manifestasi keimanan).

Internalisasi nilai-nilai religius dalam mengokohkan karakter nasionalis ini akan membentuk murid yang memiliki semangat patriotik yang berbasis pada nilai spiritualitas. Menurut Kaelan, nasionalisme Indonesia pada hakikatnya merupakan tipe nasionalisme yang religius, humanis, demokratis, serta berkeadilan sosial sebagaimana telah dikristalkan dalam sila-sila Pancasila. Karakter nasionalisme religius ini tecermin sejak proses perumusan fondasi dasar negara, yakni ketika Ir. Soekarno memaparkan konsepsi nasionalisme Indonesia sebagai pilar utama bagi berdirinya negara baru bernama Indonesia. Dengan demikian, dimensi teologis memberikan landasan spiritual bagi pengembangan karakter nasionalis dan jiwa patriotik *murid*.

b. Nilai Etis

Nilai etis berhubungan dengan ukuran mengenai baik dan buruk yang menjadi pedoman manusia dalam berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain. Nilai tersebut tercermin dalam berbagai sikap dan perilaku, seperti menghormati orang lain, rendah hati, setia, dapat dipercaya, jujur, bertanggung jawab, memiliki iktikad baik, adil, menciptakan kedamaian, sabar, mampu memaafkan, suka menolong, toleran, dan menjaga keharmonisan (Sanusi, 2015: 35).

Dalam pendidikan, nilai etis memiliki keterkaitan yang kuat dengan pembentukan karakter karena karakter pada dasarnya dapat diamati melalui kualitas perilaku seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Murid yang memiliki karakter bukan hanya memahami norma mengenai baik dan buruk, tetapi mampu menjadikan nilai tersebut sebagai pedoman dalam mengambil keputusan dan melakukan tindakan.

Dalam konteks pendidikan karakter nasionalis, nilai etis dapat diwujudkan melalui perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, toleran, menghargai perbedaan, bergotong royong, menghormati guru dan teman, menaati tata tertib sekolah, serta menjaga persatuan. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar perilaku yang mendukung terbentuknya kehidupan bersama yang harmonis sekaligus memperkuat jiwa patriotik *murid*.

c. Nilai Estetis

Nilai estetis berkaitan dengan pengalaman dan penghargaan terhadap keindahan, keserasian, keteraturan, daya tarik, dan cinta kasih. Sanusi menguraikan dimensi estetis melalui berbagai kondisi yang menggambarkan sesuatu sebagai bagus, bersih, indah, cantik, manis, menarik, serasi, romantis, dan penuh cinta kasih (Sanusi, 2015: 35).

Dalam bidang pendidikan, nilai estetis tidak terbatas pada persoalan seni, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan murid untuk menghargai kebersihan, keteraturan, keindahan, keharmonisan, dan lingkungan yang baik. Oleh sebab itu, lingkungan sekolah yang bersih, tertib, indah, aman, dan nyaman dapat menjadi bagian dari proses pendidikan nilai.

Dalam penelitian ini, nilai estetis mempunyai keterkaitan dengan pembentukan budaya sekolah. Lingkungan sekolah yang bersih dan tertib, penggunaan simbol-simbol kebangsaan, kepedulian terhadap lingkungan, serta hubungan sosial yang harmonis dapat menciptakan suasana yang mendukung proses internalisasi karakter nasionalis. Lingkungan tersebut

juga dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap sekolah dan lingkungan sosial yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pembentukan identitas kebangsaan *murid*.

d. Nilai Logis-Rasional

Nilai logis-rasional berkaitan dengan kemampuan manusia dalam menggunakan akal dan nalar secara tepat berdasarkan fakta, proses berpikir, serta hubungan sebab-akibat. Sanusi menghubungkan nilai logis dengan sesuatu yang logis, tepat, sesuai, jelas, nyata, memiliki identitas atau ciri tertentu, mempunyai proses, dan menghasilkan kesimpulan yang sesuai (Sanusi, 2015: 35).

Dalam pendidikan karakter, nilai logis-rasional menunjukkan bahwa pembentukan perilaku tidak semestinya hanya menghasilkan kepatuhan terhadap aturan tanpa pemahaman. *murid* perlu mengetahui alasan, makna, dan tujuan dari nilai yang diterapkan. Dalam konteks karakter nasionalis, *murid* perlu memahami secara rasional mengapa persatuan, toleransi, gotong royong, penghormatan terhadap simbol negara, menjaga keutuhan bangsa, serta menaati aturan merupakan bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, nilai logis-rasional memberikan landasan bagi berkembangnya kesadaran kritis dan rasional *murid*. Praktik nasionalisme tidak hanya dilakukan karena adanya instruksi atau kewajiban dari sekolah, tetapi didasarkan pada pemahaman mengenai makna dan alasan di balik praktik tersebut.

e. Nilai Fisik-Fisiologis

Nilai fisik-fisiologis berkaitan dengan aspek nyata dan kondisi material yang mendukung keberlangsungan kehidupan manusia. Sanusi mengaitkannya dengan pemahaman mengenai unsur, fungsi, ukuran, kekuatan, perubahan, lokasi, asal-usul, serta hubungan sebab-akibat (Sanusi, 2015: 35).

Dalam konteks pendidikan, nilai fisik-fisiologis menunjukkan bahwa pembentukan karakter tidak berlangsung dalam ruang yang terlepas dari kondisi nyata. Penanaman nilai membutuhkan dukungan lingkungan dan berbagai sumber daya yang memungkinkan murid belajar, berinteraksi, dan mengembangkan potensinya secara optimal. Sarana dan prasarana, lingkungan fisik sekolah, kesehatan, keamanan, fasilitas pembelajaran, serta kondisi sekolah merupakan bagian yang dapat mendukung keberlangsungan proses pendidikan karakter.

Perspektif tersebut relevan dengan penelitian ini karena keberhasilan manajemen pendidikan karakter nasionalis tidak hanya ditentukan oleh kualitas program dan nilai yang dirumuskan, tetapi juga oleh kondisi nyata yang menjadi lingkungan pelaksanaan program. Ketersediaan sarana prasarana, lingkungan sekolah, serta dukungan sumber daya menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam proses pengelolaan pendidikan karakter nasionalis.

f. Nilai Teleologis

Nilai teleologis merupakan dimensi nilai yang berorientasi pada tujuan, manfaat, kegunaan, efektivitas, efisiensi, produktivitas, perkembangan, serta hasil yang hendak dicapai. Sanusi menggambarkan nilai teleologis melalui konsep sesuatu yang berguna, bermanfaat, sesuai fungsi, berkembang atau maju, teratur dan disiplin, integratif, produktif, efektif, efisien, akuntabel, serta inovatif (Sanusi, 2015: 35).

Nilai teleologis memberikan penekanan bahwa proses pendidikan perlu menghasilkan perubahan yang memiliki makna bagi *murid*. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan karakter tidak cukup diukur berdasarkan keberadaan atau banyaknya program yang dilaksanakan. Evaluasi perlu diarahkan pada manfaat dan dampak program terhadap perkembangan *murid*.

Dalam penelitian ini, dimensi teleologis memiliki hubungan langsung dengan tujuan penguatan jiwa patriotik *murid*. Keberhasilan manajemen pendidikan karakter nasionalis tidak hanya dilihat dari terlaksananya upacara bendera, pembelajaran PPKn, kegiatan kebangsaan, maupun berbagai bentuk pembiasaan. Hal yang lebih mendasar adalah sejauh mana berbagai kegiatan tersebut memberikan perubahan terhadap kesadaran, sikap, perilaku, tanggung jawab, kepedulian, rasa memiliki terhadap bangsa, dan tindakan patriotik *murid*.

Keenam sistem nilai yang dikemukakan Sanusi tersebut pada dasarnya merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan. Nilai teologis, etis, estetis, logis-rasional, fisik-fisiologis, dan teleologis tidak diposisikan sebagai dimensi yang berdiri sendiri, tetapi membentuk suatu sistem yang secara bersama-sama memberikan arah terhadap pola pikir, sikap, dan tindakan manusia (Sanusi, 2015: 18).

Dalam konteks penelitian ini, keterkaitan tersebut dapat dipahami melalui fungsi masing-masing nilai. Nilai teologis memberikan dasar spiritual dan moral; nilai etis memberikan pedoman mengenai perilaku yang baik; nilai estetis mendukung terciptanya lingkungan dan budaya yang harmonis; nilai logis-rasional mengembangkan pemahaman dan kesadaran kritis; nilai fisik-fisiologis menyediakan dukungan kondisi nyata bagi pelaksanaan pendidikan; sedangkan nilai teleologis mengarahkan seluruh proses pada tujuan, manfaat, efektivitas, dan hasil pendidikan yang diharapkan.

Dengan demikian, keenam sistem nilai tersebut dapat menjadi perspektif yang komprehensif dalam menganalisis manajemen pendidikan karakter nasionalis. Pendidikan karakter tidak hanya membutuhkan nilai yang menjadi pedoman moral, tetapi juga membutuhkan pemahaman rasional, lingkungan yang mendukung, praktik budaya sekolah, serta orientasi terhadap hasil yang hendak dicapai.

Berdasarkan pemikiran Sanusi, dalam penelitian ini enam sistem nilai digunakan sebagai landasan nilai untuk menganalisis manajemen pendidikan karakter nasionalis dalam penguatan jiwa patriotik *murid*. Keenam nilai tersebut memberikan perspektif yang saling melengkapi. Nilai teologis memberikan fondasi spiritual; nilai etis mengarahkan perilaku; nilai estetis membangun keserasian dan budaya sekolah; nilai logis-rasional mengembangkan kesadaran dan pemahaman; nilai fisik-fisiologis memberikan dukungan terhadap kondisi nyata pelaksanaan pendidikan; sedangkan nilai teleologis memastikan bahwa seluruh proses pendidikan diarahkan pada tujuan dan hasil yang memiliki manfaat bagi perkembangan murid (Sanusi, 2015: 18, 35).

“Secara konseptual, hubungan keenam sistem nilai Achmad Sanusi tersebut dengan penelitian, yakni: nilai teologis, nilai etis, nilai estetis, nilai logis-rasional, nilai fisik-fisiologis, nilai teleologis sebagai substansi nilai, dengan berlandaskan nilai pendidikan karakter nasionalis, manajemen pendidikan karakter nasionalis, yang diintegrasikan melalui pembelajaran, pembiasaan, keteladanan, budaya sekolah, kegiatan sekolah, dan evaluasi, kemudian nilai nasionalisme diinternalisasikan menjadi penguatan jiwa patriotik *murid*.”

Meski demikian, keenam sistem nilai tersebut tidak tepat jika dipahami sebagai tahapan yang berlangsung secara linear, karena hakikatnya merupakan sistem nilai yang saling berkaitan dan saling memperkuat. Oleh karena itu, dalam kerangka konseptual penelitian, keenam nilai tersebut lebih tepat ditempatkan sebagai dimensi nilai yang mengelilingi proses manajemen pendidikan karakter nasionalis, kemudian seluruh proses tersebut diarahkan pada penguatan jiwa patriotik *murid*. Hal ini sejalan dengan karakter sistem nilai Sanusi yang menempatkan berbagai dimensi nilai sebagai satu kesatuan yang memberikan orientasi terhadap pikiran, perkataan, dan tindakan manusia.

Berdasarkan sintesis tersebut, sistem nilai dalam penelitian ini dipahami sebagai suatu kesatuan nilai yang menjadi landasan dalam

mengarahkan pikiran, perkataan, sikap, dan tindakan manusia, yang meliputi nilai teologis, etis, estetis, logis-rasional, fisik-fisiologis, dan teleologis (Sanusi, 2015: 18). Keenam sistem nilai tersebut digunakan sebagai perspektif untuk menganalisis manajemen pendidikan karakter nasionalis karena pembentukan karakter memerlukan landasan spiritual dan moral, pemahaman rasional, lingkungan yang mendukung, kondisi nyata yang memadai, serta orientasi terhadap tujuan dan hasil pendidikan (Sanusi, 2015: 14–18, 35).

C. Landasan Teori / Konsep

1. *Grand Theory*

Merujuk pada pijakan filosofis rekonstruksionisme dalam tata kelola Manajemen Pendidikan Karakter Nasionalis, konstruksi teori yang mendasari kerangka penelitian ini mencakup beberapa pilar utama, meliputi: Teori manajemen, teori kesadaran bela negara, serta teori patriotisme.

a. Teori Manajemen

Manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber yang lainnya.

Dalam karya ilmiahnya yang fenomenal bertajuk *Principles of Management* (1972: 4), George Robert Terry (G.R. Terry) merumuskan definisi fundamental mengenai manajemen, yaitu: "*Management is a distinct process consisting of Planning, Organizing, actuating and Controlling, performed to determine and accomplish the objectives by the use of people and resources.*" (Manajemen merupakan proses spesifik yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta pengendalian, yang diselenggarakan guna menetapkan sekaligus meraih sasaran menggunakan kontribusi manusia beserta sumber daya

yang ada).

Manajemen dapat disimpulkan sebagai siklus proses spesifik yang dioperasikan demi mengidentifikasi dan *menggapai* target lewat optimalisasi personel serta aset organisasi. Siklus tersebut dijalankan secara bertahap melalui empat fase utama, meliputi perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), penggerakan atau eksekusi (*Actuating*), serta pengendalian atau monitoring (*Controlling*). Langkah manajerial ini ditempuh untuk memastikan seluruh sasaran kelembagaan yang telah disepakati dapat diraih secara presisi lewat pemberdayaan SDM dan potensi penunjang lainnya.

1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan bertindak sebagai fondasi utama dari keseluruhan siklus manajemen. Pada fase awal ini, organisasi merumuskan peta jalan dan sasaran masa depan yang ingin diraih. Rangkaian aktivitas krusial dalam tahap ini mencakup penetapan target jangka pendek maupun jangka panjang, pemetaan kondisi riil lingkungan, proyeksi peluang serta risiko (yang saat ini lazim dibedah lewat analisis SWOT), hingga formulasi strategi dasar demi merealisasikan target tersebut.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Fase kedua berfokus pada penataan instrumen kerja serta penyusunan struktur operasional untuk mewujudkan rancangan. Tahap pengorganisasian memegang peran sebagai proses penyelarasan seluruh aset agar cetak biru dapat berjalan secara efektif. Aktivitas di dalamnya meliputi pembagian tugas makro menjadi klaster-klaster kerja yang lebih mikro (divisi), pengukuhan bagan organisasi, alokasi anggaran belanja, penyediaan fasilitas logistik, serta penempatan personel yang kompeten pada posisi kerja yang selaras (*the right man on the right place*).

3) Pelaksanaan (*Actuating*)

Actuating memegang peranan sebagai fase eksekusi

lapangan yang menjadi parameter penentu keberhasilan program. Segala rencana dan rancangan struktur organisasi tidak akan memberikan dampak nyata tanpa adanya tindakan konkret. Pada fase krusial inilah kapabilitas kepemimpinan (*leadership*) serta pemberian stimulasi motivasi akan diuji secara riil. Langkah pelaksanaan atau penggerakan ini menitikberatkan pada pengarahan staf, pemupukan motivasi kerja, pembangunan iklim komunikasi yang sehat, resolusi konflik internal, serta kepemimpinan tim agar bergerak searah dengan instruksi organisasi.

4) Pengawasan (*Controlling*)

Controlling mengemban fungsi krusial untuk mengawal agar segala hal yang dieksekusi pada fase *actuating* konsisten berjalan di atas rel yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan (*Planning*). Fase pengawasan beroperasi dengan cara menetapkan standar ketercapaian, memonitor performa aktual di lapangan, mengomparasikan hasil kerja dengan rancangan awal, serta merumuskan langkah korektif apabila terdeteksi adanya deviasi atau penyimpangan.

Tata kelola pendidikan dalam penelitian ini sepenuhnya berkiblat pada fungsi-fungsi manajerial tersebut. Implementasi pilar manajemen dalam gerakan kesadaran bela negara di tingkat sekolah merujuk pada kerangka berpikir Terry (1972) dalam *Principles of Management*, yang membagi tata laksana ke dalam empat fungsi fundamental: *Planning*, *Organizing*, *actuating*, dan *Controlling*. Rangkaian fungsi tersebut akan berjalan optimal di tangan para pengelola pendidikan yang andal, sehingga *output* yang diproduksi selaras dengan target lembaga melalui keterlibatan lintas komponen sekolah dalam ruang interaksi edukatif.

Pada hakikatnya, manajemen dipandang sebagai konstelasi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta penilaian terhadap segala ikhtiar para anggota organisasi beserta pemanfaatan

seluruh aset lembaga, agar bekerja secara berdaya guna dan berhasil guna demi menggapai visi yang telah dicanangkan. Pimay (2013: 1) menegaskan bahwa manajemen memosisikan diri sebagai sebuah proses sistematis yang dioperasikan oleh perorangan maupun kelompok dalam mengoordinasikan berbagai upaya demi merealisasikan target organisasi.

Formulasi dan pemaknaan manajemen sejatinya sangat variatif, bergantung pada sudut pandang para pakar yang merumuskannya. Kendati demikian, konsep tersebut pada dasarnya mengerucut pada kesimpulan tentang rangkaian proses terpadu dari akumulasi aktivitas bersama—seperti merancang, mengorganisasikan, mengarahkan, mengontrol, hingga mengevaluasi—seluruh elemen yang bertautan dengan upaya pemberdayaan sumber daya internal maupun eksternal guna mewujudkan sasaran.

Sinergi antara manajemen dengan proses instruksional kelas merupakan perpaduan yang sangat efektif demi mencapai cita-cita pendidikan, khususnya target pembelajaran. Sebab, manajemen diorientasikan untuk *menggapai* sasaran lewat penggerakan orang lain, sementara belajar memosisikan diri sebagai proses transformasi perilaku murid hasil interaksi dengan ekosistem belajarnya. Alhasil, fungsi-fungsi manajemen sekolah sangat adaptif untuk diintegrasikan ke dalam beragam program pembelajaran, lantaran komponen instruksional pada prinsipnya merupakan manifestasi nyata dari fungsi manajerial itu sendiri.

Secara operasional, fungsi manajemen Pendidikan Karakter Nasionalis diartikan sebagai rangkaian aktivitas kelembagaan yang melibatkan pihak sekolah untuk mendesain perencanaan, pengorganisasian, eksekusi, serta pengawasan program penguatan karakter agar menyatu dalam iklim pembelajaran. Target akhirnya adalah pembentukan perilaku murid yang mencerminkan dedikasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta keyakinan

teguh atas kesaktian Pancasila selaku ideologi pemersatu bangsa Indonesia.

Dalam berbagai formulasi fungsi manajemen yang dirumuskan oleh para pakar, dijumpai adanya benang merah yang sama, yaitu komitmen mutlak terhadap pentingnya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan. Atas dasar kesamaan tersebut, fungsi manajemen pendidikan karakter nasionalis dan bela negara sangat adaptif untuk diaplikasikan ke dalam berbagai lini aktivitas, termasuk di dalam institusi pendidikan atau program pembelajaran. Guna menyuguhkan pemahaman serta gambaran konseptual yang benderang, draf tulisan ini akan mengupas satu per satu fungsi manajemen yang saling bertautan tersebut, bersandarkan pada teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya:

1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan pada hakikatnya merupakan serangkaian aktivitas untuk menetapkan sasaran yang ingin diraih beserta rumusan strategi untuk menggapai sasaran tersebut. Fase perencanaan (*Planning*) mencakup proses menyeleksi atau mengukuhkan tujuan organisasi, sekaligus merumuskan taktik, regulasi internal, cetak biru program, mekanisme prosedur, metodologi kerja, pemanfaatan instrumen, pemilihan media, pemetaan sistem, alokasi anggaran belanja, hingga penetapan tolok ukur standar yang diperlukan demi merealisasikan target organisasi.

Standardisasi rancangan proses pembelajaran idealnya bersandar pada pilar sistematis dan sistemik. Karakteristik sistematis bermakna bahwa seorang tenaga pendidik dituntut menyusun rencana pembelajaran secara berurutan, memiliki arah kompas yang jelas, dapat diukur ketercapaiannya, serta berkesinambungan. Sementara karakteristik sistemik mengisyaratkan bahwa guru wajib merancang pembelajaran dengan mempertimbangkan interaksi berbagai komponen yang saling bertautan, seperti target capaian

pembelajaran (yang meliputi ranah wawasan, orientasi sikap, dan kecakapan keterampilan), profil karakteristik *murid*, hingga muatan materi ajar (yang mencakup aspek konsep, alur prosedur, dan prinsip-prinsip instruksional).

Dalam koridor hukum, regulasi Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (yang direferensikan lewat *Fokus Media*, 2006: 74-75) menegaskan bahwa rancangan proses pembelajaran mencakup dokumen silabus serta rencana pelaksanaan pembelajaran (yang saat ini dikenal sebagai RPP atau Modul Ajar). Dokumen-dokumen ini sekurang-kurangnya wajib mengakomodasi komponen identitas bidang studi, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator ketercapaian, target pembelajaran, substansi materi, alokasi waktu, metode instruksional, skema aktivitas kelas, instrumen penilaian hasil belajar, serta pemilihan sumber belajar.

Secara operasional, rancangan proses pembelajaran yang disusun oleh guru PPKn dijabarkan ke dalam poin-poin berikut:

a) Silabus atau Alur Tujuan Pembelajaran (ATP).

Dokumen ini bertindak selaku peta jalan utama dalam menyusun rancangan pembelajaran harian. Isinya mencakup identitas mata pelajaran atau rumpun tema, standar kompetensi, kompetensi dasar, garis besar materi, skema aktivitas kelas, indikator capaian, teknik evaluasi, durasi waktu, serta referensi sumber belajar. Dokumen acuan ini diformulasikan oleh satuan pendidikan dengan menyelaraskan dokumen Standar Isi (SI), Standar Kompetensi Lulusan (SKL), serta regulasi penyusunan kurikulum yang berlaku di lembaga tersebut.

b) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau Modul Ajar.

Dokumen ini dikembangkan secara lebih operasional dari silabus guna menuntun aktivitas belajar murid di kelas demi merealisasikan kompetensi dasar yang dituju. Setiap tenaga pendidik di lingkungan sekolah mengemban kewajiban

profesional untuk memformulasikan RPP atau Modul Ajar secara komprehensif dan terstruktur. Langkah ini krusial agar dinamika pembelajaran dapat bergulir secara interaktif, penuh inspirasi, menyenangkan, memicu daya kritis, serta menumbuhkan motivasi murid untuk andal berpartisipasi aktif. Selain itu, rancangan ini harus menyuguhkan ruang yang akomodatif bagi munculnya inisiatif, kreativitas, serta kemandirian *murid*, yang disesuaikan dengan bakat, minat, serta fase perkembangan fisik dan psikologis mereka. Dokumen rancangan ini dirancang untuk setiap unit kompetensi dasar yang dieksekusi dalam satu kali tatap muka atau lebih. Guru dapat menyusun penggalan rancangan kegiatan untuk setiap sesi pertemuan yang diselaraskan dengan tata jadwal di sekolah. Struktur komponennya meliputi: Identitas mata pelajaran; Standar kompetensi; Kompetensi dasar; Target pembelajaran; Muatan materi; Alokasi waktu; Metode mengajar; Skenario aktivitas (Pendahuluan, Inti, dan Penutup); Indikator ketercapaian; Sistem evaluasi (Prosedur, teknik, rumpun, dan instrumen penilaian); serta Sumber belajar. Seluruh komponen tersebut wajib dirakit dengan memperhatikan benang merah keterkaitan substansi antarunsur yang dikembangkan.

Dalam implementasi Kurikulum Merdeka, nomenklatur RPP, Standar Kompetensi (SK), dan Kompetensi Dasar (KD) telah mengalami transformasi regulasi. Hal ini awalnya diatur dalam Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, yang kemudian diperbarui secara formal melalui Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025.

Berdasarkan regulasi mutakhir tersebut, istilah RPP/Modul Ajar kini secara resmi dialihkan menjadi Modul

Ajar yang disusun berbasis Alur Tujuan Pembelajaran (ATP). Sementara itu, istilah Standar Kompetensi (SK) bersama Kompetensi Dasar atau Kompetensi Inti (KD/KI) diubah sepenuhnya menjadi Capaian Pembelajaran (CP). Dalam ekosistem kurikulum baru ini, fungsi ATP memegang peranan yang serupa dengan konsep Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP) pada model kurikulum terdahulu.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Sebelum membedah lebih dalam mengenai fungsi manajemen berikutnya yaitu pengorganisasian, demi menajamkan fokus pembahasan, maka terlebih dahulu akan diuraikan terminologi mengenai organisasi. Lubis (2008: 1) memaparkan bahwa organisasi merupakan suatu entitas yang abstrak, tidak dapat diindra secara visual maupun disentuh, namun eksistensinya senantiasa dapat dirasakan dalam hampir setiap lini dinamika kehidupan. Karakteristik utama dari sebuah organisasi ditandai oleh orientasi perilakunya yang terarah demi mewujudkan target tertentu. Visi dan sasaran kelembagaan tersebut dapat direalisasikan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna lewat akumulasi tindakan perorangan maupun kelompok yang diorganisasikan berdasarkan kesepakatan bersama. Lantaran karakteristiknya yang tidak berwujud fisik, konsep organisasi dapat didefinisikan lewat pelbagai perspektif.

Apabila ditinjau dari ranah kapasitas sumber daya manusia beserta cetak biru program kerjanya, organisasi dapat diartikan sebagai bentuk himpunan individu yang terintegrasi secara sadar, serta dapat pula dikonseptualisasikan sebagai sebuah ekosistem yang tersusun atas rangkaian aktivitas yang saling bertautan. Mengingat esensi organisasi merupakan kumpulan manusia, maka dalam roda operasionalnya mutlak diperlukan tata kelola yang andal agar para personel yang terhimpun di dalamnya mampu bekerja

secara optimal dan memiliki dedikasi yang tinggi untuk mewujudkan visi lembaga. Pada fase perkembangan kontemporer, definisi organisasi mulai menitikberatkan perhatian khusus pada jalinan interaksi yang terjadi antara institusi dengan kondisi lingkungan sosial sekitarnya.

Merujuk pada peta perkembangan konseptual tersebut, maka ditarik sebuah kesimpulan bahwa organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan sosial yang terdiri atas sekelompok individu yang saling berinteraksi berdasarkan pola tata kelola yang terstruktur dengan metode tertentu. Pola ini mengondisikan setiap anggota organisasi agar mengemban tugas pokok dan fungsi (*tupoksi*) masing-masing, di mana sebagai satu kesatuan sistem, mereka bergerak menuju target yang sama serta dibatasi oleh koridor ruang lingkup yang transparan, sehingga keberadaan organisasi dapat diidentifikasi secara tegas dari lingkungan luarnya.

Berlandaskan pada pemaknaan organisasi yang telah dijabarkan di atas, maka fungsi manajemen selanjutnya ialah pengorganisasian (*Organizing*), yaitu sebuah tindakan manajerial untuk mengondisikan jalinan hubungan kerja yang efektif di antara para personel. Langkah ini ditempuh agar mereka dapat berkolaborasi secara efisien, serta memperoleh kepuasan profesional dalam menunaikan penugasan tertentu, di bawah kondisi lingkungan kerja tertentu demi menggapai visi atau sasaran yang telah disepakati bersama.

Formulasi di atas memberikan pemahaman bahwa pengorganisasian pada hakikatnya merupakan ikhtiar nyata untuk melengkapi cetak biru perencanaan yang telah dirumuskan dengan penyusunan struktur kepengurusan pelaksanaannya. Poin krusial yang wajib diindahkan dalam fase pengorganisasian ini adalah kepastian bahwa pada setiap lini program kerja harus transparan mengenai siapa penanggung jawabnya, kapan tenggat pelaksanaannya, di

mana lokasinya, bagaimana alur prosedur kerjanya, serta apa target capaiannya. Parameter ini berlaku universal, baik untuk rumpun pekerjaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa (nonfisik) maupun ragam pekerjaan yang memproduksi *output* material.

Bertautan dengan pilar pengorganisasian ini, dapat disintesis beberapa asas fundamental dalam sebuah organisasi, di antaranya meliputi:

- a) organisasi wajib menegakkan prinsip profesionalisme, yaitu pembagian unit kerja yang proporsional sesuai dengan peta kebutuhan lembaga;
- b) pengelompokan divisi kerja harus merepresentasikan pembagian beban kerja secara adil;
- c) organisasi harus mengatur mekanisme pelimpahan wewenang (*delegation of authority*) serta tanggung jawab secara berjenjang;
- d) struktur organisasi wajib mencerminkan rentang kendali (*span of control*) yang ideal;
- e) organisasi harus mengadopsi prinsip kesatuan komando (*unity of command*); dan
- f) organisasi dituntut memiliki karakteristik yang fleksibel serta seimbang.

Merujuk pada kompilasi teori di atas, setidaknya terdapat tiga tahapan sistematis dalam menjalankan proses pengorganisasian, yaitu:

- a) menyusun spesifikasi deskripsi tugas (*job description*) yang wajib dieksekusi demi meraih target organisasi;
- b) mendistribusikan akumulasi beban kerja makro menjadi kluster aktivitas yang logis dan akomodatif untuk ditunaikan oleh perorangan; serta
- c) merancang dan mengembangkan suatu sistem koordinasi untuk menyatukan performa kerja para anggota menjadi satu kesatuan

tim yang padu dan harmonis.

Roda organisasi dijamin akan bergulir secara prima apabila didesain berdasarkan analisis beban kerja, rincian tugas yang mendalam, serta pembagian tanggung jawab yang transparan. Atas dasar kebutuhan tersebut, sebuah lembaga wajib merumuskan bagan struktur organisasinya. Gibson (1994: 16) menguraikan bahwa:

Struktur organisasi merepresentasikan pola formal dari rangkaian aktivitas serta jalinan hubungan di antara pelbagai sub-unit yang ada dalam organisasi. Dalam hal ini, model struktural mencakup dua dimensi krusial dari anatomi organisasi, yakni desain pekerjaan (*job design*) serta desain organisasi (*organizational design*).

3) Pelaksanaan (*Actuating*)

Dari seluruh rangkaian siklus manajemen, fase penggerakan atau pelaksanaan (*actuating*) merupakan pilar utama dalam operasional organisasi. Jika fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berkutat pada dimensi konseptual dan aspek-aspek abstrak, maka fungsi *actuating* justru menitikberatkan pada aksi riil di lapangan. Dalam konteks persekolahan, fungsi ini mengejawantah ke dalam bentuk pelaksanaan proses pembelajaran di kelas yang secara terstruktur terbagi ke dalam tiga fase utama, meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, serta kegiatan penutup.

a) Kegiatan Pendahuluan

Pada kegiatan awal atau pembuka ini, seorang tenaga pendidik mengemban tugas pokok untuk:

- (1) Mengondisikan kesiapan mental (*psikis*) serta kesiapan fisik murid agar mereka fokus mengikuti dinamika pembelajaran.
- (2) Memberikan stimulus pertanyaan pemantik (*apersepsi*) guna mengaitkan wawasan lama yang telah dimiliki murid dengan substansi materi baru yang akan dikaji.

- (3) Memaparkan secara transparan perihal target capaian pembelajaran, tujuan instruksional, atau kompetensi dasar yang dituju.
- (4) Menguraikan ruang lingkup garis besar materi sekaligus memberikan penjelasan ringkas mengenai skenario alur aktivitas kelas yang akan dilalui.

b) Kegiatan Inti

Pada kegiatan inti memegang peranan sebagai episentrum proses instruksional kelas demi merealisasikan kompetensi dasar yang dicanangkan. Dinamika di dalamnya wajib dikemas secara interaktif, penuh inspirasi, menyenangkan, menantang, serta andal memotivasi murid untuk andal berpartisipasi aktif. Skenario pembelajaran pun harus menyuguhkan ruang yang akomodatif bagi munculnya inisiatif, kreativitas, serta kemandirian murid yang diselaraskan dengan bakat, minat, hingga fase perkembangan fisik dan psikologis mereka. Aktivitas inti ini diimplementasikan melalui pendekatan saintifik (*scientific approach*) yang disesuaikan dengan karakteristik murid serta rumpun mata pelajaran, yang secara runut mencakup siklus eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi sebagai berikut:

- (1) Eksplorasi, yaitu rangkaian aktivitas instruksional yang membuka panggung seluas-luasnya bagi murid untuk berburu dan mengonstruksi pelbagai data informasi, memecahkan problematika (*problem solving*), serta melahirkan gagasan inovasi.
- (2) Elaborasi, yakni serangkaian dinamika belajar yang memfasilitasi murid untuk mengekspresikan, menguji, serta mengaktualisasikan kapasitas dirinya melalui pelbagai penugasan dan aktivitas kolaboratif.
- (3) Konfirmasi, merepresentasikan rangkaian agenda

pembelajaran yang menyuguhkan kesempatan bagi murid untuk memperoleh umpan balik penilaian, mendapatkan penguatan konseptual, serta menerima koreksi konstruktif secara berkesinambungan.

c) Kegiatan Penutup

Pada kegiatan akhir atau terminasi pembelajaran ini, guru berkewajiban untuk:

- (1) Membimbing murid —baik secara kolaboratif maupun mandiri—untuk merumuskan ikhtisar, rangkuman, atau kesimpulan dari poin-poin penting pelajaran yang telah dipelajari.
- (2) Mengeksekusi instrumen penilaian acuan dan/atau proses refleksi mendalam terhadap rangkaian aktivitas yang telah ditunaikan secara konsisten dan terprogram.
- (3) Menyajikan umpan balik (*feedback*) konstruktif terkait dinamika proses serta capaian hasil pembelajaran yang diraih *murid*.
- (4) Merancang cetak biru program tindak lanjut (*follow-up*) pascapembelajaran, yang dapat diejawantahkan ke dalam bentuk aktivitas remedial, program pengayaan (*enrichment*), pemberian layanan konseling, maupun penugasan terstruktur baik secara individual maupun kelompok selaras dengan profil hasil belajar *murid*.
- (5) Menginformasikan garis besar garis rencana skema pembelajaran yang akan diselenggarakan pada sesi tatap muka berikutnya.

4) Penilaian (*Monitoring*)

Evaluasi atau penilaian memegang peranan sebagai komponen integral yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan sistem pembelajaran. Dalam setiap dinamika instruksional, penilaian mengemban fungsi vital untuk menakar sejauh mana murid mampu

merealisasikan target-target pembelajaran yang telah dicanangkan. Langkah evaluatif ini membantu tenaga pendidik dalam mengukur efektivitas muatan kurikulum, taktik mengajar, serta rangkaian aktivitas belajar yang meliputi rumpun kompetensi wawasan, orientasi sikap, dan kecakapan keterampilan *murid*. Hal tersebut selaras dengan tesis Arifin (2013: 4) yang mengemukakan bahwa:

Penilaian merupakan suatu konstelasi proses atau aktivitas sistematis dan berkesinambungan guna mengumpulkan data informasi mengenai dinamika proses serta capaian hasil belajar *murid*, dalam rangka merumuskan keputusan-keputusan strategis berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Penilaian sama sekali tidak boleh direduksi sebatas kalkulasi angka numerik semata, melainkan melalui instrumen evaluasi ini guru dapat menegaskan peta ketercapaian sekaligus menyokong *murid* dalam mengantisipasi berbagai hambatan belajar.

Merujuk pada pemikiran Brummelen (2011: 150), diidentifikasi adanya tiga tipologi penilaian *murid* yang berkarakteristik spesifik dengan sasarannya masing-masing, meliputi:

a) Penilaian atas Pembelajaran (*Assessment of Learning*).

Tipe ini merepresentasikan model penilaian sumatif yang merangkum akumulasi pencapaian *murid* pada fase akhir tahun ajaran atau akhir program. Fokus utamanya adalah memonitor seberapa baik *murid* telah menguasai materi yang ditransfer oleh guru, di mana hasilnya dikonversikan dalam bentuk pelaporan angka numerik atau predikat huruf biner.

b) Penilaian bagi Pembelajaran (*Assessment for Learning*).

Tipologi ini mengacu pada model penilaian formatif yang menyajikan umpan balik deskriptif-konstruktif demi menyempurnakan performa *murid* dan kualitas proses pembelajaran secara berkelanjutan. Langkah ini menolong

murid dalam mengklarifikasi pemahaman konseptual serta memecahkan kebuntuan belajar. Model evaluasi ini andal menumbuhkan rasa percaya diri murid atas kapasitas belajarnya, sekaligus menantang mereka untuk terus memacu prestasi.

c) Penilaian sebagai Pembelajaran (*Assessment as Learning*).

Pada model ini, murid memosisikan diri untuk belajar melalui aktivitas mengevaluasi progres belajarnya secara mandiri. Murid dilatih mempraktikkan prosedur penilaian diri (*self-assessment*) terhadap kapasitas pengetahuan, keterampilan, kreativitas, maupun karakter personal mereka. Melalui skema ini, murid juga dibimbing untuk merumuskan target target belajar baru yang bermakna serta realistis.

Ketiga rumpun penilaian tersebut pada dasarnya saling bertautan satu sama lain. Oleh karena itu, skema evaluasi yang ideal dituntut mampu mendeteksi tingkat keberhasilan murid dalam merengkuh hasil pembelajaran yang diharapkan. Mengingat tidak seluruh *output* pembelajaran dapat dikuantifikasi secara mutlak, maka parameter keberhasilan hakiki baru akan tampak manakala guru menyaksikan murid mengaplikasikan ilmu yang diperolehnya ke dalam realitas kehidupan nyata yang relevan. Langkah evaluasi dipandang sebagai faktor determinan dalam menentukan arah mutu proses dan produk belajar. Brummelen (2011: 151-152) menguraikan bahwa guru mutlak memahami urgensi dari tujuan penilaian murid, yang di antaranya dialokasikan untuk:

a) Memotivasi dan Mengakselerasi Pembelajaran Murid

- (1) Menakar sejauh mana murid berhasil menggapai capaian pembelajaran yang ditargetkan, serta mendeteksi sekaligus mengevaluasi implikasi yang tidak terduga.
- (2) Mengidentifikasi peta prestasi sekaligus mendiagnosis hambatan belajar agar murid dapat mengoptimalkan potensi keunggulan serta mengantisipasi kelemahan diri mereka.

- (3) Mempertajam kualitas instruksional dan variasi pengalaman belajar lainnya guna mendongkrak mutu pembelajaran, baik pada level individu murid maupun iklim kelas secara makro.
 - (4) Membimbing murid dalam menumbuhkan dan mempraktikkan kecakapan penilaian diri serta refleksi pemahaman mandiri atas proses belajar mereka.
 - (5) Mendampingi murid dalam mengonstruksi visi tujuan pembelajaran yang esensial dan rasional, sekaligus melatih mereka menerima tanggung jawab penuh atas dinamika belajarnya sendiri.
- b) Mendistribusikan Informasi Bermakna bagi Pemangku Kepentingan
- (1) Menyajikan laporan tanggapan yang objektif, konkret, dan maslahat mengenai profil prestasi, kapasitas kompetensi, perilaku harian, serta orientasi sikap dan karakter murid.
 - (2) Memosisikan guru, murid, dan orang tua/wali murid dalam satu jejaring komunikasi yang harmonis guna memantau progres perkembangan anak dari waktu ke waktu.
 - (3) Menyuguhkan kompas bimbingan dan arah rekomendasi bagi kelanjutan pilihan studi maupun orientasi karier masa depan murid.
 - (4) Melaporkan rekam jejak prestasi belajar secara akuntabel kepada pihak otoritas manajemen sekolah maupun instansi pemerintah terkait.

Skema pertama menitikberatkan perhatian pada dimensi penilaian *bagi (for)* dan *sebagai (as)* pembelajaran, yakni monitoring terhadap kurva perkembangan proses belajar murid dalam menguasai aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik selama aktivitas belajar mengajar bergulir. Sementara skema kedua condong pada bentuk penilaian *atas (of)* pembelajaran, yaitu evaluasi hasil akhir (*final output*) murid pascamenyelesaikan satu periode program

instruksional.

Model Penilaian Autentik menjadi salah satu pilar penekanan yang fundamental, salah satunya sejak masa implementasi Kurikulum 2013 hingga model kurikulum kontemporer saat ini. Sebagaimana jamak dipahami, evaluasi merupakan rangkaian proses pengumpulan data empiris yang menyuguhkan potret komprehensif mengenai peta perkembangan murid pascamengarungi fase pembelajaran. Hal ini koheren dengan argumen Kunandar (2013: 35-36) yang memaparkan bahwa:

Penilaian autentik merupakan rangkaian aktivitas mengevaluasi kompetensi murid yang menitikberatkan pada apa yang semestinya dinilai, meliputi dimensi proses maupun hasil akhir menggunakan pelbagai instrumen evaluasi yang diselaraskan dengan tuntutan kompetensi pada Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Inti (KI)/Capaian Pembelajaran (CP), serta Kompetensi Dasar (KD).

Dalam aplikasi penilaian autentik, murid dituntut untuk mampu mengimplementasikan konsep teoretis ke dalam konteks keadaan yang sebenarnya, selaras dengan kapasitas kapabilitas atau keterampilan nyata yang mereka kuasai. Konsekuensinya, seorang pendidik wajib menjaga keseimbangan yang proporsional antara evaluasi ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang disesuaikan dengan fase perkembangan karakteristik anak pada jenjangnya. Sebagai contoh, pada level PAUD, TK, dan SD, porsi instrumen evaluasi lebih didominasi pada wilayah keterampilan lunak (*soft skills*—seperti kecakapan mengamati, motivasi berprestasi, etos kerja keras, kedisiplinan, teknik berkomunikasi, hingga internalisasi tata krama) ketimbang penilaian keterampilan keras (*hard skills* yang melulu mengukur penguasaan kognitif teoretis dan teknis mekanis).

Berikut merupakan karakteristik utama yang mencirikan model penilaian autentik:

a) Mampu mengukur seluruh dimensi pembelajaran secara

komprehensif, mencakup aspek performa proses (*kinerja*) hingga hasil akhir (*produk*).

- b) Dieksekusi secara simultan, baik sepanjang proses pembelajaran tengah bergulir maupun pascaaktivitas instruksional selesai diselenggarakan.
- c) Memanfaatkan variasi metodologi evaluasi serta multi-sumber rujukan data yang kaya.
- d) Memosisikan instrumen tes tertulis hanya sebagai salah satu alternatif alat pengumpul data penilaian, bukan sebagai satu-satunya penentu tunggal.
- e) Ragam penugasan yang diujikan merepresentasikan miniatur dari serangkaian bagian realitas kehidupan nyata yang dihadapi murid setiap hari.
- f) Konstruksi penilaian wajib mengutamakan kedalaman pemahaman wawasan (*knowledge depth*) serta keahlian substansial *murid*.

Sementara itu, karakteristik dasar dari penilaian autentik dijabarkan ke dalam beberapa poin berikut:

- a) Fungsionalitas Ganda (Formatif dan Sumatif)

Instrumen ini dapat didayagunakan baik untuk kepentingan evaluasi formatif—yaitu mengukur capaian kompetensi murid pada satu unit kompetensi dasar—maupun evaluasi sumatif yang menakar ketuntasan capaian pembelajaran/kompetensi inti dalam rentang satu semester. Fokus utamanya bertumpu pada penilaian performa nyata (*performance*), bukan sebatas menguji aspek kompetensi yang bersifat hafalan kognitif atau daya ingat tekstual.

- b) Berkesinambungan dan Terintegrasi.

Evaluasi ini dikonseptualisasikan sebagai satu kesatuan sistem yang utuh dan melekat sepanjang proses instruksional, yang bertindak selaku alat valid untuk menghimpun data

informasi komprehensif terkait perkembangan capaian kompetensi *murid*.

c) Berorientasi pada Umpan Balik (*Feedback*).

Hasil dari penilaian ini dapat langsung dimanfaatkan sebagai bahan umpan balik yang konstruktif guna memetakan potret pencapaian kompetensi murid secara menyeluruh dan mendalam.

Berlandaskan pada ciri dan karakteristik penilaian autentik di atas, maka konstelasi prosedur penilaian terhadap murid wajib diposisikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika pembelajaran, serta harus merefleksikan problematika kontekstual yang ada di dunia nyata atau kehidupan harian. Oleh sebab itu, dalam merancang instrumen penilaian autentik, seorang pendidik mutlak mengindahkan prinsip-prinsip mendasar berikut: regulasi evaluasi harus memberdayakan multi-ukuran, multi-metode, serta standar kriteria yang adaptif dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar; selain itu, penilaian wajib bersifat holistik dengan menjangkau seluruh target capaian pembelajaran (meliputi ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan).

Di samping itu, penilaian program bela negara tidak sebatas didasarkan pada diri murid, melainkan juga ditujukan bagi performa guru selaku figur teladan yang wajib mengaktualisasikan rasa cinta tanah air. Oleh karena itu, penguatan kapasitas guru mutlak dikembangkan pada tiga pilar utama: aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Pada ranah sikap, seorang pendidik dituntut mampu memberikan keteladanan yang ideal dalam kehidupan bernegara dan berkomitmen merawat kedaulatan NKRI. Pada ranah keterampilan, guru harus piawai mengejawantahkan sikap nasionalisme tersebut dalam berbagai situasi di mana pun ia berada. Sementara pada ranah pengetahuan, guru wajib dibekali wawasan teoretis yang luas mengenai geopolitik kebangsaan dan wawasan nusantara. Atas dasar kebutuhan tersebut, agenda

pendidikan dan pelatihan (diklat) nasionalisme dan bela negara bagi para guru memegang urgensi yang signifikan.

Setiap institusi pendidikan yang berkomitmen untuk maju senantiasa menegakkan fungsi pengawasan (*monitoring*). Langkah pengawasan dijalankan demi menyelaraskan ritme perilaku personel organisasi dengan visi kelembagaan, sekaligus menjamin agar tidak terjadi disparitas atau penyimpangan yang melebar antara cetak biru perencanaan dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Pidarta (2004: 158) memaparkan bahwa terdapat dua fokus sasaran utama dalam pengawasan: pertama ialah performa perilaku individu selaku motor penggerak yang mengonversi komponen *input* menjadi *output*, dan kedua ialah kualitas dari *output* organisasi itu sendiri. Satu sisi diarahkan agar individu patuh pada budaya organisasi, sedangkan sisi lainnya diikhtiarkan agar produk akhir tidak melenceng dari rencana awal. Kedua target tersebut koheren dengan terminologi kontrol yang dirumuskan oleh Robbins (1982: 376), yaitu:

Suatu proses memonitor rangkaian aktivitas guna mengidentifikasi apakah entitas individu maupun organisasi yang bersangkutan telah merengkuh dan mendayagunakan segenap sumber daya pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka merealisasikan tujuannya, serta merumuskan tindakan korektif apabila sasaran tersebut belum tercapai.

Sementara itu, Johnson (1973) menyuguhkan definisi kontrol secara lebih ringkas, yakni sebagai sebuah fungsi sistem yang mengoperasikan tindakan penyesuaian terhadap rencana awal, serta mengupayakan agar setiap riak penyimpangan dari target sistem tetap berada dalam koridor batas yang dapat ditoleransi. Dalam sudut pandang ini, kontrol diposisikan sebagai kendali mekanis agar performa petugas, dinamika proses, hingga produk *output* konsisten selaras dengan cetak biru rencana.

Merujuk pada kompilasi pemaknaan tersebut,

pengawasan manajemen dapat disimpulkan sebagai sebuah ikhtiar sistematis dalam menetapkan tolok ukur pelaksanaan yang sinkron dengan target perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik yang adaptif, mengomparasikan aktivitas faktual di lapangan dengan standar yang baku, mendeteksi serta mengukur derajat deviasi, hingga mengambil langkah tindakan korektif yang presisi. Langkah ini krusial demi menjamin seluruh aset organisasi diberdayakan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai visi lembaga. Kegiatan pengawasan sejatinya merupakan instrumen kendali agar operasional berjalan di atas rel rencana dan menjamin ketercapaian target organisasi. Urgensi mendasar dari fungsi pengawasan ini terletak pada kemampuannya untuk mendeteksi letak kekeliruan secara cepat manakala terjadi penyimpangan, sehingga tindakan solutif dapat segera dirumuskan.

Roda pengawasan ini digerakkan oleh pimpinan satuan pendidikan berkolaborasi dengan pihak pengawas sekolah. Manifestasi dari fungsi pengawasan ini diejawantahkan ke dalam lima pilar aktivitas, meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut:

a) Pemantauan (*Monitoring*)

- (1) Aktivitas pemantauan terhadap jalannya proses pembelajaran dieksekusi secara menyeluruh pada fase perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian hasil belajar.
- (2) Langkah pemantauan diimplementasikan lewat teknik diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion/FGD*), observasi lapangan, pencatatan performa, perekaman aktivitas, wawancara mendalam, serta telaah studi dokumentasi.
- (3) Agenda pemantauan ini diselenggarakan oleh kepala sekolah bersama pengawas pembina satuan pendidikan.

b) Supervisi

- (1) Agenda supervisi akademik terhadap proses pembelajaran dilaksanakan secara intensif pada fase perencanaan, pelaksanaan, serta instrumen penilaian hasil belajar.
- (2) Proses supervisi instruksional dijalankan melalui metode pemberian contoh praktik baik (*modelling*), ruang diskusi dialogis, pelatihan klinis, serta layanan konsultasi profesional.
- (3) Aktivitas supervisi ini diampu secara berkala oleh kepala sekolah dan pengawas satuan pendidikan.

c) Evaluasi

- (1) Langkah evaluasi proses pembelajaran diorientasikan untuk menguji tingkat mutu pembelajaran secara komprehensif, yang mencakup telaah dokumen perencanaan, dinamika pelaksanaan kelas, hingga validitas penilaian hasil belajar.
- (2) Prosedur evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan melalui taktik:
 - (a) Mengomparasikan karakteristik proses pembelajaran yang dipraktikkan guru dengan regulasi standar proses yang berlaku.
 - (b) Mengidentifikasi peta kinerja nyata guru dalam dinamika pembelajaran agar selaras dengan standar kompetensi pendidik.
 - (c) Memusatkan amatan evaluasi pada akumulasi totalitas performa kinerja guru sepanjang proses pembelajaran bergulir.

d) Pelaporan

Rangkaian data hasil dari aktivitas pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran selanjutnya didokumentasikan secara akuntabel untuk dilaporkan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang relevan.

e) Tindak Lanjut (*Follow-up*)

- (1) Pemberian penguatan eksternal beserta apresiasi/penghargaan (*reward*) diberikan kepada dewan guru yang sukses memenuhi atau melampaui standar mutu.
- (2) Penyampaian teguran atau pembinaan yang berkomitmen edukatif dilayangkan kepada tenaga pendidik yang dinilai belum mencapai standar yang ditetapkan.
- (3) Guru diberikan ruang dan fasilitasi penuh untuk mengikuti program diklat/penataran lanjutan, serta diwajibkan melakukan diseminasi wawasan atas perolehan pengetahuan dan keterampilan barunya kepada sejawat.

Seluruh rumpun fungsi manajemen ini beroperasi secara simultan, saling berinteraksi, dan bertautan satu sama lain hingga membentuk apa yang diidentifikasi sebagai siklus proses manajemen. Dengan demikian, proses manajemen pada dasarnya merupakan wujud interaksi dinamis antar-fungsi manajerial. Dalam ekosistem persekolahan, agar cita-cita pendidikan di tingkat sekolah dapat direalisasikan secara efektif dan efisien, maka roda manajemen pendidikan mengemban peranan yang sangat vital.

Sebab bagaimanapun, sekolah merupakan sebuah sistem terbuka yang di dalamnya mengikat interaksi lintas komponen dan akumulasi aktivitas makro yang wajib dikelola secara profesional, akurat, dan tertib. Lembaga pendidikan yang berjalan tanpa disokong oleh tata kelola manajemen yang andal hanya akan memproduksi kesemrawutan jalannya organisasi, yang pada gilirannya membuat target-target pendidikan mustahil mencapai sasaran yang dicita-citakan.

Setiap denyut aktivitas pendidikan di sekolah mutlak bersandar pada perencanaan yang transparan dan realistis, pengorganisasian yang efektif dan efisien selaras dengan peta kebutuhan, serta pengerahan, penugasan, penempatan, dan

pemberian motivasi kepada seluruh personel sekolah yang taat pada kaidah humanisme dengan mempertimbangkan *tupoksi* masing-masing. Pendekatan ini krusial demi mendongkrak mutu kinerja sekaligus menegakkan fungsi pengawasan secara periodik dan berkelanjutan.

Dalam konstelasi aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, hingga pengawasan di sekolah, institusi wajib melibatkan seluruh komponen yang kompeten, termasuk elemen masyarakat selaku penyuplai *input* murid sekaligus pengguna lulusan (*user*). Melalui keterlibatan kolektif ini, garansi kuantitas dan kualitas hasil capaian program dapat dipertanggungjawabkan secara transparan serta akuntabel, yang pada fase berikutnya akan mengeskalasi citra positif sekolah di mata publik sebagai lembaga pendidikan yang unggul dan efektif. Partisipasi aktif masyarakat dan orang tua murid memegang posisi mutlak, mengingat orang tua merupakan pihak pemangku kepentingan utama (*primary stakeholders*) terhadap kualitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Orang tua memiliki hak konstitusional untuk menuntut jaminan peningkatan mutu pendidikan yang diterima oleh anak-anak mereka kepada pihak penyelenggara pendidikan, yakni sekolah dan pemerintah.

b. Teori Pendidikan Karakter

Dalam ranah akademis, penanaman karakter memosisikan diri sebagai salah satu pendekatan krusial dalam dunia pendidikan yang diorientasikan pada rekonstruksi manusia utuh. Tujuannya agar murid tidak sekadar menguasai informasi kognitif, melainkan juga memiliki orientasi sikap dan perilaku yang merefleksikan nilai-nilai kebajikan. Pendidikan karakter pada hakikatnya merupakan sebuah proses instruksional yang menuntun murid agar andal mengidentifikasi nilai, meresapi maknanya, serta mengejawantahkan nilai

tersebut dalam realitas harian. Melalui sudut pandang ini, watak tidak boleh direduksi sebatas tumpukan informasi teoretis mengenai moralitas baik dan buruk, melainkan wajib bertransformasi menjadi disposisi batin serta habituasi konsisten untuk menegakkan kebajikan.

1) Teori Karakter menurut Thomas Lickona.

Dalam formulasi teorinya, Lickona mengonseptualisasikan karakter sebagai bentuk nilai luhur yang wajib diaktualisasikan ke dalam perbuatan nyata. Berdasarkan tesis Lickona, kepribadian yang ideal bertumpu pada tiga pilar yang saling berkelindan, meliputi *knowing the good* (memahami kebajikan), *desiring the good* (menginginkan kebajikan), serta *doing the good* (mempraktikkan kebajikan). Seseorang layak dinilai berkarakter kuat manakala ia menguasai wawasan moral, memiliki kepekaan emosi atau kecintaan yang mendalam terhadap kebajikan, serta cakap menerjemahkan nilai tersebut ke dalam tindakan konkret di lapangan (Lickona, 1991: 51). Pandangan ini membuktikan bahwa gerakan penguatan karakter merupakan sebuah siklus proses yang komprehensif lantaran menyatukan dimensi kognitif, afektif, sekaligus psikomotorik.

Bagi Lickona, watak yang tangguh tersusun atas tiga komponen penentu, yakni *Moral Knowing* (wawasan moral), *Moral feeling* (perasaan moral), serta *Moral Action* (tindakan moral). Ketiga komponen utama tersebut sama sekali bukan merupakan tahapan parsial yang berdiri sendiri, melainkan bertindak selaku satu kesatuan sistem yang saling memengaruhi dan mengintervensi dalam pembentukan kepribadian murid (Lickona, 1991: 53). Oleh karena itu, arsitektur pendidikan karakter dituntut andal mengeskalisasi kapasitas murid dalam membedah nilai moral, menumbuhkan kepekaan perasaan serta komitmen batin terhadap prinsip tersebut, hingga membangun

kecakapan untuk mengaktualisasikannya dalam perilaku keseharian.

Pertama, *Moral Knowing* (Wawasan Moral).

Moral Knowing memegang peranan sebagai dimensi kognitif dalam struktur karakter yang berafiliasi dengan kapasitas intelek murid untuk menelaah prinsip moral serta mendayagunakan pertimbangan etis saat merespons pelbagai problematika kehidupan. Di dalam komponen *Moral Knowing* ini, Lickona mengidentifikasi adanya enam aspek fundamental, meliputi: (1). *moral awareness* (kesadaran moral); (2). *knowing moral values* (pengetahuan mengenai nilai-nilai moral); (3). *perspective-taking* (kemampuan mengadopsi sudut pandang orang lain); (4). *moral reasoning* (penalaran moral); (5). *decision-making* (pengambilan keputusan); (6). *self-knowledge* (pemahaman terhadap diri sendiri) (Lickona, 1991: 53).

- 1). *Moral awareness* mengandung arti bahwa murid dibekali sensitivitas nalar untuk mendeteksi dan mengidentifikasi fenomena yang bermuatan dimensi etis. Murid tidak sebatas menonton suatu peristiwa, melainkan piawai menyadari bahwa dinamika tersebut bertautan dengan timbangan nilai baik dan buruk.
- 2). *Knowing moral values* merepresentasikan kapabilitas murid dalam mengenali serta mendalami ragam nilai luhur yang diposisikan selaku kompas pedoman hidup, seperti aspek kejujuran, tanggung jawab, keadilan, penghormatan, toleransi, hingga empati kepedulian.
- 3). *Perspective-taking* bertumpu pada kematangan emosi untuk menyelami, mengerti, serta menghargai cara pandang sekaligus perasaan yang dirasakan oleh orang lain.
- 4). *Moral reasoning* merupakan kecakapan berpikir secara rasional dan objektif dalam merumuskan argumentasi logis

mengapa suatu perbuatan dikategorikan benar atau salah.

- 5). *Decision-making* berkaitan erat dengan ketangkasan menentukan opsi pilihan langkah bersandarkan pada pertimbangan moral yang matang.
- 6). *Self-knowledge* merepresentasikan kapasitas individu untuk merefleksikan diri secara objektif, termasuk memetakan potensi kekuatan, celah kelemahan, kecenderungan psikologis, serta tatanan prinsip nilai yang ia yakini dalam sanubarinya (Lickona, 1991: 53).

Dalam koridor penelitian ini, dimensi *Moral Knowing* dioptimalkan sebagai pisau analisis untuk meneropong sejauh mana murid menyelami nilai-nilai nasionalisme yang berpadu dengan muatan religius. Para murid ditargetkan tidak sekadar menghafal definisi konseptual dari rasa cinta tanah air, integrasi persatuan, sikap toleransi, tanggung jawab kewargaan, penghormatan atas pluralisme, maupun doktrin keagamaan, melainkan dituntut andal memahami landasan moral yang melatarbelakangi nilai-nilai luhur tersebut. Kapasitas menelaah serta menalar prinsip kebajikan ini memegang posisi vital; sebab murid yang memiliki kematangan wawasan moral diproyeksikan akan jauh lebih adaptif dan jeli dalam memisahkan antara pola sikap yang konstruktif-inklusif dengan kecenderungan sikap destruktif yang rentan memicu intoleransi, eksklusivisme, radikalisme, hingga aksi kekerasan.

Konsep *moral knowing* dalam konteks riset ini dapat direpresentasikan melalui kadar pemahaman siswa mengenai pilar-pilar kebangsaan seperti Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, serta rekam jejak sejarah perjuangan bangsa. Selain itu, dimensi ini juga mencakup pemahaman akan lambang negara, semangat persatuan, sikap toleran, budaya gotong royong, rasa tanggung jawab, serta rasa cinta

terhadap tanah air.

Kedua, *Moral feeling* (Perasaan Moral)

Moral feeling memosisikan diri sebagai dimensi afektif yang bertautan dengan getaran perasaan, kepekaan kesadaran batin, serta kecenderungan emosional individu terhadap pilar-pilar nilai moral. Penguasaan wawasan kognitif atas sebuah kebajikan sama sekali belum menjamin bahwa individu bersedia mengaplikasikannya dalam tindakan nyata. Oleh sebab itu, prinsip nilai tersebut wajib diinternalisasikan secara mendalam agar melebur menjadi bagian dari kesadaran psikologis dan emosi person. Lickona memetakan enam elemen penggerak dalam ranah *Moral feeling* ini, yang mencakup: (1). *conscience* (suara hati nurani); (2). *self-esteem* (apresiasi/penghargaan terhadap harga diri); (3). *empathy* (kapasitas empati); (4). *loving the good* (kecintaan pada kebajikan); (5). *self-control* (regulasi pengendalian diri); *humility* (kerendahan hati) (Lickona, 1991: 53);

Suara hati nurani bertindak sebagai instrumen batin untuk merasakan kewajiban etis sekaligus memisahkan antara perbuatan luhur dengan tindakan tercela. Apresiasi terhadap harga diri bertautan dengan kecakapan individu dalam menghargai eksistensi dirinya sebagai pribadi yang bermartabat dan bernilai. Rasa empati mengindikasikan kematangan emosi untuk menyelami sekaligus memahami situasi psikologis orang lain. *Loving the good* memanifestasikan lahirnya kecintaan yang tulus terhadap tatanan nilai dan perbuatan baik, sehingga individu menegakkan kebaikan bukan lantaran cemas terhadap ancaman sanksi hukuman. *Self-control* memosisikan diri sebagai kapasitas regulasi untuk mengendalikan dorongan impulsif dan

gejolak emosi agar perilaku konsisten berlabuh pada koridor moral. Sementara itu, *humility* atau kerendahan hati mencerminkan keikhlasan person untuk menginsafi keterbatasan diri, terbuka menerima kebenaran objektif, serta menaruh hormat pada sesama (Lickona, 1991: 53).

Dimensi *Moral feeling* mengemban posisi vital dalam siklus peresapan nilai nasionalisme yang berpadu dengan muatan religius. Nilai nasionalisme, sebagai contoh, mustahil optimal jika sebatas diisolasi pada ranah kognitif, melainkan wajib memantik debaran rasa cinta pada tanah air, rasa kepemilikan kolektif atas kehidupan bernegara, kepekaan empati pada sesama warga, serta kelapangan dada untuk merawat pluralisme. Begitu pula dengan nilai religius, tidak boleh mandek sebagai tumpukan wawasan doktrinal ajaran agama, melainkan dituntut bertransformasi menjadi kesadaran spiritual, kepedulian sosial, kendali diri yang kuat, gairah mencintai kebajikan, serta penghormatan tulus pada harkat manusia yang berbeda latar belakang.

Ketiga, *Moral Action* (Tindakan Moral)

Moral Action memegang peranan sebagai dimensi psikomotorik atau perilaku yang merepresentasikan perwujudan konkret dari prinsip moral ke dalam perbuatan riil. Merujuk pada pemikiran Lickona, marwah karakter pada akhirnya wajib mengejawantah dalam bentuk tindakan nyata. Seseorang bisa saja menguasai wawasan moral yang luas bahkan menyimpan afirmasi emosional yang positif atas kebajikan tersebut, namun belum tentu ia cakap mengeksekusinya dalam tindakan nyata. Oleh sebab itu, gerakan pendidikan karakter berkewajiban mengawal perkembangan murid hingga merengkuh kapabilitas untuk menegakkan tindakan moral. Komponen *Moral Action* ini

dikonstruksikan oleh tiga aspek penentu, meliputi: (a). *competence* (kompetensi); (b) *will* (kemauan); (c) *habit* (kebiasaan) (Lickona, 1991: 53)

Kompetensi mencerminkan kecakapan person dalam menerjemahkan akumulasi wawasan kognitif dan kepekaan emosi moralnya menjadi tindakan yang presisi. Kemauan bertindak selaku daya dorong internal yang tangguh untuk konsisten melakukan perbuatan yang dinilai benar, kendati harus berbenturan dengan pelbagai aral rintangan. Sementara itu, kebiasaan merepresentasikan pola perilaku moral yang dieksekusi secara berulang-ulang (*habitulasi*) sehingga mengkristal menjadi bagian permanen dari gaya hidup seseorang. Ketiga elemen dinamis tersebut mempertegas argumen bahwa ketangguhan watak tidak diukur dari kelihaihan individu dalam berwacana seputar nilai luhur, melainkan tecermin dari konsistensi perilakunya dalam realitas harian.

Dalam iklim persekolahan, manifestasi *Moral Action* dapat dideteksi lewat karakteristik perilaku murid tatkala berinteraksi dengan dewan guru, rekan sebaya, staf tenaga kependidikan, masyarakat luas, maupun ekosistem lingkungan sekolah. Watak nasionalisme-religius dapat diaktualisasikan melalui pembiasaan perilaku yang toleran terhadap perbedaan, ikhtiar merawat persatuan, kedisiplinan menunaikan tanggung jawab, kepatuhan pada regulasi, kesediaan menolong sesama, kepedulian menjaga ekosistem alam, partisipasi aktif dalam agenda keagamaan yang positif, serta benteng diri untuk menjauhi segala perbuatan yang bermuatan narasi kebencian, diskriminasi, aksi kekerasan, maupun paham intoleransi.

Ketiga pilar komponen tersebut berinteraksi secara simultan membentuk satu kesatuan ekosistem yang melahirkan watak mulia. *Moral Knowing* menyuguhkan cetak biru

wawasan perihal apa yang baik; *Moral feeling* menyalakan lentera kesadaran, kecintaan, serta komitmen batin pada kebajikan tersebut; sedangkan *Moral Action* mengonversi modal pengetahuan dan getaran emosi tersebut menjadi perbuatan konkret.

Korelasi timbal balik antara ketiga unsur pembentuk kepribadian luhur tersebut dapat diformulasikan melalui bagan berikut: *Moral Knowing* → *Moral feeling* → *Moral Action* → *Good Character*

Kendati demikian, relasi interaktif di atas tidak boleh dimaknai secara kaku sebagai sebuah tahapan linier satu arah. Ketiga pilar tersebut sejatinya bersifat dinamis dan saling memperkuat (*resiprokal*). Wawasan moral andal merajut perasaan moral, kepekaan perasaan moral berdaya memacu kemauan untuk bertindak, sedangkan pengalaman empiris saat mengeksekusi tindakan moral secara otomatis akan memperkaya kedalaman pemahaman serta ketajaman kesadaran moral *murid*.

Kerangka berpikir Lickona ini memiliki koherensi yang kuat dengan orientasi penguatan karakter di sekolah sebagai sebuah proses komprehensif yang mengikat ekosistem pendidikan secara makro. Internalisasi watak mustahil sukses jika melulu mengandalkan transfer materi searah dalam pembelajaran kelas, melainkan menuntut infiltrasi keteladanan figur guru, habituasi harian, penegakan regulasi dan disiplin sekolah, iklim interaksi sosial, wadah aktivitas kesiswaan, hingga kultur organisasi lembaga. Dalam karyanya *Character Matters*, Lickona menempatkan institusi keluarga, iklim kelas, ekosistem sekolah, dan komunitas sosial sebagai laboratorium alamiah yang vital dalam mengonstruksi kepribadian anak. Ia juga menggarisbawahi krusialnya mendesain sekolah yang

memiliki budaya karakter (*culture of character*) serta melibatkan murid secara aktif dalam dinamika sekolah yang menyuburkan prinsip penghormatan dan tanggung jawab (Lickona, 2004: 109–121, 217–247).

Dalam kaitannya dengan studi mengenai internalisasi klaster nilai karakter nasionalisme-religius, landasan teori Lickona menyuguhkan pisau analisis yang tajam untuk memahami bahwa peresapan nilai wajib memproduksi transformasi pada tiga wilayah sekaligus. Pada ranah pengetahuan, murid menguasai esensi nilai nasionalisme serta religius sekaligus andal merumuskan argumentasi logis-etis atas urgensi nilai tersebut. Pada ranah perasaan, murid memiliki getaran rasa cinta tanah air, kepekaan empati, kesadaran spiritualitas yang matang, apresiasi atas pluralisme, serta komitmen kuat pada kebajikan. Sementara pada ranah tindakan, murid mempertontonkan habituasi perilaku yang mencerminkan persatuan, toleransi, akuntabilitas, kedisiplinan, penghormatan pada keragaman, serta penolakan tegas terhadap segala bentuk kekerasan maupun paham radikal.

Oleh karena itu, formulasi teori Lickona ditempatkan sebagai pilar landasan teoretis utama dalam penelitian ini guna menguliti efektivitas internalisasi nilai nasionalisme-religius. Konstruksi teori ini menyuguhkan indikator yang valid untuk mendeteksi apakah klaster nilai yang disemaikan pihak sekolah baru sebatas menyentuh permukaan pengetahuan (*Moral Knowing*), telah meresap menjadi kesadaran dan komitmen personal (*Moral feeling*), ataukah telah mengakar kuat menjadi perilaku keseharian (*Moral Action*). Lewat perspektif ini, tingkat keberhasilan internalisasi nilai tidak lagi dikalkulasi berdasarkan kuantitas agenda atau program kerja yang digelar sekolah, melainkan bersandarkan pada seberapa dalam

program tersebut mampu mengubah kepribadian *murid*.

Teori Lickona ini juga memegang relevansi strategis sebagai instrumen preventif guna membendung penetrasi radikalisme di kalangan murid melalui penguatan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Menguatnya fenomena radikalisme di lingkungan institusi pendidikan kerap kali diidentifikasi bersumber dari rapuhnya kapasitas murid dalam menelaah nilai secara kritis, minimnya rasa empati terhadap kelompok luar (*out-group*), lemahnya kontrol regulasi diri, serta mencuatnya pola perilaku intoleran dan eksklusif. Atas dasar itulah, peresapan nilai nasionalisme-religius yang diakselerasi melalui dimensi *Moral Knowing*, *Moral feeling*, dan *Moral Action* dapat diposisikan sebagai pendekatan pedagogis preventif yang ideal. Murid dituntun untuk memiliki pemahaman keagamaan serta wawasan kebangsaan yang konstruktif-inklusif, memupuk kecintaan pada kemaslahatan bersama, serta membiasakan tindakan nyata yang mencerminkan spirit toleransi, integrasi persatuan, kedamaian, dan penghormatan atas pluralisme.

Dalam studi ini, teori pendidikan karakter dari Thomas Lickona tidak sekadar difungsikan untuk memaparkan konsep kepribadian secara makro-umum, melainkan dialokasikan secara spesifik untuk memetakan fase proses dan potret hasil internalisasi nilai nasionalisme-religius pada diri *murid*. Konstruksi teori tersebut pada tahap berikutnya dikolaborasikan secara apik dengan teori internalisasi nilai serta teori manajemen pendidikan demi membedah cara sekolah mendesain perencanaan, pengorganisasian, pengeksekusian, hingga pengawasan dan evaluasi terhadap jalannya proses internalisasi nilai nasionalisme-religius. Peleburan ketiga perspektif ini diproyeksikan mampu

menyuguhkan potret komprehensif mengenai tata kelola pendidikan karakter nasionalis dalam rangka memacu penguatan jiwa patriotik, sekaligus berperan sebagai benteng preventif terhadap bahaya radikalisasi murid pada jenjang sekolah menengah atas.

Kerangka berpikir Thomas Lickona ini juga memiliki korelasi linier dengan Delapan Dimensi Profil Lulusan (P8). Berdasarkan regulasi nasional mutakhir yang diatur dalam Permendikbudristek Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, dirumuskan delapan elemen kompetensi utuh yang wajib dikuasai secara komprehensif oleh murid di setiap akhir jenjang pendidikan, meliputi:

- 1). Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Murid dituntut memiliki keyakinan keagamaan yang teguh, andal menghayati nilai-nilai spiritualitas, serta senantiasa mengejawantahkan nilai tersebut dalam bentuk kesalehan individu maupun sosial.
- 2). Kewargaan: Memiliki rasa cinta tanah air, bangga akan identitas budaya, menaati hukum, serta menghargai keberagaman.
- 3). Penalaran Kritis: Berpikir logis, sistematis, mampu menganalisis informasi, dan memecahkan masalah.
- 4). Kreativitas: Menghasilkan gagasan baru, orisinal, serta mampu menciptakan solusi inovatif.
- 5). Kolaborasi: Mampu bekerja sama dalam tim yang beragam dan menghargai kontribusi orang lain.
- 6). Kemandirian: Menjadi pembelajar sepanjang hayat yang memiliki inisiatif dan mampu mengatur diri sendiri.
- 7). Kesehatan (diimensi baru): Memiliki kesadaran dan

mempraktikkan pola hidup bersih serta sehat secara fisik, mental, dan sosial.

- 8). Komunikasi (dimensi baru): Mampu menyampaikan gagasan secara jelas dan efektif baik lisan, tulisan, maupun media digital.

Teori pendidikan karakter yang dikembangkan oleh Thomas Lickona ini memandang bahwa pembentukan karakter tidak cukup hanya dengan memberikan pengetahuan mengenai nilai-nilai moral (*moral knowing*) dan menumbuhkan kesadaran atau perasaan terhadap nilai tersebut (*moral feeling*). Nilai yang telah diketahui dan dihayati perlu diwujudkan dalam perilaku nyata melalui moral action. Dengan demikian, *moral action* menunjukkan kemampuan seseorang untuk menerapkan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari melalui tindakan yang bertanggung jawab, konsisten, dan berorientasi pada kebaikan bersama (Lickona, 1991: 51–53).

Dalam konteks pendidikan karakter nasionalis di Indonesia, konsep moral action memiliki hubungan yang kuat dengan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Keempat unsur tersebut tidak semata-mata ditempatkan sebagai pengetahuan yang harus dipahami murid, tetapi perlu diterjemahkan menjadi sikap, kebiasaan, dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan karakter nasionalis dapat diarahkan dari penguasaan pengetahuan kebangsaan menuju penghayatan nilai dan akhirnya diwujudkan dalam tindakan konkret.

1) Keterkaitan *Moral Action* dengan Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara dan sumber nilai kehidupan berbangsa mengandung seperangkat prinsip moral yang perlu diwujudkan dalam perilaku murid. Setiap

sila dapat menjadi pedoman bagi murid dalam mengembangkan tindakan yang mencerminkan karakter nasionalis. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dapat diwujudkan melalui perilaku religius, toleransi, dan penghormatan terhadap pemeluk agama lain. Nilai kemanusiaan dapat diterapkan melalui sikap menghormati martabat manusia, membantu sesama, dan menunjukkan kepedulian sosial. Nilai persatuan dapat diwujudkan melalui kecintaan terhadap tanah air, menjaga kebersamaan, serta menghindari perilaku yang dapat menimbulkan perpecahan. Nilai kerakyatan dapat diterapkan melalui kebiasaan bermusyawarah, menghargai pendapat, dan menerima keputusan bersama. Sementara itu, nilai keadilan sosial dapat diwujudkan melalui sikap adil, gotong royong, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan sosial.

Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai sumber nilai yang memberikan arah terhadap perilaku, sedangkan *moral action* merupakan bentuk konkret dari proses aktualisasi nilai tersebut dalam kehidupan murid. Proses tersebut dapat digambarkan: Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara diketahui dan dipahami (*Moral Knowing*), berproses menjadi rasa (*Moral Feeling*), dan dilaksanakan (*Moral Action*) dalam kehidupan, sehingga menjadi karakter nasionalis, akan memperkuat jiwa patriotic.

2) Keterkaitan Moral Action dengan UUD NRI Tahun 1945.

UUD NRI Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman terhadap konstitusi dalam pendidikan karakter tidak berhenti pada kemampuan murid untuk mengetahui isi dan ketentuan konstitusional,

tetapi perlu berkembang menjadi kesadaran untuk menjalankan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab.

Dalam kehidupan sekolah, aktualisasi *moral action* yang berlandaskan nilai konstitusional dapat ditunjukkan secara aktif melalui kepatuhan terhadap peraturan dan agama, pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang, penghormatan terhadap hak orang lain, kedisiplinan, tanggung jawab, serta kesediaan menjaga ketertiban dan kehidupan bersama, sehingga pendidikan karakter nasionalis yang berorientasi pada *moral action* mengarahkan murid agar tidak hanya memahami norma dan aturan, tetapi juga memiliki kesadaran untuk melaksanakannya secara konsisten dalam kehidupan nyata. Adanya kepatuhan terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi akan melahirkan kesadaran konstitusional, sehingga memiliki kepatuhan dan tanggung jawab sebagai perwujudan *Moral Action*.

3) Keterkaitan *Moral Action* dengan Bhinneka Tunggal Ika.

Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan prinsip persatuan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman suku, agama, budaya, bahasa, dan latar belakang sosial. Dalam perspektif pendidikan karakter, keberagaman tersebut perlu dipahami sekaligus dihayati dan diwujudkan melalui perilaku yang menghargai perbedaan. Penerapan *moral action* dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika dapat terlihat melalui sikap toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, kesediaan bekerja sama dengan orang lain tanpa membedakan latar belakang, menghindari diskriminasi, serta membangun hubungan sosial yang harmonis. murid tidak hanya mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara yang beragam, tetapi juga

mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan penghargaan terhadap keberagaman tersebut.

Oleh karena itu, Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan nilai bagi pembentukan perilaku sosial murid, sedangkan *moral action* menjadi bentuk nyata dari penghargaan terhadap keberagaman dalam kehidupan sekolah dan masyarakat. Hal tersebut dapat dideskripsikan: Penghargaan dan penghormatan terhadap Bhinneka Tunggal Ika merupakan bukti adanya pemahaman keberagaman bangsa yang harus diikuti dengan penghayatan sehingga akan melahirkan sikap toleransi sebagai perwujudan *Moral Action* yang akan memerkokoh persatuan bangsa yang plural.

4) Keterkaitan *Moral Action* dengan NKRI

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan bentuk negara yang menempatkan persatuan dan keutuhan bangsa sebagai unsur penting dalam kehidupan bernegara. Dalam pendidikan karakter nasionalis, pemahaman mengenai NKRI perlu dikembangkan menjadi kesadaran dan perilaku yang menunjukkan kecintaan, kepedulian, tanggung jawab, serta komitmen terhadap bangsa dan negara. *Moral action* dalam konteks NKRI dapat diwujudkan melalui perilaku mencintai tanah air, menghormati simbol-simbol negara, menjaga persatuan, melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, menjaga lingkungan, serta mengutamakan kepentingan bersama. Dengan demikian, kecintaan terhadap bangsa tidak berhenti sebagai perasaan atau simbol, tetapi diwujudkan dalam tindakan yang memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekolah, masyarakat, dan bangsa.

Hubungan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut: Lahirnya NKRI sebagai hasil perjuangan bangsa akan menumbuhkan kesadaran kebangsaan, kepedulian dan tanggung jawab, serta tumbuhnya kesadaran untuk berpartisipasi sebagai perwujudan *moral action* yang mampu memperkuat jiwa patriotik.

5) Sintesis *Moral Action* dengan Nilai-Nilai Kebangsaan.

Berdasarkan uraian tersebut, teori Lickona dapat digunakan untuk menjelaskan proses transformasi nilai kebangsaan menjadi perilaku murid. Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI menyediakan sumber dan arah nilai, sedangkan konsep *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action* menjelaskan proses internalisasi nilai tersebut dalam diri murid.

Secara konseptual, hubungan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: Nilai-nilai kebangsaan terkristalisasi dalam dasar negara Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. *Moral knowing* berfungsi memahami nilai dan makna kebangsaan, *moral feeling* berfungsi menghayati, menghargai, dan memiliki kepedulian terhadap bangsa, *moral action* yang mewujudkan nilai kebangsaan dalam perilaku nyata, perilaku nasionalis sebagai pengejawantahan dari rasa cinta tanah air yang melahirkan persatuan, toleransi, disiplin, tanggung jawab, dan gotong royong, yang berfungsi dan berkontribusi sebagai penguatan jiwa patriotik.

Dalam penelitian ini, *moral action* menjadi bagian penting karena menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan karakter nasionalis tidak hanya dapat dilihat dari tingkat pengetahuan murid mengenai Pancasila dan

kebangsaan, tetapi terutama dari sejauh mana nilai tersebut diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Oleh karena itu, penguatan jiwa patriotik murid memerlukan proses pendidikan yang mampu menghubungkan pengetahuan kebangsaan dengan penghayatan nilai dan tindakan nyata.

Dengan perspektif tersebut, pendidikan karakter nasionalis dapat dipahami sebagai proses transformasi nilai kebangsaan menjadi kebiasaan dan perilaku. Pancasila memberikan orientasi nilai, UUD NRI Tahun 1945 memberikan landasan konstitusional, Bhinneka Tunggal Ika memberikan orientasi penghargaan terhadap keberagaman, sedangkan NKRI memberikan orientasi terhadap persatuan dan keutuhan bangsa. Keseluruhan nilai tersebut kemudian diinternalisasikan melalui proses *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action* sebagaimana dikemukakan Lickona.

Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini, jiwa patriotik bukan sekadar pengetahuan atau perasaan cinta terhadap bangsa dan negara, tetapi merupakan kecenderungan untuk mewujudkan nilai-nilai kebangsaan dalam tindakan nyata, bertanggung jawab, dan berkelanjutan dalam kehidupan murid (Lickona, 1991: 51–53).

b. Teori Karakter Menurut E. Mulyasa

E. Mulyasa menempatkan pendidikan karakter sebagai bagian integral dari proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan murid agar mampu menampilkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter tidak berhenti pada pemberian pengetahuan mengenai nilai dan moral, tetapi diarahkan agar nilai tersebut dipahami, diterima, dan diwujudkan dalam

tindakan nyata. Sikap menghargai orang lain, menjaga kebersihan, menaati aturan, membantu sesama, serta bertanggung jawab merupakan contoh perilaku yang dapat tumbuh melalui proses pendidikan karakter (Mulyasa, 2012:1).

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa karakter berkaitan erat dengan kebiasaan seseorang dalam berpikir, bersikap, dan bertindak berdasarkan nilai tertentu. Oleh karena itu, pendidikan karakter membutuhkan proses yang berkesinambungan agar nilai yang diperkenalkan melalui pendidikan tidak hanya berada pada tingkat pengetahuan, tetapi berkembang menjadi sikap dan kebiasaan yang tercermin dalam perilaku murid.

Menurut Mulyasa, pendidikan karakter diarahkan pada peningkatan mutu proses dan hasil pendidikan sehingga murid mampu berkembang sebagai pribadi yang memiliki karakter dan akhlak mulia secara utuh, terpadu, dan seimbang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan (Mulyasa, 2012:8). Perspektif tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan akademik murid, tetapi juga oleh perkembangan sikap, karakter, dan perilakunya.

1). Karakter sebagai Kesatuan Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku

Dalam pemikiran Mulyasa, pendidikan karakter harus menyentuh keseluruhan dimensi pribadi murid. Pengetahuan mengenai nilai yang baik perlu diikuti dengan tumbuhnya kesadaran untuk menerima dan menjalankan nilai tersebut dalam kehidupan. Dengan demikian, pendidikan karakter tidak cukup hanya menjelaskan mengenai perilaku yang baik, tetapi perlu menciptakan kondisi yang memungkinkan murid menghayati dan

mempraktikkannya.

Hal tersebut memiliki hubungan langsung dengan penelitian mengenai manajemen pendidikan karakter nasionalis. murid tidak cukup hanya mampu menjelaskan pengertian nasionalisme atau patriotisme, tetapi perlu memperlihatkan nilai tersebut dalam perilaku. Sikap disiplin, tanggung jawab, menjaga persatuan, menghormati perbedaan, peduli terhadap lingkungan, menghargai simbol negara, dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah merupakan bentuk perilaku yang dapat mencerminkan karakter nasionalis.

2). Pembiasaan sebagai Proses Pembentukan Karakter

Mulyasa memberikan perhatian penting terhadap pembiasaan sebagai salah satu cara membentuk karakter murid. Perilaku yang dilakukan secara terus-menerus dan konsisten dapat berkembang menjadi kebiasaan, sehingga nilai positif tidak hanya diketahui tetapi menjadi bagian dari pola kehidupan murid (Mulyasa, 2012:167). Pembiasaan dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan secara rutin di lingkungan sekolah. Dalam konteks pendidikan karakter nasionalis, pembiasaan dapat berupa pelaksanaan upacara, penghormatan terhadap simbol negara, menyanyikan lagu kebangsaan, menjaga ketertiban, melaksanakan gotong royong, memelihara kebersihan lingkungan, menghargai keberagaman, menaati tata tertib, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial.

Dalam penelitian ini, pembiasaan menjadi penting karena jiwa patriotik tidak terbentuk melalui satu kegiatan yang bersifat sesaat, tetapi melalui pengalaman dan perilaku yang dilakukan secara konsisten dalam

kehidupan sekolah.

3). Keteladanan sebagai Sarana Pendidikan Karakter

Selain pembiasaan, keteladanan merupakan unsur penting dalam proses pendidikan karakter. Murid memperoleh pengalaman pendidikan bukan hanya dari materi yang diberikan oleh guru, tetapi juga dari perilaku yang mereka amati dalam lingkungan sekolah. Kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan warga sekolah lainnya menjadi bagian dari lingkungan yang dapat memberikan contoh perilaku bagi murid. Keteladanan menjadi penting karena nilai karakter akan lebih mudah dipahami ketika murid melihat penerapannya secara konkret. Kedisiplinan, tanggung jawab, kejujuran, kepedulian, penghargaan terhadap perbedaan, serta kecintaan terhadap bangsa perlu ditampilkan terlebih dahulu oleh orang dewasa di lingkungan sekolah.

Dalam konstruksi penelitian, Mulyasa digunakan untuk menjelaskan pentingnya keteladanan dalam pendidikan karakter, sedangkan Bandura memberikan penjelasan mengenai mekanisme belajar murid melalui pengamatan dan pemodelan perilaku.

4). Lingkungan Sekolah sebagai Pendukung Pembentukan Karakter

Pembentukan karakter membutuhkan lingkungan pendidikan yang mendukung. Menurut perspektif Mulyasa, nilai-nilai karakter yang diberikan dalam pembelajaran perlu diperkuat melalui kondisi lingkungan sekolah yang sesuai dengan nilai tersebut.

Dengan demikian, sekolah perlu membangun suasana yang memungkinkan murid memperoleh pengalaman positif secara konsisten. Lingkungan yang mendukung pendidikan karakter dapat diwujudkan melalui tata tertib, budaya sekolah, hubungan yang harmonis antara guru dan murid, suasana pembelajaran yang positif, kegiatan pembiasaan, keteladanan warga sekolah, serta berbagai aktivitas yang mendorong perilaku positif.

Dalam penelitian ini, lingkungan sekolah mempunyai posisi penting karena karakter nasionalis tidak hanya dibentuk melalui materi pembelajaran. Nilai nasionalisme perlu hadir dalam budaya dan kehidupan sehari-hari sekolah sehingga murid memperoleh kesempatan untuk mengalami, menghayati, dan mempraktikkan nilai kebangsaan secara langsung.

5). Integrasi Pendidikan Karakter dalam Kehidupan Sekolah

Pendidikan karakter menurut perspektif Mulyasa perlu ditempatkan sebagai bagian dari keseluruhan proses pendidikan. Artinya, pendidikan karakter tidak harus diperlakukan sebagai kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran, pembiasaan, budaya sekolah, kegiatan murid, dan interaksi seluruh warga sekolah.

Dalam penelitian ini, prinsip integrasi tersebut dapat diwujudkan melalui pembelajaran, pembiasaan, keteladanan, budaya sekolah, dan kegiatan sekolah. Pembelajaran berfungsi memberikan pemahaman mengenai nilai kebangsaan. Pembiasaan membantu murid mengulang perilaku positif secara konsisten. Keteladanan menghadirkan contoh konkret. Budaya sekolah

menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan nilai, sedangkan kegiatan sekolah memberikan pengalaman langsung kepada murid untuk mempraktikkan nilai tersebut. Dengan demikian, pendidikan karakter berlangsung dalam suatu ekosistem sekolah, bukan hanya dalam kegiatan pembelajaran di kelas.

6). Pendidikan Karakter dalam Perspektif Manajemen

Pemikiran Mulyasa juga relevan dengan pendekatan manajemen pendidikan karena pendidikan karakter perlu dirancang dan dilaksanakan secara sistematis. Karakter tidak cukup dibangun berdasarkan inisiatif individual guru, tetapi membutuhkan kebijakan, program, pembagian peran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang terintegrasi dalam pengelolaan sekolah.

7). Relevansi Teori Mulyasa dengan Karakter Nasionalis

Berdasarkan pemikiran tersebut, karakter nasionalis dalam penelitian ini dipahami sebagai nilai yang tidak berhenti pada penguasaan pengetahuan mengenai bangsa dan negara, tetapi berkembang melalui proses pemahaman, penghayatan, pembiasaan, dan perwujudan dalam perilaku. Pengembangan karakter nasionalis dapat dilakukan melalui beberapa komponen yang saling berkaitan, yaitu:

1. Pembelajaran, sebagai sarana membangun pengetahuan dan pemahaman mengenai nilai kebangsaan;
2. Pembiasaan, sebagai proses penguatan perilaku nasionalis melalui kegiatan yang dilakukan secara berulang dan konsisten;

3. Keteladanan, sebagai pemberian contoh keteladanan konkret dari nilai yang hendak dibentuk;
4. Budaya sekolah, sebagai lingkungan yang memperkuat konsistensi penerapan nilai;
5. Kegiatan sekolah, sebagai wahana pengalaman langsung dalam mengaktualisasikan nilai kebangsaan; dan
6. Evaluasi, sebagai proses untuk mengetahui perkembangan karakter murid dan menjadi dasar perbaikan program.

Dengan demikian, teori Mulyasa memberikan dasar pemikiran bahwa karakter nasionalis perlu dibangun melalui ekosistem pendidikan yang terintegrasi, konsisten, dan berkelanjutan.

8). Sintesis Teori Karakter Menurut E. Mulyasa

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, teori karakter menurut E. Mulyasa dapat disintesis melalui empat gagasan utama, yaitu integrasi pendidikan karakter, pembiasaan, keteladanan, dan lingkungan pendidikan yang kondusif. Keempat unsur tersebut menjadi mekanisme penting untuk mengubah nilai yang dipahami murid menjadi perilaku yang dilakukan secara konsisten.

Dalam penelitian Manajemen Pendidikan Karakter Nasionalis dalam Penguatan Jiwa Patriotik ini, teori Mulyasa digunakan untuk menjelaskan bahwa penguatan jiwa patriotik murid membutuhkan proses pendidikan yang terintegrasi, konsisten, kontekstual, dan berkelanjutan. Nilai nasionalisme perlu dihadirkan bukan hanya melalui pembelajaran, tetapi juga melalui kebiasaan, keteladanan, budaya, dan berbagai kegiatan sekolah sehingga secara bertahap menjadi bagian dari perilaku murid.

Posisi teori Mulyasa dalam konstruksi teori penelitian ini dapat dirumuskan sebagai Mulyasa, integrasi, pendidikan karakter, pembiasaan dan keteladanan, serta lingkungan yang kondusif membentuk perilaku karakter sehingga terjadi penguatan jiwa patriotik.

c. Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura

1) Konsep Dasar Teori Pembelajaran Sosial

Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*) dikembangkan oleh Albert Bandura untuk menjelaskan bahwa perilaku manusia tidak hanya terbentuk melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui proses belajar dengan cara mengamati perilaku orang lain dan konsekuensi yang menyertainya. Dengan demikian, proses belajar berlangsung dalam konteks sosial dan melibatkan interaksi antara individu dengan lingkungan. Bandura memandang bahwa individu bukan sekadar penerima stimulus secara pasif, melainkan memiliki kemampuan kognitif untuk memperhatikan, mengingat, menilai, dan kemudian menentukan apakah perilaku yang diamatinya akan ditiru atau tidak (Bandura, 1977:22–29).

Pandangan tersebut memberikan penekanan bahwa lingkungan sosial mempunyai peranan penting dalam pembentukan perilaku. Individu memperoleh pengalaman bukan hanya dari apa yang dialaminya secara langsung, tetapi juga dari pengalaman orang lain yang diamatinya. Oleh karena itu, perilaku guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, teman sebaya, orang tua, maupun tokoh yang berada di lingkungan sekolah dapat menjadi sumber belajar bagi murid.

Dalam konteks pendidikan karakter, teori Bandura menjadi penting karena karakter tidak cukup

hanya disampaikan melalui pengetahuan atau nasihat. Nilai karakter perlu ditampilkan dalam perilaku nyata sehingga murid memperoleh kesempatan untuk mengamati, memahami, dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari.

2) Pembelajaran melalui Observasi (*Observational Learning*)

Konsep utama dalam teori Bandura adalah pembelajaran melalui observasi (*observational learning*). Menurut Bandura, seseorang dapat mempelajari suatu perilaku dengan memperhatikan perilaku orang lain sebagai model. Proses tersebut memungkinkan seseorang memperoleh pola perilaku tanpa harus mengalami sendiri seluruh konsekuensi dari perilaku tersebut (Bandura, 1977:47–48).

Bandura kemudian mengembangkan konsep pembelajaran observasional secara lebih sistematis dalam *Social Foundations of Thought and Action*. Pembelajaran observasional merupakan bagian penting dari teori sosial-kognitif dan menjelaskan bagaimana individu memperoleh pola perilaku melalui pengamatan terhadap model yang berada di lingkungan sosialnya (Bandura, 1986:47–49). Sumber Bandura juga mencatat bahwa pembahasan khusus mengenai *observational learning* berada pada bagian tersendiri dalam karya tersebut.

Dalam lingkungan sekolah, murid secara terus-menerus berhadapan dengan berbagai model perilaku. Guru yang menunjukkan kedisiplinan, tanggung jawab, kepedulian, penghormatan terhadap keberagaman, kecintaan terhadap bangsa, dan kepatuhan terhadap aturan sekolah memberikan contoh konkret yang dapat diamati murid. Demikian pula kepala sekolah yang menunjukkan

komitmen terhadap budaya sekolah dan kegiatan kebangsaan dapat menjadi model bagi warga sekolah.

Dengan demikian, keteladanan dalam pendidikan karakter bukan sekadar pelengkap kegiatan pembelajaran, tetapi merupakan mekanisme pembelajaran sosial yang memungkinkan nilai-nilai karakter diterjemahkan ke dalam perilaku yang dapat diamati.

3) Proses Pembelajaran Observasional

Bandura menjelaskan bahwa pembelajaran melalui pengamatan tidak berlangsung secara otomatis. Terdapat proses psikologis yang memungkinkan perilaku yang diamati dapat dipelajari dan kemudian diwujudkan dalam tindakan. Proses tersebut meliputi perhatian (*attention*), penyimpanan atau pengingatan (*retention*), reproduksi perilaku (*motor reproduction*), dan motivasi (*motivation*) (Bandura, 1977:23–29).

Pertama, perhatian (*attention*). murid harus memberikan perhatian terhadap perilaku model. Dalam pendidikan karakter, perhatian dapat muncul ketika guru atau warga sekolah menunjukkan perilaku yang konsisten, jelas, dan memiliki makna bagi murid.

Kedua, penyimpanan (*retention*). Perilaku yang diamati perlu disimpan dalam ingatan sehingga murid dapat mengingat kembali pola perilaku tersebut ketika menghadapi situasi yang relevan. Nilai kebangsaan yang diwujudkan secara berulang dalam kegiatan sekolah memungkinkan murid membentuk representasi perilaku yang dapat diingat dan digunakan kembali.

Ketiga, reproduksi perilaku (*reproduction*). murid perlu memiliki kemampuan untuk menerjemahkan apa yang diamatinya menjadi tindakan. Dalam konteks pendidikan

karakter, tahap ini tampak ketika murid mulai mempraktikkan kedisiplinan, tanggung jawab, gotong royong, kepedulian sosial, penghormatan terhadap keberagaman, dan perilaku cinta tanah air.

Keempat, motivasi (*motivation*). Perilaku yang telah diamati dan dipahami belum tentu diwujudkan apabila murid tidak memiliki dorongan untuk melakukannya. Penguatan, penghargaan, pengalaman positif, maupun konsekuensi terhadap perilaku dapat memengaruhi motivasi murid untuk mempertahankan perilaku tersebut (Bandura, 1977:23–29).

Keempat proses tersebut menunjukkan bahwa keteladanan perlu disertai dengan lingkungan yang memungkinkan murid mempraktikkan perilaku yang diamatinya. Dengan kata lain, keteladanan akan lebih efektif apabila diikuti kesempatan untuk melakukan, mendapatkan pengalaman, memperoleh umpan balik, dan mengulangi perilaku tersebut.

4) *Modeling* sebagai Mekanisme Pembentukan Perilaku.

Konsep *modeling* merupakan bagian penting dari teori Bandura. *Model* adalah pihak atau sumber perilaku yang diamati individu, sedangkan *modeling* merupakan proses ketika perilaku atau pola tindakan tersebut menjadi sumber pembelajaran bagi pengamat.

Dalam lingkungan pendidikan, guru memiliki posisi strategis sebagai model karena interaksi antara guru dan murid berlangsung secara terus-menerus. Namun, proses modeling tidak hanya berasal dari guru. Kepala sekolah, tenaga kependidikan, murid lain, orang tua, maupun lingkungan sosial dapat menjadi model perilaku. Oleh sebab itu, pembentukan karakter nasionalis

membutuhkan konsistensi antara nilai yang diajarkan dan perilaku yang ditampilkan oleh seluruh warga sekolah. Apabila sekolah mengajarkan disiplin tetapi warga sekolah tidak menunjukkan kedisiplinan, murid akan menerima pesan yang tidak konsisten. Sebaliknya, apabila nilai tersebut diwujudkan secara nyata oleh berbagai pihak, murid memperoleh pengalaman sosial yang memperkuat proses pembelajaran melalui pengamatan.

5) Penguatan dan *Vicarious Reinforcement*

Bandura juga menjelaskan pentingnya konsekuensi perilaku dalam pembelajaran sosial. Individu dapat belajar bukan hanya dari konsekuensi yang dialaminya sendiri, tetapi juga dari konsekuensi yang dialami oleh orang lain. Proses ini dikenal sebagai *vicarious reinforcement* atau penguatan melalui pengamatan terhadap konsekuensi perilaku model (Bandura, 1977:117–119).

Dalam pendidikan karakter, murid dapat melihat bahwa perilaku disiplin, bertanggung jawab, jujur, peduli, dan berprestasi memperoleh apresiasi, sedangkan perilaku yang melanggar norma memperoleh konsekuensi yang mendidik. Pengamatan terhadap konsekuensi tersebut dapat memengaruhi keputusan murid dalam memilih perilaku. Dengan demikian, penguatan dalam pendidikan karakter tidak harus selalu berbentuk penghargaan material. Pengakuan, apresiasi, kepercayaan, kesempatan berpartisipasi, maupun pengalaman keberhasilan dapat menjadi penguatan sosial yang membantu mempertahankan perilaku positif.

6) Hubungan Timbal Balik Individu, Perilaku, dan Lingkungan.

Dalam perkembangan pemikirannya, Bandura memperluas teori pembelajaran sosial menjadi teori sosial-kognitif. Salah satu konsep pentingnya adalah adanya hubungan timbal balik antara faktor personal/kognitif, perilaku, dan lingkungan. Ketiganya tidak berdiri sendiri, tetapi saling memengaruhi dalam membentuk tindakan manusia (Bandura, 1986:18–21).

Dalam penelitian ini, konsep tersebut dapat diterapkan sebagai berikut. Murid sebagai individu memiliki pengetahuan, persepsi, nilai, sikap, dan motivasi. Perilaku tampak dalam tindakan nyata seperti disiplin, tanggung jawab, gotong royong, kepedulian, penghormatan terhadap keberagaman, dan cinta tanah air. Sementara itu, lingkungan sekolah mencakup kebijakan, budaya sekolah, keteladanan guru, kegiatan sekolah, tata tertib, hubungan sosial, serta dukungan orang tua dan masyarakat. Ketiga unsur tersebut membentuk suatu hubungan yang dinamis. Lingkungan sekolah yang kondusif dapat mendorong munculnya perilaku positif. Perilaku positif yang dilakukan secara berulang dapat memperkuat keyakinan dan kebiasaan murid. Selanjutnya, murid yang telah memiliki karakter positif dapat ikut menciptakan lingkungan sosial yang semakin mendukung budaya karakter.

Secara konseptual, hubungan tersebut dapat diilustrasikan sebagai saling memengaruhi antara kognitif individu, perilaku, dan lingkungan. Dalam penelitian ini dapat dikembangkan menjadi murid yang berperilaku nasionalis akan memperkuat budaya sekolah.

7) Teori Bandura dalam Pendidikan Karakter Nasionalis

Teori Bandura memiliki relevansi yang kuat dengan pendidikan karakter nasionalis karena nilai-nilai

nasionalisme perlu diwujudkan melalui perilaku nyata. Nasionalisme tidak hanya berkaitan dengan pemahaman mengenai bangsa dan negara, tetapi juga bagaimana murid menampilkan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Penerapan teori Bandura dalam pendidikan karakter nasionalis dapat dilakukan melalui keteladanan, pembiasaan, pengalaman sosial, penguatan, dan budaya sekolah. Guru dan kepala sekolah menjadi model perilaku, sedangkan berbagai kegiatan sekolah menjadi ruang bagi murid untuk mengamati sekaligus mempraktikkan nilai-nilai nasionalis.

Seperti sikap menghormati simbol negara dapat diperkuat melalui pelaksanaan upacara secara tertib; kecintaan terhadap bangsa dapat dikembangkan melalui kegiatan kebangsaan; persatuan dapat dipraktikkan melalui kerja sama dan gotong royong; penghormatan terhadap keberagaman dapat dikembangkan melalui interaksi antarpeserta didik; sedangkan tanggung jawab dan disiplin dapat dibangun melalui tata tertib serta berbagai kegiatan sekolah.

Dengan demikian, pendidikan karakter nasionalis menurut perspektif Bandura tidak berhenti pada proses mengetahui nilai, tetapi bergerak menuju melihat contoh, mengingat, mempraktikkan, memperoleh penguatan, dan membentuk perilaku.

8) Teori Bandura dalam Penguatan Jiwa Patriotik

Dalam penelitian mengenai *Manajemen Pendidikan Karakter Nasionalis dalam Penguatan Jiwa Patriotik*, teori Bandura berfungsi untuk menjelaskan mekanisme pembentukan perilaku melalui lingkungan sosial sekolah. Jiwa patriotik tidak muncul hanya karena

murid mendapatkan materi mengenai nasionalisme. Jiwa patriotik perlu dikembangkan melalui pengalaman yang memungkinkan murid menyaksikan dan mempraktikkan perilaku yang mencerminkan kecintaan terhadap bangsa, tanggung jawab, disiplin, persatuan, kepedulian sosial, penghargaan terhadap keberagaman, dan kesediaan berkontribusi bagi lingkungan.

Oleh karena itu, keteladanan guru dan kepala sekolah, pembiasaan kegiatan kebangsaan, budaya sekolah, interaksi antarpeserta didik, kegiatan sosial, serta pemberian penguatan merupakan bagian penting dari proses pembentukan perilaku. Dalam perspektif Bandura, lingkungan sekolah dapat berfungsi sebagai lingkungan sosial yang menyediakan model, pengalaman, konsekuensi, dan kesempatan bagi murid untuk membangun perilaku positif.

Posisi teori Bandura dalam penelitian ini dengan demikian melengkapi teori Lickona. Lickona menjelaskan proses internalisasi karakter melalui moral knowing, moral feeling, dan moral action, sedangkan Bandura menjelaskan bagaimana perilaku tersebut dipelajari dan dibentuk melalui observasi, modeling, pengalaman sosial, dan penguatan. Sementara itu, teori Mulyasa memberikan penjelasan mengenai pentingnya pembiasaan, keteladanan, integrasi program, dan lingkungan sekolah dalam manajemen pendidikan karakter.

9) Sintesis Teori Bandura dalam Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut, teori Bandura dapat disintesis sebagai teori yang menjelaskan bahwa pembentukan perilaku murid berlangsung melalui interaksi antara faktor personal, perilaku, dan lingkungan sosial.

Proses tersebut diperkuat melalui pengamatan terhadap model, penyimpanan pengalaman, reproduksi perilaku, motivasi, serta konsekuensi atau penguatan terhadap perilaku.

Dalam penelitian ini, sintesis teori Bandura dapat dirumuskan sebagai berikut: lingkungan sekolah menciptakan keteladanan/*modeling*, kemudian observasi, retensi, terjadi reproduksi perilaku, kemudian ada penguatan dan terjadi pembiasaan perilaku nasionalis, sehingga memperkuat jiwa patriotik.

Sintesis tersebut menunjukkan bahwa keteladanan merupakan pintu masuk pembelajaran sosial, sedangkan pembiasaan dan penguatan membantu mempertahankan perilaku nasionalis. Dengan demikian, teori Bandura memberikan dasar teoritis bagi penelitian untuk melihat bagaimana karakter nasionalis tidak hanya diajarkan, tetapi juga dicontohkan, diamati, dipraktikkan, diperkuat, dan dibiasakan dalam kehidupan sekolah.

Dalam kerangka penelitian ini, teori Bandura ditempatkan sebagai salah satu *grand theory* pendukung yang menjelaskan mekanisme pembentukan perilaku karakter. Teori ini kemudian diintegrasikan dengan teori manajemen G.R. Terry, teori karakter Thomas Lickona, teori karakter E. Mulyasa, teori nasionalisme Ernest Gellner, dan sistem nilai Achmad Sanusi. Integrasi tersebut memberikan dasar konseptual untuk menjelaskan bagaimana manajemen pendidikan karakter nasionalis dapat diarahkan pada penguatan jiwa patriotik murid.

c. Teori Nasionalis, Nasionalisme, Patriotisme, dan Bela Negara

1) Teori/Konsep Nasionalisme

a) Teori/Konsep Nasionalisme Benedict Anderson

Nasionalisme memosisikan diri sebagai sebuah konsep multidimensional yang dikembangkan dari irisan pelbagai rumpun disiplin ilmu, seperti ilmu politik, sosiologi, sejarah, hingga filsafat pendidikan. Pada esensinya, nasionalisme merupakan jalinan rasa kepemilikan mendalam terhadap suatu bangsa yang mengejawantah ke dalam wujud kesadaran kolektif untuk memelihara identitas, khazanah budaya, serta kedaulatan negara.

Benedict Anderson (2006: 6-7) memperkuat postulat Renan tersebut dengan melahirkan gagasan fenomenal mengenai *Imagined Communities*. Berdasarkan tesis Anderson, konsep nasionalisme bertitik tolak dari pemikiran bahwa bangsa (*nation*) memegang peranan sebagai sebuah komunitas politik yang dibayangkan (*imagined political community*), di mana segenap anggota masyarakat menginsafi adanya ikatan persaudaraan horizontal yang erat kendati di antara mereka tidak saling mengenal secara tatap muka.

(1) Bangsa sebagai Komunitas yang Dibayangkan

"nation an imagined political community—and imagined as both inherently limited and sovereign" (bangsa memegang peranan selaku sebuah komunitas politik yang dibayangkan, dan dikonseptualisasikan sebagai komunitas yang pada hakikatnya bersifat terbatas sekaligus berdaulat).

Terminologi "dibayangkan" di sini sama sekali tidak mengindikasikan bahwa negara tersebut bersifat khayalan fiktif atau tidak nyata. Maksud

dasarnya ialah fakta bahwa mayoritas anggota dari suatu bangsa tidak akan pernah berkesempatan untuk mengenal, melihat, atau bertatap muka secara langsung dengan sebagian besar anggota bangsa lainnya. Kendati demikian, di dalam benak mereka tertanam kesadaran psikologis bahwa mereka merupakan bagian dari entitas komunitas yang sama. Sebagai ilustrasi, seorang warga yang berdomisili di Kabupaten Cilacap dapat merasakan ikatan batin sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang utuh, meskipun ia tidak mengenal secara personal warga lain yang menetap di Aceh, Papua, Kalimantan, ataupun Maluku. Mereka konsisten merasa mengemban identitas kebangsaan yang setara.

(2) Karakter Utama Nasionalisme

Konsepsi nasionalisme yang ditawarkan oleh Anderson diidentifikasi melalui empat karakteristik pokok, meliputi:

- a) *Imagined* (dibayangkan): Para anggota bangsa mengonstruksi kesadaran batin bahwa mereka berada dalam satu payung komunitas yang sama, meskipun terpisah jarak dan tidak saling mengenal secara personal.
- b) *Limited* (terbatas): Setiap bangsa dipastikan memiliki batas-batas teritorial wilayah serta karakteristik identitas tertentu. Indonesia, sebagai contoh, memiliki batas geografis-yuridis serta keunikan jati diri kebangsaan yang membedakannya secara tegas dari entitas negara lain.

- c) *Sovereign* (berdaulat): Bangsa dipandang sebagai sebuah komunitas mandiri yang mengemban hak absolut untuk mengendalikan arah kehidupan politiknya sendiri. Konsep kedaulatan ini berkelindan erat dengan kemunculan sistem negara-bangsa (*nation-state*) modern.
- d) *Community* (komunitas): Kendati di dalam internal masyarakat dijumpai pelbagai stratifikasi sosial, disparitas ekonomi, perbedaan agama, suku, maupun variasi kultur, para anggota bangsa konsisten membayangkan adanya rajutan persaudaraan horizontal selaku sesama warga negara.

Bagi Anderson, nasionalisme bukan sekadar manifestasi emosional yang sentimental terhadap tanah air, melainkan sebuah kesadaran kolektif yang matang mengenai eksistensi suatu komunitas bangsa yang diimajinasikan bersama. Atas dasar itu, nasionalisme andal menumbuhkan rasa: (a). Kepemilikan yang kuat terhadap bangsa; (b). Bagian integral dari entitas komunitas nasional; (c). Kepemilikan identitas kolektif yang selaras; (d). Solidaritas sosial yang kokoh sesama warga negara; (e). Komitmen menjaga kedaulatan nusa dan bangsa; serta (f). Kesiediaan memberikan kontribusi positif demi kemaslahatan negara.

Sementara itu, Anthony D. Smith menguraikan bahwa nasionalisme bertindak sebagai sebuah gerakan ideologis yang bertujuan untuk merebut, merawat, dan mempertahankan identitas,

integrasi persatuan, serta otonomi dari suatu bangsa (Smith, 1991: 73). Merujuk pada pandangan Smith, di dalam nasionalisme terkandung jalinan unsur kronologi sejarah, kekayaan kebudayaan, simbol-simbol luhur, tatanan nilai, serta memori kolektif yang diestafetkan dari generasi ke generasi.

Liz Jackson (2020: 27-31) mempertegas hal tersebut dengan menyatakan bahwa nasionalisme memosisikan diri sebagai suatu cara pandang makro yang memengaruhi cara negara dalam menyusun sistem tata kelola pendidikan, muatan kurikulum, serta konstruksi identitas kewarganegaraan. lembaga pendidikan bertindak selaku instrumen utama dalam mentransmisikan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda demi melahirkan jati diri nasional yang tangguh.

Bersandarkan pada kompilasi argumen para ahli di atas, nasionalisme dapat diartikan sebagai sebuah kondisi pikiran (*state of mind*), di mana kesadaran kolektif untuk hidup berdampingan dalam satu wadah komunitas politik melahirkan komitmen loyalitas tertinggi dari individu yang wajib dipersembahkan kepada bangsa dan negaranya, yang pada tahap berikutnya mengkristal menjadi sebuah kesadaran politik formal. Nasionalisme merupakan wujud kesadaran dari sebuah komunitas politik kebangsaan yang dibayangkan (*imagined political community*), di mana elemen masyarakat menginsafi adanya jalinan tali persaudaraan horizontal kendati tidak saling mengenal secara langsung. Dengan demikian,

nasionalisme menjadi sebuah prinsip dasar kebangsaan yang memengaruhi kebijakan negara dalam mendesain arsitektur sistem pendidikan, struktur kurikulum, hingga cetak biru karakter kewarganegaraannya.

Hans Kohn (1944: 9) memaparkan bahwa nasionalisme pada dasarnya merupakan suatu kondisi mental atau pikiran (*state of mind*), di mana loyalitas tertinggi seorang individu dirasakan wajib dipersembahkan sepenuhnya bagi bangsa dan negara. Kondisi mental ini pada tahap berikutnya dikonstruksikan menjadi sebuah kesadaran politik formal yang secara historis membagi tipologi peradaban Barat dan Timur. Sementara itu, Ernest Renan mengonseptualisasikan bangsa sebagai wujud "kehendak untuk hidup bersama" (*a daily plebiscite*). Menurut sudut pandang Renan, entitas bangsa tidak dirajut oleh persamaan ras, kesamaan agama, ataupun keseragaman bahasa, melainkan oleh lahirnya kesadaran kolektif untuk berhimpun di bawah satu komunitas politik yang sama (Renan, 1882/1994: 17).

b) Teori/Konsep Nasionalisme Menurut Ernest Gellner

Ernest Gellner merupakan salah satu tokoh yang memberikan kontribusi penting dalam kajian nasionalisme modern. Dalam pemikirannya, nasionalisme tidak hanya dipahami sebagai rasa cinta terhadap bangsa, tetapi juga sebagai fenomena sosial dan politik yang berkaitan dengan hubungan antara budaya, masyarakat, dan negara. Nasionalisme berkembang dalam konteks masyarakat modern ketika terdapat kebutuhan untuk membangun keselarasan antara budaya yang

berkembang dalam masyarakat dengan struktur politik yang menaunginya (Gellner, 1983:1–7).

Menurut Gellner, perkembangan nasionalisme tidak dapat dipisahkan dari perubahan struktur masyarakat, khususnya perubahan dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Masyarakat modern membutuhkan kemampuan komunikasi, mobilitas, literasi, dan pendidikan yang lebih luas. Kondisi tersebut mendorong terbentuknya budaya yang dapat dipahami dan digunakan bersama oleh anggota masyarakat (Gellner, 1983:19–36).

Berdasarkan pandangan tersebut, nasionalisme dapat dipahami sebagai suatu proses sosial yang berkaitan dengan pembentukan kesatuan budaya, komunikasi, pendidikan, dan kesadaran identitas dalam suatu masyarakat politik. Salah satu pokok pemikiran Gellner adalah adanya hubungan yang erat antara negara dan budaya. Dalam masyarakat modern, negara membutuhkan sistem komunikasi dan budaya yang memungkinkan masyarakat yang luas dan beragam dapat berinteraksi secara efektif.

Nasionalisme dalam perspektif Gellner berkaitan dengan upaya membangun kesesuaian antara unit politik dan budaya. Dengan kata lain, nasionalisme mengandung prinsip bahwa kehidupan suatu masyarakat politik membutuhkan budaya bersama yang dapat menjadi dasar integrasi sosial (Gellner, 1983:53–62).

Pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa nasionalisme tidak semata-mata berkaitan dengan simbol negara ataupun perasaan emosional terhadap bangsa. Nasionalisme juga menyangkut proses terbentuknya kesadaran bersama, budaya bersama, pola komunikasi, dan identitas sebagai bagian dari suatu komunitas nasional.

Dalam konteks penelitian ini, pemikiran tersebut memberikan dasar untuk melihat sekolah sebagai salah satu ruang sosial yang memungkinkan murid membangun pengalaman dan kesadaran kebangsaan. Sekolah mempertemukan murid dengan latar belakang yang beragam dalam lingkungan yang memiliki nilai, aturan, tujuan, dan budaya bersama.

Ernest Gellner menjelaskan bahwa nasionalisme memperoleh arti penting dalam masyarakat modern karena karakter masyarakat modern berbeda dari masyarakat agraris. Masyarakat industri membutuhkan mobilitas, kemampuan komunikasi, literasi, dan proses pembelajaran yang memungkinkan individu berpartisipasi dalam kehidupan sosial yang kompleks (Gellner, 1983:19–36).

Dalam kondisi tersebut, pendidikan mempunyai kedudukan strategis karena melalui pendidikan individu memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Sistem pendidikan yang luas dan terorganisasi juga memungkinkan terbentuknya budaya bersama yang dapat dipahami oleh anggota masyarakat secara lebih luas (Gellner, 1983:34–38).

Dalam penelitian ini, hubungan antara perkembangan masyarakat modern, pendidikan, dan nasionalisme tersebut menjadi relevan karena pendidikan karakter nasionalis pada satuan pendidikan merupakan proses yang memungkinkan murid memperoleh pengetahuan, pengalaman, dan kebiasaan yang berkaitan dengan nilai kebangsaan. Dalam perspektif Gellner, pendidikan mempunyai peran penting dalam masyarakat modern karena sistem pendidikan memungkinkan individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, bahasa, serta budaya yang dapat digunakan secara lebih luas. Pendidikan

dengan demikian tidak hanya berfungsi untuk mengembangkan kemampuan individual, tetapi juga berperan dalam membangun kesamaan budaya yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat modern (Gellner, 1983:34–38).

Gagasan tersebut dapat digunakan untuk memahami kedudukan sekolah dalam pembentukan karakter nasionalis. Sekolah bukan hanya tempat murid memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga menjadi lingkungan tempat nilai dan budaya kebangsaan diperkenalkan serta dipraktikkan.

Pembelajaran, penggunaan bahasa Indonesia, pengenalan sejarah dan budaya nasional, penghormatan terhadap simbol negara, kegiatan bersama, serta pengalaman hidup dalam keberagaman merupakan bagian dari pengalaman pendidikan yang dapat membangun kesadaran murid sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Hubungan tersebut dapat digambarkan: pendidikan melaksanakan transmisi budaya, kemudian menumbuhkan kesadaran kebangsaan dan memperkuat identitas nasional. Ia menghubungkan nasionalisme dengan keberadaan budaya yang memungkinkan anggota masyarakat berkomunikasi dan berinteraksi sebagai bagian dari komunitas yang lebih luas. Dalam masyarakat modern, budaya bersama tidak hanya berkaitan dengan warisan tradisional, tetapi juga mencakup sistem nilai, pengetahuan, bahasa, dan pola komunikasi yang memungkinkan seseorang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat secara lebih luas (Gellner, 1983:34–38).

Dalam konteks penelitian ini, gagasan tersebut memberikan dasar bahwa karakter nasionalis murid dapat berkembang melalui pengalaman berada dalam lingkungan sekolah yang memiliki budaya dan nilai kebangsaan. Murid membangun kesadaran kebangsaannya melalui berbagai pengalaman, seperti berinteraksi dengan teman yang berbeda

latar belakang, mengikuti kegiatan sekolah secara bersama-sama, menghargai keberagaman, menaati tata tertib, mengenal simbol negara, serta berpartisipasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan kebangsaan. Dengan demikian, identitas nasional tidak hanya terbentuk melalui pengetahuan mengenai bangsa dan negara, tetapi juga melalui pengalaman sosial dan budaya dalam kehidupan bersama.

Pemikiran Gellner juga dapat digunakan untuk menjelaskan peran nasionalisme dalam membangun integrasi sosial. Masyarakat yang kompleks dan memiliki keragaman membutuhkan nilai dan budaya bersama agar individu dapat berinteraksi sebagai bagian dari suatu komunitas politik. Konteks tersebut sangat relevan bagi Indonesia yang memiliki keragaman suku, agama, bahasa, budaya, dan kondisi sosial. Pendidikan nasionalisme karena itu tidak diarahkan untuk menghilangkan perbedaan, tetapi untuk membangun kesadaran bahwa keragaman tersebut berada dalam satu kesatuan kehidupan kebangsaan.

Dalam konteks pendidikan karakter nasionalis, proses tersebut dapat diwujudkan melalui persatuan, sikap toleransi, adanya penghargaan terhadap keberagaman, sehingga membentuk solidaritas sosial, dan memperkuat identitas nasional atau kebangsaan. Hal tersebut memiliki keterkaitan dengan nilai Bhinneka Tunggal Ika, yang dalam penelitian ini ditempatkan sebagai salah satu substansi nilai kebangsaan.

Dalam perspektif Gellner dalam pendidikan karakter nasionalisme, bahwa nasionalisme dapat dipahami sebagai proses pembentukan kesadaran kebangsaan yang berlangsung melalui hubungan antara budaya, masyarakat, dan institusi sosial. Dalam bidang pendidikan, sekolah merupakan salah satu institusi yang dapat berperan dalam membangun proses tersebut secara

terencana. Pendidikan karakter nasionalis dalam penelitian ini tidak hanya diarahkan pada penguasaan pengetahuan mengenai nasionalisme, tetapi pada pembentukan kesadaran, identitas, sikap, dan perilaku yang mencerminkan nilai kebangsaan.

Berdasarkan hal tersebut, pengembangan karakter nasionalis dapat dilakukan melalui:

1. Pembelajaran, untuk membangun pemahaman mengenai bangsa, negara, sejarah, budaya, dan nilai kebangsaan;
2. Pembiasaan, untuk memperkuat perilaku yang sesuai dengan nilai nasionalisme;
3. Keteladanan, untuk menghadirkan contoh konkret penerapan nilai kebangsaan;
4. Budaya sekolah, untuk membangun lingkungan yang mendukung kesadaran dan identitas kebangsaan;
5. Kegiatan bersama, untuk memberikan pengalaman sosial sebagai bagian dari komunitas sekolah; dan
6. Penghargaan terhadap keberagaman, untuk membangun persatuan dalam kehidupan bersama.

Dengan demikian, teori Gellner memberikan landasan untuk memahami bahwa sekolah merupakan ruang sosial dan pendidikan yang berpotensi membentuk budaya serta kesadaran kebangsaan murid.

Pada hakikatnya teori Gellner merupakan teori tentang nasionalisme dan tidak secara khusus dikembangkan sebagai teori mengenai patriotisme. Oleh karena itu, dalam penelitian ini teori Gellner ditempatkan sebagai landasan untuk menjelaskan pembentukan kesadaran kebangsaan, sedangkan jiwa patriotik dipahami sebagai hasil yang berkaitan dengan sikap dan perilaku murid terhadap bangsa dan negara. Dalam konstruksi penelitian, teori Gellner digunakan untuk menjelaskan bahwa pendidikan dapat membentuk budaya bersama dan kesadaran nasional.

Kesadaran tersebut selanjutnya diperkuat melalui pendidikan karakter sehingga berkembang menjadi sikap dan perilaku yang menunjukkan kepedulian, tanggung jawab, persatuan, dan kontribusi positif terhadap bangsa dan negara.

Hubungan konseptual teori Ernest Gellner dengan pembentukan jiwa patriotik dapat digambarkan sebagai berikut: budaya Bersama melahirkan kesadaran nasional, kemudian membentuk identitas kebangsaan, melahirkan karakter nasionalis, dan pada akhirnya memperkuat perilaku patriotik. Dengan konstruksi tersebut, teori Gellner memberikan dasar konseptual bagi penelitian untuk memahami hubungan antara pendidikan, budaya sekolah, karakter nasionalis, dan penguatan jiwa patriotik murid.

Berdasarkan uraian tersebut, pemikiran nasionalisme Ernest Gellner dalam penelitian ini dapat disintesis ke dalam beberapa pokok pemikiran.

Pertama, nasionalisme mempunyai hubungan erat dengan budaya dan negara.

Kedua, perkembangan nasionalisme berkaitan dengan karakteristik masyarakat modern.

Ketiga, masyarakat modern membutuhkan budaya bersama yang mendukung komunikasi dan integrasi sosial.

Keempat, pendidikan merupakan institusi penting dalam pembentukan dan penyebaran budaya bersama.

Kelima, budaya bersama dapat memperkuat kesadaran dan identitas kebangsaan.

Keenam, kesadaran kebangsaan tersebut dapat menjadi landasan dalam pembentukan karakter nasionalis murid.

Dalam penelitian Manajemen Pendidikan Karakter Nasionalis dalam Penguatan Jiwa Patriotik, teori Gellner digunakan terutama untuk menjelaskan dimensi nasionalisme,

khususnya hubungan antara pendidikan, budaya bersama, kesadaran kebangsaan, dan identitas nasional. Teori tersebut selanjutnya dipadukan dengan teori-teori lain yang membentuk konstruksi teoritis penelitian. G.R. Terry digunakan untuk menjelaskan pengelolaan pendidikan karakter melalui fungsi *Planning, Organizing, actuating*, dan *Controlling*. Thomas Lickona digunakan untuk menjelaskan proses internalisasi karakter melalui *moral knowing, moral feeling*, dan *moral action*. Albert Bandura menjelaskan pembentukan perilaku melalui pengamatan dan keteladanan. E. Mulyasa memberikan landasan mengenai integrasi pendidikan karakter, pembiasaan, keteladanan, dan lingkungan sekolah. Sementara itu, Achmad Sanusi memberikan perspektif mengenai sistem nilai sebagai landasan pembentukan karakter.

Posisi teori Gellner dalam konstruksi teoritis penelitian sebagai berikut: budaya bersama menumbuhkan kesadaran kebangsaan, membentuk identitas nasional, melahirkan karakter nasionalis, dan memperkuat jiwa patriotik. Teori Gellner dengan demikian memberikan dasar konseptual bahwa pendidikan karakter nasionalis tidak hanya berorientasi pada pembentukan perilaku individual murid, tetapi juga pada proses pembentukan kesadaran sebagai bagian dari komunitas kebangsaan melalui pengalaman pendidikan dan budaya yang berlangsung dalam kehidupan sekolah.

Dalam konteks tanah air, nasionalisme Indonesia mengemban karakteristik khas yang distingtif dan berbeda dengan model nasionalisme Barat. Nasionalisme Indonesia lahir dari rahim heroisme perjuangan melawan belenggu kolonialisme, serta dibangun di atas pilar persatuan di tengah realitas kemajemukan (*Bhinneka Tunggal Ika*). Oleh karena itu, nasionalisme Indonesia berdiri kokoh di atas landasan nilai-nilai

Pancasila, konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta komitmen persatuan bangsa. Menurut Kaelan, nasionalisme Indonesia pada hakikatnya merupakan tipe nasionalisme yang religius, humanis, demokratis, serta berkeadilan sosial sebagaimana telah tertuang dalam sila-sila Pancasila (Kaelan, 2014: 123).

Dalam ekosistem pendidikan nasional, nilai nasionalisme diposisikan sebagai salah satu pilar nilai utama oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui implementasi kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Manifestasi nilai nasionalis ini diwujudkan melalui pembiasaan perilaku mencintai tanah air, ikhtiar merawat persatuan, penghormatan atas pluralisme budaya, kepatuhan hukum, penegakan disiplin, kerelaan berkorban, serta kepedulian menjaga kelestarian ekosistem lingkungan.

Berlandaskan pada rangkaian konstruksi teori tersebut, maka terminologi nasionalisme dalam penelitian ini dipahami sebagai sebuah proses sistematis untuk mengonstruksi kesadaran batin murid agar mencintai negaranya, menjaga integrasi persatuan, menghormati realitas keberagaman, serta konsisten mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan dalam dinamika kehidupan harian sebagai bagian esensial dari pembentukan karakter.

Sedangkan istilah nasionalis merepresentasikan person atau individu yang mengemban komitmen, loyalitas, serta kesetiaan yang tinggi terhadap nusa, bangsa, dan negaranya. Seorang nasionalis sejati tidak sebatas menyukai tanah air atas dasar letupan emosional belaka, melainkan membuktikan kecintaan tersebut lewat tindakan nyata dalam wujud

pengabdian tulus, kepatuhan pada konstitusi hukum, penghormatan atas pluralisme, serta partisipasi aktif dalam dinamika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam konstelasi pendidikan karakter, sikap nasionalis diposisikan selaku kualitas watak yang wajib diakselerasi melalui serangkaian proses instruksional, habituasi harian, serta infiltrasi keteladanan figur. Karakter nasionalis bertindak sebagai fondasi vital dalam merawat jati diri bangsa di tengah gempuran arus globalisasi yang kian masif.

Merujuk pada kerangka berpikir Thomas Lickona, kepribadian yang ideal tersusun atas tiga dimensi penentu, yakni *Moral Knowing*, *Moral feeling*, dan *Moral Action*. Seorang individu layak diklasifikasikan memiliki watak nasionalis manakala ia menguasai pilar nilai kebangsaan, menyimpan kebanggaan emosional terhadap negaranya, serta cakap menerjemahkannya ke dalam perilaku riil sehari-hari (Lickona, 2013: 72).

Di sisi lain, Muhaimin menguraikan bahwa proses peresapan (*internalisasi*) nilai merupakan sebuah ikhtiar penyemaian prinsip luhur agar menyatu dengan kepribadian person lewat tiga tahapan sistematis, meliputi fase transformasi nilai, transaksi nilai, serta transinternalisasi nilai (Muhaimin, 2012: 151). Dalam koridor nasionalisme, murid tidak boleh sekadar mandek pada level menghafal definisi konseptual nasionalisme, melainkan wajib meresapi esensinya agar mampu mengimplementasikannya dalam kenyataan hidup.

Seorang nasionalis dapat disimpulkan sebagai individu yang memiliki jati diri kebangsaan yang kokoh, menaruh hormat pada simbol-simbol resmi negara, menjunjung tinggi integrasi persatuan, mengapresiasi kemajemukan, serta memiliki kesediaan berkorban demi kemaslahatan bangsa.

2) Teori Patriotik

Tata kelola manajemen pendidikan karakter nasionalis demi mengakselerasi murid jenjang SMA yang berjiwa patriotisme memosisikan diri sebagai model pendidikan yang wajib diinternalisasikan bagi segenap murid di Indonesia. Langkah ini krusial agar mereka senantiasa merawat rasa cinta terhadap tanah airnya. Hal tersebut koheren dengan argumen Suprpto dkk. (2007: 38) yang memaparkan bahwa patriotisme merepresentasikan semangat loyalitas rasa cinta tanah air atau orientasi sikap seseorang yang memiliki kesediaan untuk mengorbankan segala-galanya demi meraih kejayaan serta kemakmuran negaranya.

Terminologi patriotisme berakar dari kata patriot, yang mencirikan perorangan yang mencintai tanah tumpah darahnya serta bertekad bulat untuk berkorban demi kemaslahatan bangsa. Kendati dalam dinamika harian istilah ini kerap diidentikkan dengan nasionalisme, patriotisme sejatinya mengemban titik penekanan yang distingtif. Konsep nasionalisme lebih condong menitikberatkan amatan pada aspek jati diri dan kesadaran kolektif kebangsaan, sementara patriotisme lebih mengedepankan manifestasi perbuatan nyata selaku wujud cerminan rasa cinta terhadap negara.

Stephen Nathanson (1993: 34) mendefinisikan patriotisme sebagai wujud afeksi khusus terhadap tanah air yang diaktualisasikan dalam komitmen moral yang kuat untuk mengawal kemaslahatan bangsa, tanpa harus mengadopsi tendensi merendahkan entitas bangsa lain. Pandangan ini seirama dengan Maurizio Viroli (1995: 56) yang menjabarkan bahwa patriotisme merupakan bentuk kecintaan yang tulus terhadap pilar nilai-nilai republik, prinsip kebebasan, serta kemaslahatan publik, bukan semata-mata berupa bentuk

kebanggaan etnis atau ikatan rasial biner.

Dalam ruang lingkup ekosistem pendidikan di Indonesia, semangat patriotisme ditransformasikan ke dalam pelbagai pembiasaan perilaku, yang antara lain meliputi:

- a. Menanamkan rasa cinta yang mendalam terhadap tanah air;
- b. Konsisten memelihara tali persatuan bangsa;
- c. Menaruh hormat yang tinggi pada lambang-lambang resmi negara;
- d. Patuh dan taat pada supremasi hukum yang berlaku;
- e. Berpartisipasi aktif dalam menyokong agenda pembangunan nasional;
- f. Memiliki kerelaan berkorban demi kepentingan masyarakat luas;
- g. Kelapangan dada dalam mengapresiasi kemajemukan budaya; serta
- h. Proaktif dalam membendung dan menangkal penetrasi paham radikalisme dan intoleransi.

Nilai patriotisme mengemban korelasi yang sangat intim dengan ikhtiar preventif penanggulangan radikalisme. Individu yang dibekali ketangguhan jiwa patriotik diproyeksikan akan jauh lebih memprioritaskan integrasi persatuan bangsa di atas kepentingan kelompok primordial ataupun doktrin ideologi tertentu. akselerasi semangat patriotisme memosisikan diri sebagai salah satu strategi krusial dalam mengonstruksi benteng ketahanan ideologis murid dari paparan pengaruh paham radikal.

Supaya getaran jiwa patriotisme para murid tidak luntur diterpa zaman, maka sejak usia dini mutlak disemaikan benih-benih cinta tanah air. Langkah ini selaras dengan tesis Bakry (2010: 144-145) yang mengutarakan bahwa:

Patriotisme memosisikan diri sebagai ruh dan spirit kecintaan

pada tanah air yang menyempurnakan eksistensi nasionalisme. Di mana sekelompok manusia yang mendiami bumi Indonesia mengemban kewajiban moral untuk bersatu, mencintai negara dengan kesungguhan hati, serta memiliki kerelaan berkorban guna membela tanah air Indonesia selaku bangsa yang merdeka dan menjadi bagian integral dari doktrin kebangsaan dalam nasionalisme Indonesia.

Oleh karena itu, prinsip patriotisme yang tegak di bumi Indonesia mengamankan kewajiban untuk bersatu serta mencintai negara Indonesia secara utuh. Sikap yang berhulu dari kedalaman rasa cinta pada tanah air ini pada tahap berikutnya memicu kerelaan berkorban membela negara demi menggapai kejayaan dan kemakmuran bersama, yang bertindak selaku karakteristik utama dari jiwa patriotisme. Selaras dengan premis tersebut, Mangunhardjana (1985: 33) memetakan beberapa indikator yang mencirikan patriotisme sejati, yaitu:

- a. Mampu memantik kapasitas diri untuk mencintai bangsa dan negara sendiri, tanpa memosisikannya selaku target mutlak bagi kepentingan pribadinya, melainkan mengonversinya menjadi bentuk solidaritas sosial demi meraih kesejahteraan personal sekaligus kemaslahatan kolektif seluruh warga bangsa dan negara. Patriotisme sejati adalah wujud solidaritas yang diemban secara akuntabel atas seluruh elemen bangsa.
- b. Memiliki keberanian moral untuk memotret realitas diri sendiri secara objektif dengan segala kelebihan maupun celah kekurangannya, menakar unsur positif serta negatifnya, lalu menerimanya dengan kelapangan hati yang tulus.
- c. Senantiasa meneropong eksistensi bangsa dalam bingkai perspektif historis yang utuh, yang menghubungkan kronologi masa lampau, dinamika masa kini, hingga proyeksi masa depan. Patriotisme sejati bertumpu pada

modal kekuatan nilai serta kebudayaan rohani bangsa, seraya berjuang keras di masa sekarang demi menggapai cita-cita luhur yang telah dipatok.

- d. Mampu melihat, menerima, sekaligus memupuk watak serta kepribadian khas bangsa sendiri. Patriotisme sejati merupakan wujud dari kedalaman rasa kepemilikan atas identitas diri kebangsaan.
- e. Menatap eksistensi bangsanya dalam konstelasi dinamika kehidupan global, memiliki kesediaan untuk terlibat aktif di dalamnya, serta terbuka untuk memetik pelajaran berharga dari peradaban bangsa-bangsa lain di dunia.

Berdasarkan kompilasi paparan teori di atas, dapat ditarik sebuah benang merah kesimpulan bahwa nasionalis merepresentasikan karakteristik individu yang dibekali rasa cinta terhadap bangsa dan negaranya, sedangkan nasionalisme bertindak sebagai sistem nilai makro yang mengokohkan kesadaran kolektif demi merawat jati diri serta integrasi persatuan bangsa. Gerakan bela negara memosisikan diri sebagai bentuk perwujudan konkret dari ikhtiar mempertahankan kedaulatan negara oleh segenap warga bangsa, yang difungsikan selaku instrumen penguatan bagi murid SMA agar berjiwa patriotik. Sementara itu, patriotisme bertindak sebagai manifestasi riil dari nilai nasionalisme yang diterjemahkan ke dalam wujud tindakan pengabdian, akuntabilitas tanggung jawab, serta pengorbanan nyata demi kemaslahatan bangsa.

Dalam koridor penelitian ini, ketiga pilar konseptual tersebut dipandang sebagai satu kesatuan ekosistem yang saling mengisi satu sama lain. Aktivitas internalisasi kluster nilai karakter nasionalisme-religius diorientasikan secara khusus demi mencetak murid yang dibekali kesadaran kebangsaan yang kokoh (*nasionalisme*), kepribadian cinta tanah air (*nasionalis*),

serta pembiasaan perilaku riil yang mencerminkan dedikasi pengabdian kepada negara (*patriotisme*). Ketiga dimensi dinamis tersebut bertransformasi menjadi modal sosial serta benteng moral yang ampuh dalam mencegah eskalasi perkembangan paham radikalisme di lingkungan Sekolah Menengah Atas (SMA).

3) Bela Negara

Tata kelola manajemen pendidikan karakter nasionalis pada prinsipnya memosisikan diri sebagai model pendidikan yang berorientasi pada aspek kerakyatan serta kesemestaan. Pandangan ini sejalan dengan postulat Oetama (2004: 388) yang menegaskan bahwa:

Bela negara merepresentasikan kesadaran kolektif seputar hak serta kewajiban konstitusional warga negara. Nilai ini tidak sebatas ditekankan pada permukaan, melainkan wajib dibangun di atas pilar keyakinan akan kapasitas kekuatan mandiri, optimisme atas kemenangan, serta kepemilikan mentalitas pantang menyerah. Konsepsinya menempatkan keamanan negara dan gerakan bela negara agar senantiasa bersandar pada pilar kerakyatan, kesemestaan, serta kewilayahan.

Sementara itu, Baidowi (2016: 3) menyuguhkan eksplanasi konseptual bahwa:

Bela Negara merupakan ikhtiar pembelaan kedaulatan negara yang mewujudkan dalam bentuk kebulatan tekad, orientasi sikap, berkobarnya semangat, serta manifestasi tindakan dari seluruh elemen warga negara. Aktivitas ini dieksekusi secara terstruktur, komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan, yang dijiwai secara mendalam oleh rasa cinta tanah air terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tegak di atas falsafah Pancasila serta konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 demi menjamin keberlangsungan eksistensi nusa dan bangsa. Jika ditinjau dari ranah fisik, konsep ini diartikan sebagai bentuk pertahanan defensif dalam mengantisipasi gempuran fisik atau agresi militer dari

pihak luar yang mengancam kedaulatan negara. Sedangkan dalam koridor non-fisik, terminologi ini diterjemahkan sebagai partisipasi aktif untuk memajukan harkat bangsa dan negara, baik melalui saluran pendidikan, penguatan moralitas, dinamika sosial, hingga akselerasi kesejahteraan publik.

Gerakan bela negara diposisikan selaku bentuk perwujudan konkret dari prinsip nasionalisme serta cerminan sikap nasionalis. Aktivitas ini merupakan ikhtiar nyata untuk mempertahankan kedaulatan negara yang disandarkan pada kebulatan tekad, orientasi sikap, kobaran semangat, serta perbuatan riil dari segenap elemen warga negara secara teratur, menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Dinamika tersebut disemangati oleh rasa cinta yang mendalam terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bersumber pada nilai luhur Pancasila serta aturan hukum UUD 1945 guna menjamin kelangsungan hidup nusa, bangsa, dan negara.

2. Middle Theory

Middle theory dalam penelitian ini berfungsi sebagai teori atau kerangka konseptual yang menghubungkan *grand theory* dengan praktik manajemen pendidikan karakter nasionalis pada satuan pendidikan. Middle theory memberikan landasan yang lebih operasional untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai karakter, nasionalisme, dan patriotisme diterjemahkan ke dalam pengelolaan sekolah.

Dalam penelitian “Manajemen Pendidikan Karakter Nasionalis dalam Penguatan Jiwa Patriotik (Studi Kasus di SMAN 1 Cilacap dan SMAN 1 Jeruklegi)”, *middle theory* terdiri atas tiga kerangka utama, yaitu: (1) Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), (2) Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dan (3) kerangka nilai kebangsaan yang meliputi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

a. Model Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Kemendikbud.

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan kebijakan pendidikan yang menempatkan pendidikan karakter sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pendidikan. PPK diarahkan untuk memperkuat karakter murid melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga, dengan melibatkan satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan karakter tidak hanya dikembangkan melalui proses pembelajaran di kelas, tetapi juga melalui pembiasaan dan penguatan budaya sekolah.

Kebijakan PPK memiliki dasar regulasi, antara lain Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Peraturan tersebut menempatkan PPK sebagai gerakan pendidikan yang menjadi tanggung jawab satuan pendidikan dalam memperkuat karakter murid melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga. Pelaksanaannya dilakukan melalui pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Pada tingkat implementasi sekolah, PPK menekankan keterpaduan antara intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, yang diperkuat melalui budaya sekolah serta keterlibatan berbagai unsur masyarakat. Lima nilai utama PPK yang memiliki keterkaitan erat dengan penelitian ini adalah: (1). Religius; (2). Nasionalis; (3). Mandiri; (4). Gotong royong; (5). Integritas.

Nilai nasionalis secara khusus berkaitan dengan pola berpikir, sikap, dan perilaku yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, serta penghargaan terhadap bahasa, lingkungan fisik dan sosial, budaya, ekonomi, dan kehidupan bangsa. Nilai tersebut juga mengandung orientasi untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Model PPK memiliki relevansi langsung dengan penelitian ini karena fokus penelitian berkaitan dengan pendidikan karakter

nasionalis. Model PPK dapat digunakan sebagai kerangka untuk melihat bagaimana nilai nasionalisme diterjemahkan dan diwujudkan melalui berbagai komponen kehidupan sekolah, yaitu: (1). Kebijakan sekolah; (2). Pembelajaran; (3). Pembiasaan; (4). Keteladanan; (5). Budaya sekolah; (6). Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler (6). Karakter nasionalis *murid*. Dalam konteks penelitian di SMAN 1 Cilacap dan SMAN 1 Jeruklegi, Model PPK dapat digunakan untuk menganalisis sejauh mana pendidikan karakter nasionalis telah diintegrasikan ke dalam keseluruhan ekosistem pendidikan di masing-masing sekolah.

b. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan pendekatan pengelolaan pendidikan yang memberikan ruang otonomi kepada sekolah untuk mengambil keputusan dan mengelola sumber daya sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik sekolah dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Mulyasa menjelaskan bahwa MBS merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah dengan melibatkan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional (Mulyasa, 2011:24). Dengan demikian, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan dari tingkat atas, tetapi memiliki ruang untuk mengembangkan program berdasarkan kebutuhan, potensi, dan karakteristik lingkungan sekolah.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan pendekatan pengelolaan pendidikan yang memberikan kewenangan yang lebih luas kepada satuan pendidikan untuk mengelola sumber daya dan mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, serta kondisi sekolah. Penerapan MBS dalam pendidikan karakter nasionalis dapat diwujudkan melalui beberapa prinsip berikut:

- 1) Otonomi sekolah, yaitu sekolah memiliki ruang untuk mengembangkan program karakter sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik *murid*.
- 2) Partisipasi, yaitu melibatkan kepala sekolah, guru, *murid*, tenaga kependidikan, komite sekolah, orang tua, dan masyarakat.
- 3) Kemandirian, yaitu kemampuan sekolah mengelola sumber daya yang tersedia untuk mendukung program karakter.
- 4) Transparansi, yaitu keterbukaan dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
- 5) Akuntabilitas, yaitu adanya pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan dan hasil program.
- 6) Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, yaitu penggunaan hasil monitoring dan evaluasi sebagai dasar penyempurnaan program.

Dalam konteks pendidikan karakter nasionalis, MBS memiliki arti penting karena pembentukan karakter tidak dapat dilaksanakan dengan pola yang sepenuhnya seragam pada setiap sekolah. Setiap satuan pendidikan memiliki karakteristik *murid*, guru, lingkungan sosial, budaya masyarakat, sumber daya, sarana prasarana, serta persoalan yang berbeda.

Oleh sebab itu, sekolah perlu memiliki kemampuan untuk:

- 1) mengidentifikasi kebutuhan karakter murid ;
- 2) merancang program pendidikan karakter;
- 3) mengorganisasikan sumber daya sekolah;
- 4) melibatkan guru dan tenaga kependidikan;
- 5) melibatkan komite sekolah dan orang tua;
- 6) membangun kerja sama dengan masyarakat;
- 7) mengembangkan budaya sekolah;
- 8) melaksanakan monitoring dan evaluasi.

Dengan demikian, MBS memberikan ruang bagi satuan pendidikan untuk menerjemahkan kebijakan pendidikan karakter nasional menjadi program yang sesuai dengan karakteristik dan

konteks lokal sekolah. MBS memiliki relevansi dengan penelitian ini karena hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan karakteristik antara kedua lokus penelitian. SMAN 1 Cilacap dan SMAN 1 Jeruklegi memiliki kondisi sekolah, sumber daya, lingkungan sosial, sarana prasarana, serta karakteristik murid yang tidak sepenuhnya sama. Oleh karena itu, pengelolaan pendidikan karakter nasionalis perlu mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sekolah.

MBS dapat ditempatkan sebagai teori penghubung antara aspek manajemen dengan konteks sekolah, yang dapat digambarkan sebagai berikut: Kebijakan nasional dijabarkan dalam otonomi sekolah, dilakukan analisis kebutuhan sekolah, dibuat perencanaan program karakter dengan partisipasi warga sekolah, adanya pelaksanaan, dilakukan evaluasi, sehingga terjadi peningkatan mutu karakter *murid*. MBS sekaligus memperkuat prinsip partisipasi *stakeholder*, terutama kepala sekolah, guru, *murid*, komite sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan karakter.

c. Teori Empat Pilar Kebangsaan

Konsep Empat Pilar Kebangsaan digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan nilai kebangsaan yang menjadi orientasi dalam pengembangan pendidikan karakter nasionalis. Empat Pilar Kebangsaan terdiri atas:

- 1) Pancasila;
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- 4) Bhinneka Tunggal Ika.

Keempat unsur tersebut digunakan untuk menjelaskan dimensi nilai kebangsaan yang perlu dipahami, dihayati, dan

diwujudkan murid dalam kehidupan sekolah maupun kehidupan bermasyarakat.

1) Pancasila

Pancasila merupakan landasan filosofis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks pendidikan karakter nasionalis, nilai-nilai Pancasila dapat diwujudkan melalui berbagai sikap, antara lain: (1). religius; (2). menghargai kemanusiaan; (3). menjaga persatuan; (4). mengembangkan musyawarah; (5). menjunjung keadilan; (6). membangun gotong royong; dan (menghormati keberagaman). Dengan demikian, Pancasila memberikan dasar agar nasionalisme tidak hanya dimaknai sebagai kecintaan terhadap simbol-simbol negara, tetapi juga diwujudkan dalam nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, gotong royong, dan keadilan sosial.

2) UUD NRI Tahun 1945

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pendidikan karakter, nilai konstitusional tersebut dapat diwujudkan melalui kesadaran mengenai hak dan kewajiban, kepatuhan terhadap aturan, tanggung jawab sebagai warga negara, penghormatan terhadap hukum, serta kehidupan yang demokratis. Dalam lingkungan sekolah, nilai tersebut antara lain tercermin dalam kepatuhan murid terhadap tata tertib, pelaksanaan kewajiban, penghormatan terhadap hak orang lain, serta kesadaran menjalankan tanggung jawab sebagai bagian dari warga sekolah.

3) Negara Kesatuan Republik Indonesia

NKRI memberikan orientasi terhadap pentingnya persatuan, keutuhan wilayah, kesetiaan kepada negara, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Dalam pendidikan karakter nasionalis, nilai tersebut dapat diwujudkan melalui: (1). cinta

tanah air; (2). menjaga persatuan; (3). menghormati simbol negara; (4). mengikuti kegiatan kebangsaan; (5). menjaga lingkungan; (6). menghargai keberagaman daerah; dan (7). memiliki kepedulian terhadap kepentingan bersama. Nilai NKRI dalam hal ini tidak hanya berkaitan dengan pemahaman konseptual mengenai negara, tetapi juga dengan perilaku murid yang menunjukkan kepedulian terhadap persatuan, lingkungan, kehidupan bersama, dan kepentingan bangsa.

4) Bhinneka Tunggal Ika

Bhinneka Tunggal Ika memberikan landasan bagi pembentukan karakter murid agar mampu hidup dalam masyarakat yang beragam. murid perlu memahami bahwa perbedaan suku, agama, budaya, bahasa, daerah, maupun latar belakang sosial merupakan bagian dari realitas kehidupan bangsa Indonesia. Dalam lingkungan sekolah, nilai tersebut dapat diwujudkan melalui: (1). toleransi; (2). penghormatan terhadap perbedaan; (3). kerja sama; (4). gotong royong; (5). anti-diskriminasi; (6). persahabatan; dan (7). penyelesaian konflik secara damai.

Dengan demikian, Bhinneka Tunggal Ika memiliki hubungan yang erat dengan pembentukan jiwa patriotik yang inklusif, yaitu kecintaan terhadap bangsa yang dibangun melalui penghargaan terhadap keberagaman dan komitmen terhadap persatuan, bukan melalui penolakan terhadap kelompok yang berbeda.

d. Integrasi *Middle Theory*

Ketiga *middle theory* tersebut dapat ditempatkan dalam hubungan yang saling melengkapi, dengan pembagian fungsi sebagai berikut:

Tabel 1.2. Fokus dan Fungsi dalam *Middle Theory*

Middle Theory	Fokus	Fungsi dalam Penelitian
PPK Kemendikbud	Pendidikan karakter	Menjelaskan strategi dan ekosistem penguatan karakter
MBS	Pengelolaan sekolah	Menjelaskan konteks, otonomi, dan partisipasi sekolah dalam mengelola program
Empat Pilar Kebangsaan	Nilai kebangsaan	Menjelaskan substansi nilai karakter nasionalis

3. *Operasionalisasi Theory*

Operasionalisasi teori dalam penelitian ini dimaknai sebagai proses menerjemahkan konsep-konsep teoretis ke dalam bentuk strategi, kegiatan, pembiasaan, dan instrumen yang dapat diterapkan, diamati, serta dievaluasi dalam penyelenggaraan pendidikan karakter nasionalis di sekolah. Operasionalisasi diperlukan agar konsep-konsep yang bersifat abstrak, seperti karakter nasionalis, cinta tanah air, kesadaran kebangsaan, dan jiwa patriotik, dapat diidentifikasi melalui manifestasi perilaku murid dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam perspektif pendidikan karakter, pembentukan karakter tidak berhenti pada pemberian pengetahuan mengenai nilai, tetapi berlangsung melalui proses mengetahui nilai, menghayati atau merasakan nilai, dan mewujudkan nilai tersebut dalam tindakan. Lickona menjelaskan bahwa karakter yang baik mencakup tiga komponen utama, yaitu *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action*, yang secara terpadu membentuk perilaku moral seseorang (Lickona, 1991: 51–53). Sementara itu, Mulyasa menekankan pentingnya pembiasaan, keteladanan, penciptaan lingkungan yang kondusif, serta integrasi pendidikan karakter ke dalam keseluruhan proses pendidikan (Mulyasa, 2012: 3, 9).

Dalam penelitian ini, konsep tersebut dipadukan dengan Model Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). PPK menempatkan nilai nasionalis sebagai salah satu dari lima nilai utama karakter, selain religius,

mandiri, gotong royong, dan integritas. Nilai nasionalis antara lain diwujudkan melalui kecintaan terhadap tanah air, penghargaan terhadap budaya bangsa, kesediaan berkorban, kedisiplinan, ketaatan terhadap hukum, kepedulian terhadap lingkungan, serta penghargaan terhadap keragaman budaya, suku, dan agama (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017: 56).

Berdasarkan kerangka tersebut, teori dalam penelitian ini dioperasionalkan melalui empat bentuk utama, yaitu: (1). Teknik 5 Menit Kebangsaan sebelum KBM; (2). Teknik Jurnal Cinta Indonesia; (3). Teknik Sekolah Siaga Bela Negara; dan (4). Rubrik Penilaian Sikap Patriotik.

a. Teknik Lima Menit Kebangsaan sebelum KBM

Teknik Lima Menit Kebangsaan merupakan bentuk pembiasaan yang dilaksanakan sebelum kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan tujuan menumbuhkan dan memperkuat kesadaran kebangsaan murid secara singkat, rutin, dan berkelanjutan. Teknik ini berangkat dari prinsip bahwa pendidikan karakter harus berlangsung melalui pembiasaan yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Mulyasa menegaskan bahwa pendidikan karakter tidak cukup disampaikan melalui pembelajaran konsep moral, tetapi perlu diwujudkan melalui pembiasaan dan keteladanan agar nilai tersebut berkembang menjadi bagian dari perilaku murid (Mulyasa, 2012: 3). Dengan demikian, kegiatan singkat yang dilakukan secara konsisten sebelum pembelajaran dapat menjadi sarana pembentukan kebiasaan positif yang berkaitan dengan nilai kebangsaan.

Dalam kerangka Lickona, Teknik 5 Menit Kebangsaan dapat digunakan untuk menghubungkan *moral knowing* dengan *moral feeling* dan selanjutnya *moral action*. Murid memperoleh pengetahuan atau pesan kebangsaan, kemudian diarahkan untuk memahami dan menghayati maknanya, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari (Lickona, 1991: 51–53).

Secara operasional, kegiatan dapat berupa:

- 1) pengucapan atau penghayatan nilai-nilai Pancasila;
- 2) menyanyikan lagu kebangsaan atau lagu nasional;
- 3) penyampaian pesan kebangsaan;
- 4) refleksi singkat mengenai cinta tanah air;
- 5) penguatan disiplin dan tanggung jawab sebagai murid ;
- 6) pengenalan tokoh, sejarah, budaya, atau prestasi bangsa Indonesia; dan
- 7) penguatan kepedulian terhadap lingkungan sekolah dan masyarakat.

Teknik tersebut juga memiliki keterkaitan dengan nilai nasionalis dalam PPK yang mencakup kecintaan terhadap tanah air, penghargaan terhadap budaya bangsa, disiplin, ketaatan terhadap hukum, kepedulian terhadap lingkungan, dan penghargaan terhadap keberagaman (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017: 56).

Dengan demikian, pola operasional Teknik 5 Menit Kebangsaan dapat dirumuskan sebagai berikut: pesan kebangsaan sebagai pengetahuan berproses melalui penghayatan, dilaksanakan melalui pembiasaan, dilaksanakan dalam perilaku nasionalis, membentuk jiwa patriotik. Teknik tersebut menjadi bentuk konkret penerapan teori Lickona, Mulyasa, Bandura, dan PPK dalam proses pendidikan karakter nasionalis.

b. Teknik Jurnal Cinta Indonesia

Jurnal Cinta Indonesia merupakan teknik refleksi murid yang digunakan untuk menghubungkan pengetahuan kebangsaan dengan pengalaman, perasaan, sikap, dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Teknik ini dikembangkan berdasarkan pemikiran bahwa pendidikan karakter perlu memberikan ruang kepada murid untuk memahami, menghayati, merefleksikan, dan mempraktikkan nilai yang dipelajari. Lickona membagi karakter yang baik ke dalam tiga

komponen utama, yaitu *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action* (Lickona, 1991: 51–53). Oleh karena itu, jurnal dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana murid memahami nilai kebangsaan, bagaimana mereka menghayati nilai tersebut, serta tindakan apa yang telah mereka lakukan sebagai bentuk kecintaan terhadap Indonesia.

Jurnal tersebut dapat diarahkan melalui tiga pertanyaan pokok, yaitu :

- *Moral knowing*: Apa yang saya ketahui dan pahami tentang Indonesia, Pancasila, persatuan, keberagaman, dan cinta tanah air?
- *Moral feeling*: Apa yang saya rasakan sebagai bagian dari bangsa Indonesia?
- *Moral action*: Apa tindakan nyata yang telah saya lakukan untuk menunjukkan kecintaan kepada Indonesia?

Dengan demikian, Jurnal Cinta Indonesia tidak sekadar merupakan aktivitas menulis, tetapi berfungsi sebagai media refleksi karakter. Murid melalui kegiatan tersebut, diberi kesempatan untuk menghubungkan pengetahuan kebangsaan dengan pengalaman pribadi serta tindakan yang telah dilakukan. Materi refleksi dapat meliputi: (1). pengalaman menghargai perbedaan; (2). menjaga persatuan; (3). mengikuti upacara dengan tertib; (4). menggunakan bahasa Indonesia dengan baik; (5). menjaga lingkungan; (6). menghargai budaya Indonesia; (7). menggunakan produk dalam negeri; (8). membantu teman; (9). mengikuti kegiatan sosial; (10). menaati tata tertib sekolah; dan (11). melakukan kegiatan yang memberikan manfaat bagi sekolah dan masyarakat.

Dalam perspektif Bandura, proses refleksi tersebut dapat memperkuat pembelajaran sosial karena perilaku murid tidak hanya terbentuk melalui instruksi, tetapi juga melalui pengalaman, pengamatan, interaksi, dan lingkungan sosial (Bandura, 1977: 22–29). Jurnal Cinta Indonesia terutama merupakan bentuk operasionalisasi

teori Lickona, yang diperkuat oleh teori Bandura, Mulyasa, dan sistem nilai Sanusi.

c. Teknik Sekolah Siaga Bela Negara

Sekolah Siaga Bela Negara dalam penelitian ini ditempatkan sebagai bentuk operasionalisasi pendidikan karakter nasionalis melalui penciptaan ekosistem sekolah yang mendorong tumbuhnya kesadaran kebangsaan, disiplin, tanggung jawab, persatuan, kepedulian sosial, dan kesiapsiagaan *murid*. Istilah tersebut perlu dipahami sebagai konstruksi operasional program sekolah, bukan sebagai teori tersendiri. Landasannya berasal dari konsep bela negara, pendidikan karakter, PPK, teori pembelajaran sosial, serta nilai-nilai kebangsaan yang menjadi konteks penelitian.

Perpres Nomor 87 Tahun 2017 menegaskan bahwa Penguatan Pendidikan Karakter merupakan gerakan pendidikan yang berada di bawah tanggung jawab satuan pendidikan dan dilaksanakan melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan melibatkan satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat (Perpres RI No. 87 Tahun 2017, Pasal 1).

Dalam kerangka tersebut, Sekolah Siaga Bela Negara (SSBN) diarahkan agar nilai kebangsaan tidak hanya disampaikan melalui pembelajaran, tetapi juga diwujudkan dalam budaya dan ekosistem sekolah. Operasionalisasi SSBN dapat meliputi:

1. disiplin dan kepatuhan terhadap tata tertib;
2. penghormatan terhadap simbol negara;
3. pelaksanaan upacara dan kegiatan kebangsaan;
4. pembiasaan gotong royong;
5. kepedulian terhadap lingkungan sekolah;
6. penghargaan terhadap keberagaman;
7. kegiatan sosial kemasyarakatan;
8. keteladanan guru dan tenaga kependidikan;

9. kesiapsiagaan menghadapi persoalan lingkungan dan sosial; dan
10. kegiatan yang membangun rasa tanggung jawab sebagai warga negara.

Konsep tersebut sejalan dengan nilai nasionalis dalam PPK yang menekankan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan terhadap bahasa, lingkungan, kehidupan sosial, budaya, ekonomi, serta politik bangsa, sekaligus menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017: 56). Dari perspektif Bandura, lingkungan sekolah merupakan lingkungan belajar sosial. murid mengamati perilaku kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan teman sebaya, kemudian dapat belajar melalui proses observasi dan pemodelan perilaku (Bandura, 1977: 22–29).

d. Rubrik Penilaian Sikap Patriotik

Rubrik Penilaian Sikap Patriotik merupakan instrumen operasional yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengamati, dan mendokumentasikan manifestasi perilaku patriotik *murid*. Pengembangan rubrik didasarkan pada prinsip bahwa keberhasilan pendidikan karakter tidak hanya dapat dilihat dari penguasaan pengetahuan, tetapi juga dari perubahan sikap dan perilaku *murid*. Dalam kerangka PPK, penilaian karakter dilakukan secara berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan perilaku murid dan perubahan budaya sekolah (Hendarman dkk., 2017).

Dalam perspektif Lickona, penilaian sikap patriotik diarahkan untuk melihat sejauh mana *moral knowing* berkembang menjadi *moral feeling*, dan selanjutnya diwujudkan dalam *moral action* (Lickona, 1991: 51–53).

Rubrik dalam penelitian ini dapat mencakup indikator berikut:

Tabel 1.3. Indikator Rubrik Penelitian

Dimensi	Indikator Perilaku Patriotik
Cinta tanah air	Menghargai bangsa, budaya, bahasa, dan simbol negara
Persatuan	Menjaga kerukunan dan mengutamakan kepentingan bersama
Disiplin	Menaati tata tertib dan melaksanakan kewajiban
Tanggung jawab	Menyelesaikan tugas dan menjaga amanah
Gotong royong	Bekerja sama dan membantu sesama
Kepedulian sosial	Peduli terhadap teman, sekolah, dan masyarakat
Menghargai keberagaman	Menghormati perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat
Rela berkorban	Bersedia memberikan waktu, tenaga, atau perhatian bagi kepentingan bersama
Kesadaran bela negara	Menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara

Rubrik dapat menggunakan empat tingkat/skala capaian:

- 4 = Sangat Baik, yakni jika murid secara konsisten menunjukkan perilaku patriotik tanpa harus diingatkan.
- 3 = Baik, bahwa murid sering menunjukkan perilaku patriotik dan hanya sesekali membutuhkan arahan.
- 2 = Cukup, yakni murid kadang-kadang menunjukkan perilaku patriotik dan masih membutuhkan bimbingan.
- 1 = Perlu Bimbingan, yakni murid belum menunjukkan perilaku yang diharapkan dan memerlukan pembinaan lebih lanjut.

Rubrik tersebut dapat digunakan melalui observasi guru, penilaian diri, penilaian teman sebaya, jurnal refleksi, dan dokumentasi perilaku, sehingga penilaian tidak hanya didasarkan pada satu sumber data.

e. Integrasi Keempat Operasionalisasi Teori

Keempat teknik tersebut memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi dan membentuk suatu rangkaian operasional yang terintegrasi.

Operasionalisasi	Fungsi Utama	Teori yang Dioperasionalkan
5 Menit Kebangsaan	Membentuk pembiasaan dan kesadaran kebangsaan	Lickona, Mulyasa, Bandura, PPK
Jurnal Cinta Indonesia	Mengembangkan refleksi dan internalisasi nilai	Lickona, Bandura, Sanusi
Sekolah Siaga Bela Negara	Membentuk ekosistem dan budaya sekolah patriotik	PPK, Bandura, Mulyasa, Empat Pilar Kebangsaan
Rubrik Penilaian Sikap Patriotik	Mengukur manifestasi perilaku patriotik	Lickona, PPK, Sanusi

D. Landasan Kebijakan

Landasan kebijakan dalam penelitian ini merepresentasikan seperangkat regulasi perundang-undangan serta garis kebijakan pendidikan yang bertindak sebagai dasar normatif bagi operasionalisasi pendidikan karakter nasionalis dan akselerasi jiwa patriotik *murid*. Adanya payung kebijakan ini mutlak diperlukan guna menyuguhkan legitimasi yuridis terhadap penyelenggaraan pendidikan, sekaligus mempertegas posisi strategis penguatan karakter sebagai bagian inti dari linieritas proses pendidikan nasional. Dalam konteks studi mengenai manajemen pendidikan karakter nasionalis, regulasi pendidikan tidak sebatas dipahami sebagai aturan formal yang normatif-kaku, melainkan diposisikan sebagai kerangka kerja (*framework*) yang menuntun dan mengarahkan satuan pendidikan dalam mendesain perencanaan, menyusun pengorganisasian, mengeksekusi pelaksanaan, serta mengontrol evaluasi program pendidikan karakter.

1. Landasan Konstitusional (UUD NRI Tahun 1945)

Sistem pendidikan nasional dikukuhkan secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 31. Klausul tersebut menegaskan hak

konstitusional bagi setiap warga negara untuk mengakses pendidikan bermutu, sekaligus menetapkan kewajiban negara dalam menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang terpadu. Arah pendidikan nasional dirancang tidak melulu untuk melejitkan kecerdasan intelektual, melainkan diorientasikan pada rekonstruksi profil manusia yang beriman, bertakwa, serta berakhlak mulia.

Ketentuan pada ayat (3) pasal tersebut bertindak selaku fondasi dasar mengenai internalisasi nilai karakter bangsa dan negara dalam dunia pendidikan. Regulasi ini memiliki kaitan yang sangat intim dengan gerakan pendidikan karakter nasionalis; sebab pada hakikatnya, persekolahan merupakan instrumen strategis untuk mencetak warga negara yang memiliki jati diri kebangsaan, kepekaan akan akuntabilitas sosial, serta loyalitas tunggal terhadap keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembentukan kepribadian murid dengan demikian menjadi bagian yang tidak dapat diisolasi dari cita-cita luhur pendidikan nasional.

Pijakan konstitusional ini menyuguhkan legitimasi hukum yang kuat bahwa gerakan penguatan karakter nasionalis serta penumbuhan semangat patriotik memosisikan diri sebagai bagian dari tanggung jawab institusional pendidikan dalam melahirkan murid yang mengemban kesadaran kebangsaan yang matang.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memegang peranan selaku payung hukum utama (*lex specialis*) dalam roda penyelenggaraan pendidikan di tanah air. Regulasi ini mengikat tata aturan mengenai dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, prinsip-prinsip operasionalisasi pendidikan, pengembangan kurikulum, standarisasi pendidik dan tenaga kependidikan, tata kelola manajemen pendidikan, mekanisme evaluasi, hingga fungsi pengawasan mutu pendidikan.

Klausul Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 menggarisbawahi bahwa pendidikan nasional mengemban fungsi mengoptimalkan kapabilitas serta mengonstruksi watak sekaligus peradaban bangsa yang bermartabat. Di samping itu, pendidikan nasional ditargetkan untuk melejitkan potensi murid agar bertransformasi menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat walafiat, kaya ilmu wawasan, cakap, kreatif, mandiri, serta menjelma sebagai warga negara yang demokratis dan penuh rasa tanggung jawab.

Artikulasi hukum tersebut membuktikan bahwa pembentukan watak atau kepribadian merupakan satu kesatuan utuh yang melekat dalam visi utama pendidikan nasional. Oleh karena itu, gerakan pendidikan karakter nasionalis dalam penelitian ini sama sekali tidak diposisikan selaku agenda suplemen atau program tambahan yang berdiri sendiri, melainkan bertindak selaku bagian dari proses internal pendidikan demi melahirkan murid yang dibekali ketangguhan watak serta tanggung jawab kewargaan yang akuntabel.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 juga memiliki korelasi linier dengan perspektif manajemen pendidikan karena regulasi ini memuat aturan tata kelola kelembagaan pendidikan. Konsekuensinya, penguatan karakter dituntut untuk dikendalikan secara sistematis memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen pendidikan, yang bergerak runut mulai dari fase perencanaan, pengorganisasian, pengeksekusian, hingga tahap pengawasan dan evaluasi [1972: 4].

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter memosisikan diri selaku regulasi khusus yang secara spesifik menyuguhkan instrumen hukum bagi gerakan penguatan kepribadian *murid*. Perpres ini disahkan pada tanggal 6 September 2017 dan konsisten berada dalam status berkekuatan hukum

tetap serta berlaku aktif [2017: Pasal 1–3]. Agenda Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) diarahkan untuk mengokohkan kepribadian murid melalui proses harmonisasi terpadu antara olah hati (*etik*), olah rasa (*estetik*), olah pikir (*literasi*), serta olah raga (*kinestetik*) dengan menggalang sinergi kolektif antara satuan pendidikan, lingkungan domestik keluarga, serta elemen masyarakat luas. Kebijakan ini mengisyaratkan bahwa pembentukan watak merupakan sebuah konstelasi proses komprehensif yang menuntut keterlibatan lintas ekosistem pendidikan.

Salah satu pilar nilai utama yang diusung dalam regulasi PPK ini adalah nilai nasionalis. Karakter nasionalis berkaitan erat dengan pola pikir, orientasi sikap, dan corak perbuatan yang mempertontonkan komitmen loyalitas, kepedulian sosial, serta apresiasi yang tinggi terhadap bahasa persatuan, kelestarian lingkungan fisik, realitas sosial, khazanah kebudayaan, ketahanan ekonomi, serta dinamika politik bangsa. Nilai ini mewajibkan individu untuk konsisten menempatkan kemaslahatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan primordial [2017: Pasal 3].

Dalam koridor penelitian ini, nilai nasionalis tersebut bertransformasi menjadi dasar kebijakan yang sangat relevan untuk membedah strategi sekolah dalam mengelola pendidikan karakter guna memicu penguatan jiwa patriotik *murid*. semangat patriotisme dapat dibedah sebagai salah satu bentuk pengejawantahan dari karakter kebangsaan yang dikonstruksi secara bertahap melalui dinamika pendidikan, iklim pembelajaran, keteladanan figur, habituasi harian, serta akumulasi pengalaman empiris murid di sekolah.

4. Kebijakan Kurikulum dalam Penguatan Karakter Murid

Kurikulum memegang peranan sebagai instrumen taktis-strategis dalam mengimplementasikan penguatan karakter, mengingat posisinya selaku landasan utama bagi satuan pendidikan untuk

merumuskan visi tujuan, muatan isi, dinamika proses, serta variasi pengalaman belajar *murid*. Dalam perkembangan peta hukum tata negara mutakhir, regulasi Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah telah diperbarui secara resmi melalui Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 yang mulai berlaku aktif terhitung sejak tanggal 15 Juli 2025.

Sistem kurikulum yang berlaku ini memosisikan akselerasi watak sebagai salah satu pilar prinsip paling fundamental dalam arsitektur pendidikan. Merujuk pada koridor regulasi tersebut, penanaman karakter menjangkau rumpun kompetensi spiritual, moralitas, kematangan sosial, serta kecerdasan emosional *murid*. Proses internalisasi ini diakomodasi baik lewat pengalokasian durasi waktu khusus maupun diintegrasikan secara melekat ke dalam denyut nadi proses pembelajaran harian.

Garis kebijakan tersebut menyuguhkan relevansi langsung dengan fokus studi ini, sebab kepribadian nasionalis maupun ketangguhan jiwa patriotik pada dasarnya tidak harus diisolasi ke dalam satu rumpun bidang studi tertentu saja. Nilai-nilai kebangsaan tersebut sangat adaptif untuk disisipkan ke dalam muatan pelbagai mata pelajaran, agenda kegiatan sekolah, habituasi harian, program kokurikuler, wadah ekstrakurikuler, hingga bermuara menjadi ekosistem budaya satuan pendidikan.

Oleh karena itu, riset ini berkomitmen untuk menguliti cara pihak sekolah dalam menerjemahkan dan mengonversi kebijakan kurikulum makro tersebut ke dalam praktik manajemen pendidikan karakter mikro di lapangan. Serangkaian dokumen instruksional meliputi Capaian Pembelajaran (CP), Tujuan Pembelajaran (TP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), serta Modul Ajar atau berkas draf perencanaan pembelajaran lainnya yang diterapkan sekolah akan didayagunakan sebagai rujukan data empiris guna meneropong

bagaimana nilai karakter didesain dan dilebur dalam dinamika kelas.

Kendati demikian, keberadaan dokumen RPP/Modul Ajar, ATP, maupun kompilasi berkas kurikulum lainnya sama sekali tidak diposisikan selaku instrumen teori dalam riset ini. Rangkaian dokumen tersebut murni ditempatkan sebagai perangkat kebijakan-operasional institusi yang bertindak sebagai data konkret di lapangan demi memotret realitas implementasi penguatan karakter di sekolah.

5. Kedudukan ATP dan Modul Ajar dalam Implementasi Pendidikan Karakter

Dalam konstelasi kurikulum nasional yang berjalan, dokumen perencanaan pembelajaran menempati posisi krusial untuk mengonversi visi besar tujuan pendidikan serta garis kebijakan kurikulum menjadi agenda aktivitas belajar yang riil di kelas. Dokumen ATP bersama perangkat rancangan mengajar bertindak selaku bukti konkret mengenai bagaimana seorang guru mengorganisasikan target capaian, muatan materi, skenario aktivitas, hingga sistem asesmen pembelajaran. Dalam konteks penelitian ini, keberadaan berkas ATP serta Modul Ajar mengemban nilai strategis manakala dokumen tersebut secara faktual dioptimalkan oleh sekolah sebagai perangkat mengajar harian. Analisis mendalam terhadap berkas-berkas tersebut diarahkan bukan sekadar untuk memverifikasi aspek pemenuhan formalitas administratif semata, melainkan didedikasikan untuk melacak apakah klaster nilai nasionalisme dan akselerasi jiwa patriotik telah dirancang, diintegrasikan, dan diejawantahkan dalam jalannya proses pembelajaran kelas.

Sementara itu, instrumen SK dan KD tidak akan dipaksakan menjadi bagian dari objek berkas yang wajib dianalisis, apabila kedua lokus sekolah secara faktual telah mengadopsi struktur kurikulum baru yang tidak lagi memberdayakan nomenklatur lama tersebut. Pembahasan mengenai istilah SK dan KD akan tetap diakomodasi hanya jika indikator tersebut ditemukan dalam arsip dokumen historis

atau berkas pembelajaran lama yang menjadi bagian dari pengumpulan data penelitian di lapangan.

6. Pendidikan Karakter melalui Pembelajaran dan Budaya Sekolah

Garis kebijakan penguatan karakter pada esensinya memosisikan lembaga sekolah sebagai ekosistem strategis yang bertanggung jawab dalam mengonstruksi kepribadian *murid*. Atas dasar itu, implementasi penguatan watak tidak cukup jika hanya ditelaah dari lembaran naskah dokumen pembelajaran di atas kertas, melainkan harus diteropong secara riil lewat denyut nadi budaya dan dinamika kehidupan sekolah secara makro.

Sifat karakter nasionalis dapat diejawantahkan melalui pelbagai variasi aktivitas nyata di lapangan, yang antara lain mencakup upacara bendera secara khidmat, penghormatan atas simbol-simbol resmi negara, perayaan hari besar nasional, penegakan pembiasaan disiplin, heroisme gotong royong, kepekaan empati sosial, pelestarian ekosistem lingkungan, dinamika organisasi kesiswaan, ragam aktivitas ekstrakurikuler, serta pancaran keteladanan konkret dari figur kepala sekolah dan dewan guru.

Dalam perspektif manajemen pendidikan, keseluruhan rangkaian aktivitas makro tersebut wajib dikendalikan secara terencana [1972: 4]. Pimpinan sekolah memegang komando sentral untuk menetapkan regulasi dan program kerja, merajut simpul koordinasi, mendistribusikan spesifikasi tugas, mengalokasikan ketersediaan sumber daya, mengarahkan jalannya eksekusi lapangan, serta menegakkan fungsi monitoring dan evaluasi secara periodik.

Walhasil, tingkat keberhasilan penanaman watak nasionalis tidak sebatas ditentukan oleh kemahiran personal guru dalam mentransfer materi teori seputar kebangsaan di kelas, melainkan bertumpu pada kapabilitas manajemen sekolah dalam mendesain sebuah lingkungan pendidikan kondusif yang memfasilitasi murid untuk mengalami, mempraktikkan, dan membiasakan nilai-nilai luhur

tersebut secara langsung.

7. Relevansi Landasan Kebijakan dengan Penguatan Jiwa Patriotik

Regulasi sistem pendidikan nasional menyuguhkan fondasi hukum yang sangat kokoh bagi akselerasi karakter kebangsaan. Dalam koridor penelitian ini, penting untuk menegaskan dikotomi sekaligus keterpaduan antara konsep nasionalisme selaku pilar nilai karakter, dengan konsep patriotisme selaku bentuk orientasi sikap dan tindakan konkret terhadap nusa dan bangsa. Prinsip nasionalisme dapat diwujudkan lewat kedalaman rasa kepemilikan terhadap negara, apresiasi tinggi pada jati diri nasional, kepekaan terhadap kemaslahatan bangsa, penghormatan atas pluralisme, serta komitmen merawat persatuan. Sementara itu, getaran jiwa patriotik mengejawantah ke dalam bentuk keberanian moral, akuntabilitas tanggung jawab, kerelaan berkorban, keteguhan loyalitas, empati kepedulian, serta tekad bulat untuk memberikan sumbangsih positif bagi kepentingan negara.

Oleh karena itu, payung kebijakan pendidikan karakter nasionalis bertindak selaku landasan vital bagi akselerasi penguatan jiwa patriotik *murid*. Pihak sekolah dituntut andal mengonversi regulasi makro tersebut melalui formulasi program kerja dan aktivitas konkret yang menyuguhkan pengalaman empiris bagi murid untuk mendemonstrasikan ornamen sikap cinta tanah air, tanggung jawab sosial yang akuntabel, empati kepada sesama warga, penghormatan atas identitas resmi negara, serta kesediaan untuk berkontribusi nyata bagi tatanan kehidupan bermasyarakat.

8. Implikasi Kebijakan terhadap Manajemen Pendidikan Karakter Nasionalis

Bersandarkan pada ragam payung regulasi tersebut, gerakan pendidikan karakter nasionalis dalam studi ini dikonseptualisasikan sebagai sebuah proses terstruktur yang mutlak dikelola secara sistematis pada level sekolah. Khazanah kebijakan makro nasional bertindak memberikan kompas arah, sedangkan pihak sekolah

berkewajiban mengonversinya ke dalam bentuk regulasi internal serta program kerja mikro yang selaras dengan profil karakteristik satuan pendidikan masing-masing.

Implikasi nyata dari kebijakan tersebut terhadap roda pilar fungsi manajemen dapat diformulasikan ke dalam poin-poin berikut [1972: 4]:

a. Perencanaan (*Planning*)

Pihak lembaga merumuskan target sasaran, rancangan program, parameter indikator, skenario kegiatan, serta kebutuhan logistik sumber daya penguatan karakter nasionalis, sekaligus menyelaraskannya secara terpadu dengan visi, misi, muatan kurikulum, dan program kerja utama sekolah.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Sekolah mendistribusikan spesifikasi tugas serta wewenang tanggung jawab secara transparan di antara pimpinan kepala sekolah, jajaran wakil kepala sekolah, dewan guru, wali kelas, staf tenaga kependidikan, pengampu kegiatan ekstrakurikuler, pengurus organisasi kesiswaan, hingga pemangku kepentingan lain yang relevan.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Gerakan penguatan karakter nasionalis dieksekusi secara nyata melalui integrasi proses instruksional kelas, habituasi harian, pancaran keteladanan figur, iklim budaya sekolah, agenda kokurikuler serta ekstrakurikuler, hingga pelbagai ragam aktivitas kebangsaan maupun kepedulian sosial.

d. Pengawasan dan Evaluasi (*Controlling*)

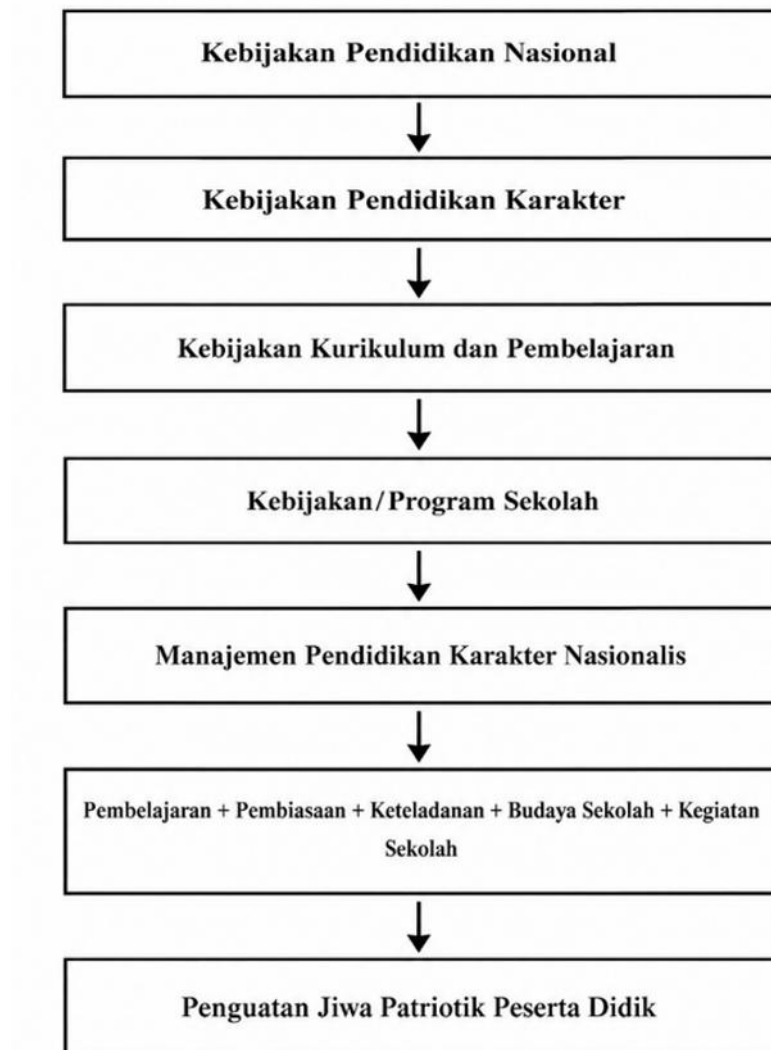
Lembaga pendidikan menegakkan fungsi monitoring berkala, penilaian autentik, ruang kontemplasi refleksi, serta evaluasi komprehensif terhadap tingkat keterlaksanaan program kerja sekaligus kurva perkembangan watak murid demi merumuskan langkah tindak lanjut (*follow-up*) perbaikan.

Rumpun landasan kebijakan dalam penelitian ini diposisikan sebagai pisau analisis fundamental untuk membedah sejauh mana regulasi pendidikan makro sukses ditransformasikan ke dalam praktik manajemen pendidikan karakter nasionalis yang riil di sekolah.

9. Sintesis Landasan Kebijakan

Merujuk pada keseluruhan pemaparan di atas, dapat ditarik sebuah sintesis konseptual bahwa kebijakan pendidikan nasional menyuguhkan landasan yuridis yang kokoh sekaligus kompas arah strategis bagi gerakan pembentukan kepribadian *murid*. Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 memberikan dasar legitimasi tertingginya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyuguhkan cetak biru kerangka sistem pendidikan nasional, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 menyajikan pilar penguatan khusus atas eksistensi gerakan karakter, sedangkan garis kebijakan kurikulum kontemporer memasok kerangka operasional bagi keterpaduan aksi-lerasi watak di dalam jantung proses pendidikan dan pembelajaran kelas.

Berdasarkan pemaparan tersebut, hubungan antara kebijakan dan fokus penelitian dapat dirumuskan secara konseptual sebagai berikut:



Bagan 2.2. hubungan kebijakan dan fokus penelitian

Kerangka tersebut menegaskan bahwa pendidikan karakter nasionalis merupakan proses manajerial yang membutuhkan keselarasan antara kebijakan nasional, kebijakan satuan pendidikan, perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi hasil. Pada akhirnya, proses tersebut diarahkan pada terbentuknya murid yang tidak hanya memahami nilai kebangsaan secara kognitif, tetapi juga memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan jiwa Patriotik dalam kehidupan sekolah, masyarakat, dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk lebih pemahaman dan memetakan orisinalitas (*novelty*) dari kajian ini, di sini disajikan beberapa telaah hasil penelitian dan publikasi ilmiah terdahulu. Telaah ini mencakup kompilasi penelitian baik yang bersumber dari naskah disertasi maupun artikel jurnal ilmiah bereputasi, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Shafira, F.N. et al. (2026). *Judul*: Pengaruh Peran Pendidik dalam Membentuk Karakter Murid pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Kelas III SD. *Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Volume 3, Nomor 1, Februari 2026, e-ISSN: 3046-5672; p-ISSN: 3046-613X, Hal. 110-121. Isi dan Temuan: Kajian ini menyimpulkan bahwa tenaga pendidik merupakan figur sentral dalam ekosistem pembentukan karakter nasionalis. Instrumen keteladanan, pola bimbingan, fasilitasi, pengondisian iklim kelas, serta skema evaluasi yang dijalankan guru berimplikasi langsung terhadap pembentukan kepribadian *murid*, termasuk penumbuhan rasa cinta tanah air. Hasil empiris studi membuktikan bahwa kontribusi guru sebagai demonstrator, pengelola kelas, fasilitator, dan evaluator membawa pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan watak *murid*. Karakteristik keteladanan pendidik muncul sebagai variabel yang paling dominan, sementara kepemilikan nilai cinta tanah air di kalangan murid secara umum dinilai masih relatif rendah. Oleh karena itu, direkomendasikan adanya akselerasi penguatan melalui habituasi harian serta rancangan taktik pembelajaran yang lebih kreatif. Hasil studi ini memperkuat urgensi andil pendidik serta tata kelola ekosistem pendidikan dalam mengonstruksi watak nasionalis selaku fondasi utama dari penguatan semangat patriotik, dengan menempatkan guru sebagai subjek amatan utama.
2. Susiana, D.R. et al. (2026). *Judul*: Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan bagi Anggota Pramuka Penggalang di SMP. *Jurnal Widyaloka IKIP Widya*

Darma, Vol. 13, No. 1, Januari 2026. Isi & Temuan: Peneliti dalam studi ini menemukan bahwa aktivitas kepanduan Pramuka bukan sebatas media pengisi waktu luang *murid*, melainkan bertindak selaku laboratorium karakter yang andal dalam menjawab tantangan disrupsi moral di era globalisasi lewat pendekatan progresif yang konsisten berakar pada nilai-nilai luhur kebangsaan. Internalisasi watak nasional kebangsaan ini diakomodasi melalui saluran ekstrakurikuler wajib Pendidikan Kepramukaan, yang dalam operasinya menuntut sinergi holistik dari multisektor pemangku kepentingan. Pihak Majelis Pembimbing Gugusdepan (Mabigus) di sekolah wajib menyuplai dukungan konkret berbentuk regulasi yang suportif serta penyediaan fasilitas prasarana yang memadai agar agenda latihan tidak terjebak sebagai pemenuhan formalitas administratif belaka. Di samping itu, Pembina Pramuka dituntut memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi dalam mengemas materi kepanduan agar senantiasa adaptif dengan karakteristik psikologis generasi Z, seraya konsisten memosisikan diri sebagai model teladan (*role model*) dalam perilaku keseharian. Dukungan serta keterlibatan aktif dari lingkungan domestik orang tua juga menjadi pilar krusial guna menjamin nilai-nilai luhur yang diperoleh dalam Pramuka dapat terinternalisasi dan dipraktikkan secara berkelanjutan di rumah.

3. Susilowati, E., Puguh, D.R., & Masruroh, N.N. (2014). *Judul: Penanaman Nilai-Nilai Nasionalisme pada Generasi Muda. Humanika*, Vol. 19, No. 1, (2014), ISSN: 1412-9418. Isi & Temuan: Hasil riset mengindikasikan bahwa penguatan jiwa nasionalisme tidak hanya menjadi domain tanggung jawab institusi persekolahan. Komunitas masyarakat Natuna, yang bertindak selaku garda terdepan wilayah kedaulatan Indonesia, secara faktual konsisten merawat dan mengamalkan nilai-nilai luhur warisan leluhur serta memegang teguh ragam kearifan lokal dalam tatanan hidup harian mereka. Kultur Melayu yang kental dengan muatan nilai kebersamaan, heroisme gotong royong,

dan tradisi saling menolong terbukti bertransformasi menjadi "benteng" ideologis yang kokoh bagi nasionalisme mereka, sehingga loyalitas kebangsaan masyarakat Natuna tidak perlu disangsikan lagi. Kendati terdapat persepsi pengabaian oleh pemerintah pusat terhadap kemaslahatan serta pemenuhan kesejahteraan masyarakat di ujung utara Indonesia tersebut—ditambah dengan pelbagai kemudahan akses yang ditawarkan oleh negara tetangga yang dekat secara geografis—kondisi empiris tersebut nyatanya tidak menggoyahkan tekad mereka untuk tetap setia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

4. Cahyono, F. & Audhy, P. (2025). *Judul: Manajemen Perubahan Organisasi TNI dalam Menyesuaikan Tantangan Kewarganegaraan di Era Globalisasi. Journal of Management and Science Research (JMSR)*, January 2025, Volume 1, Issue 1, 0-10. Isi & Temuan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa dinamika tata laksana manajemen perubahan dalam tubuh organisasi TNI mengemban peranan strategis serta signifikan dalam meniasati tantangan kewarganegaraan di era global sebagai wujud dari manifestasi jiwa nasionalisme. Dalam menempuh reformasi internal, institusi TNI melakukan penelarasan arah kebijakan yang sinkron dengan aspirasi masyarakat serta para pengambil keputusan di internal militer. Temuan empiris utama menunjukkan bahwa implementasi tata kelola manajemen perubahan yang efektif—terutama yang digerakkan via kepemimpinan perubahan (*change leadership*), pola komunikasi organisasi yang adaptif, serta kultur institusi yang responsif—berkontribusi langsung terhadap eskalasi profesionalisme militer sekaligus mengokohkan kesadaran kewargaan dan nilai-nilai kebangsaan. Orisinalitas studi ini terletak pada peleburan perspektif manajemen perubahan organisasi dengan kajian sosiologi kewarganegaraan dalam matra militer, yang sejauh ini masih minim diulas dalam literatur nasional. Secara praktis, riset ini memberikan rekomendasi bagi perumusan kebijakan pembinaan TNI yang lebih adaptif, profesional, dan berorientasi pada penguatan nilai kebangsaan.

5. Endang Koesmiyati (2021). *Judul: Pendidikan Kewarganegaraan di Era Globalisasi dalam Menumbuhkan Semangat Nasionalisme Mahamurid . Likhitaprajna: Jurnal Ilmiah*, Volume 23, Nomor 1, April 2021, p-ISSN: 1410-8771, e-ISSN: 2580-4812. Isi & Temuan: Tulisan ilmiah ini bertitik tolak dari fenomena belum optimalnya penanaman nilai nasionalisme di kalangan mahamurid di tengah derasnya arus globalisasi dan era disrupsi. Dipaparkan bahwa lompatan ilmu pengetahuan dan teknologi pada dasarnya bersifat bebas nilai (*value-free*), yang bermakna dayagunanya sangat bergantung pada siapa yang mengoperasikan serta target apa yang ingin disasar. Pesatnya akselerasi sains akhir-akhir ini menuntut ketangguhan moralitas serta pemahaman nasionalisme yang matang, sebab penguasaan ilmu yang hampa dari semangat kebangsaan akan membuat Pendidikan Kewarganegaraan kehilangan marwah esensialnya sebagai wadah penjaga nilai kemanusiaan. Penelitian ini didedikasikan untuk menggarisbawahi krusialnya penyemaian jiwa nasionalisme di tingkat perguruan tinggi. Hal ini dilandasi argumen bahwa seorang mahamurid yang menguasai wawasan kewarganegaraan yang mumpuni serta raihan prestasi akademik yang gemilang akan menjadi sia-sia dan gagal menyuguhkan maslahat riil bagi publik, apabila ia miskin semangat kebangsaan serta mengalami degradasi moralitas.
6. Aisyah, D. (2021). Manajemen Pendidikan Karakter Berbasis Muatan Lokal Aswaja Dan Ke-Nu-an (Studi Deskriptif Pembelajaran Mulok Ke-NU-an di Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama (MANU) Putra Buntet Pesantren Cirebon). *Tsaqafatuna: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* Vol 3. No. 2. Isi dan temuan: Artikel ini membahas tentang Manajemen Pendidikan Karakter Berbasis Muatan Lokal Aswaja dan Ke-NU-an di MANU Putra Buntet Pesantren Cirebon. Perencanaan program ini dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pihak guru, kepala sekolah, dan yayasan guna menyusun perangkat pembelajaran (seperti silabus, RPP, Prota, dan Promes) serta merespons isu-isu kekinian,

pengorganisasiannya diwujudkan melalui program sekolah yang terukur untuk menanamkan nilai-nilai karakter, sementara pelaksanaannya diintegrasikan langsung di dalam kelas menggunakan Kurikulum 2013. Selain pembelajaran formal di kelas, penanaman karakter juga diperkuat melalui program luar kelas seperti Safari Mushola, Masa Kesetiaan Anggota (Makesta), dan program pembinaan ke-Aswajaan (Mapekka). Proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif deskriptif ini mengandalkan teknik wawancara mendalam dengan informan kunci (kepala madrasah, wakil kepala sekolah, guru, dan staf), observasi partisipan terhadap kegiatan *murid*, serta studi dokumentasi administratif. Implementasi manajemen pembentukan karakter di sekolah ini berhasil menanamkan tiga nilai utama pada diri *murid*, yaitu nilai religius melalui pembiasaan doa dan salawat pagi, nilai disiplin melalui pengecekan kehadiran dan pemberian tugas mandiri, serta nilai tanggung jawab melalui pengerjaan tugas individu maupun kelompok. Seluruh keberhasilan program dipantau melalui evaluasi komprehensif yang mencakup teknik pengawasan langsung berkala serta non-tes seperti catatan anekdot kualitatif.

7. Soepandji, K.W. dan Farid, M. (2018). Jurnal Vol 48, No3. “Konsep bela negara dalam perspektif ketahanan nasional”. Isi dan temuan : Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) secara eksplisit mengatur kewajiban warga negara Indonesia (WNI) untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Hal itu tertuang dalam pasal 27 ayat 3 UUD NRI 1945 yang berbunyi, “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Lebih lanjut, ketentuan mengenai bela negara diatur dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU No. 3/2002), yaitu dalam pasal 9 ayat 1 dan 2. Pasal itu mengetengahkan bahwa upaya bela negara diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara, serta mencakup pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia secara

sukarela atau secara wajib, serta pengabdian sesuai dengan profesi. Akan tetapi, upaya bela negara pada tataran praktis belum terlaksana secara sistematis; salah satunya terlihat pada ketiadaan suatu sistem pendidikan bela negara yang komprehensif pada generasi muda. Kondisi ini dapat berpengaruh pada ketahanan nasional yang berhubungan erat dengan dinamika geopolitik. Artikel ini hendak memperkenalkan sistem pendidikan bela negara sejak jenjang sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga persiapan untuk perguruan tinggi dan atau dunia pekerjaan. Selanjutnya, materi di dalam karya ini dapat dijadikan salah satu referensi konsep dalam membuat kurikulum, maupun aturan dan kebijakan tentang bela negara.

8. Umra, S.I. (2019). *Lex Renaissance*, VOL. 4 No. 1. “Penerapan Konsep Bela Negara, Nasionalisme Atau Militerisasi Warga Negara”. Isi dan temuan: Bela Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 rela berkorban demi menjamin kelangsungan hidup dan Negara. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Pertama bagaimana konsep bela negara di Indonesia? Kedua, bagaimanakah kelebihan dan kerugian penerapan bela negara di Indonesia saat ini? Metode dalam penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Setelah dilakukan pengkajian diketahui bahwa konsep bela negara yang lebih menitikberatkan pada pemahaman nilai-nilai luhur Pancasila terkait dengan karakter atau perilaku dan penulis melihat kajian ini dalam dua sudut pandang yang berbeda dituangkan dalam bentuk kebijakan penerapan bela negara dengan bersandar pada peraturan perundang-undangan melalui kebijakan tentang bela negara. Tidak tepat jika program bela negara yang dilakukan secara mendadak oleh Kementerian Pertahanan, padahal

seharusnya menjadi ranah Kementerian Pendidikan sehingga kami memberikan solusi yang dapat di wujudkan dalam beberapa program diantaranya: intra-kulikuler dengan mengintegrasikan program pendidikan kesadaran bela Negara dan pembangunan karakter bangsa ke dalam berbagai mata pelajaran; dan ekstra-kulikuler dengan menerapkan kegiatan intra- kulikuler ke dalam berbagai kegiatan ekstra kulikuler yang dapat diterapkan didalam kehidupan masyarakat dengan yang pelaksanaannya direncanakan dengan matang dan terintegrasi dengan kurikulum pendidikan sehingga mudah dikontrol dan dievaluasi. Pada hakikinya penerapan program pelatihan haruslah disesuaikan dengan tuntutan zaman saat ini dalam pelaksanaan bela negara di Indonesia.

9. Wijayanto, R. dan Marzuki, J. (2018). “Pendidikan Bela Negara sebagai Tonggak Peradaban Jiwa Patriotisme Generasi Muda”. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (JIPPK), Vol. 3, No. 2, edisi Desember 2018. Isi dan temuan:. Bahwa Pendidikan bela negara yang dilaksanakan melalui kurikulum khusus. Kajian menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan tehnik wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan bela negara yang diterapkan memiliki fungsi dalam menumbuhkan dan memperkuat nilai-nilai patriotisme dalam diri *murid*. Pendidikan bela negara mengajarkan mengenai kecintaan pada tanah air, semangat perjuangan, nasionalisme, patriotisme dan ketahanan fisik yang prima. Materi yang diberikan antara lain yakni wawasan kebangsaan, baris berbaris, disiplin waktu, long march dan kepemimpinan. Dengan demikian pendidikan bela negara mempunyai kontribusi positif dalam membentuk murid yang memiliki semangat patriotisme sejak dini.
10. Khotimah, K. (2017). “Wujud Bela Negara Melalui Pendidikan Budaya Hemat Energi” Jurnal Pertahanan & Bela Negara: Identitas, nasionalisme, integritas. Vol. 7, No. 3. Isi dan temuan, bahwa negara

yang kuat merupakan negara yang memiliki warga negara yang bersatu padu dalam mempertahankan, memperjuangkan, serta melindungi negaranya dari segala bentuk ancaman yang terjadi, baik ancaman militer maupun non militer melalui kesadaran bela negara demi keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Konsep bela negara dapat diwujudkan melalui pendidikan budaya hemat energi.

11. Rahmat W.J. dan Marzuki. (2018). “Pendidikan Bela Negara Sebagai Tonggak Peradaba Jiwa Patriotisme Generasi Muda.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, Nomor 2, Desember 2018. Halaman 186-191. Isi dan temuan: Artikel ini membahas implementasi pendidikan bela negara di SMA Negeri Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti Jambi sebagai strategi aplikatif untuk menangkal dampak negatif globalisasi dan memperkuat nilai-nilai patriotisme, nasionalisme, serta kedisiplinan generasi muda sejak dini. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa internalisasi materi wawasan kebangsaan dalam mata pelajaran PPKn yang dipadukan dengan kurikulum khusus di lapangan—seperti latihan baris-berbaris, pemeriksaan kerapian ala militer, dan kegiatan long march—terbukti optimal dalam menumbuhkan kecintaan pada tanah air serta membentuk karakter murid yang rela berkorban bagi bangsa dan negara. Jika Anda membutuhkan bantuan lebih lanjut untuk draf bab disertasi Anda, beri tahu saya jika Anda ingin: Mengintegrasikan artikel ini sebagai penelitian terdahulu yang relevan pada Bab 2. Membuat sintesis hubungan antara fungsi Actuating G.R. Terry dengan program bela negara aplikatif ini. Memetakan indikator jiwa patriotik tingkat sekolah berdasarkan temuan artikel di atas.
12. Sari, E. dan Ali, Y. (2018). “Penguatan Sikap Nasionalisme melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada Sekolah Internasional” (Studi pada Secondary School di Singapore Piaget Academy Solo Raya). *PKn Progresif*, Vol. 13 No. 1 Juni 2018. Isi dan

temuan: Nasionalisme dan bela negara sebagai pedoman untuk menyikapi keberlanjutan energi Indonesia di masa mendatang dengan menerapkan budaya hemat energi secara efisien dan rasional melalui penerapan dasar nilai-nilai hemat energi, yang mencakup: (1) pengembangan kurikulum green education melalui materi konservasi energi (hemat, dan bijak dan cerdas menggunakan energi); (2) pengembangan konsep kebiasaan hidup hemat energi secara dua arah (pembelajaran dari murid ke murid sehingga partisipasi murid secara aktif) seperti mematikan peralatan sumber energi (keran air, lampu, AC) ketika tidak digunakan yang dilakukan secara berlanjut dengan pendampingan dari tenaga pendidik sehingga akan menjadi sebuah kebiasaan positif yang tertanam sejak kecil untuk menggunakan energi yang efisien dan rasional. Pendidikan budaya hemat energi ini bukan hanya imbauan yang bersifat normatif, namun harus ada aturan yang jelas tentang penghematan energi melalui kerjasama antara Kementerian Ristek Dikti dan Kementerian ESDM dan Kementerian Pertahanan sehingga pengembangan budaya penerapan energi secara berkelanjutan dapat tercipta dengan komitmen dari semua civitas akademika pendidikan dalam wujud bela negara.

13. Hasina, H. et. al. (2026). "Implementasi Nilai Nasionalisme Dalam Pengembangan Infrastruktur" (The Implementation of Nationalism Values in Infrastructure Development). *Jagad dhita – Jurnal kebhinnekaan dan wawasan kebangsaan Pusat Kajian Pancasila UNINDRA PGRI* Volume 5, No.2 Juni 2026. Isi dan temuan: Penelitian deskriptif kualitatif ini mengkaji Implementasi Nilai Nasionalisme dalam Pengembangan Infrastruktur sebagai landasan moral dan fondasi etis untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia. Hasil studi menunjukkan bahwa perwujudan nilai nasionalisme di lapangan diimplementasikan melalui kebijakan prioritas pembangunan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) demi mengikis disparitas geografis, optimalisasi penggunaan

sumber daya lokal (tenaga kerja, material, dan teknologi domestik), serta penguatan partisipasi aktif dan pengawasan sosial oleh masyarakat. Kendati demikian, proses implementasi ini masih membentur sejumlah tantangan nyata, mulai dari orientasi pembangunan yang cenderung masih berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, keterbatasan alokasi anggaran, lemahnya koordinasi dan tumpang tindih kebijakan lintas instansi, hingga masih minimnya kesadaran partisipasi publik secara luas. Jika Anda ingin melanjutkan penyusunan draf karya ilmiah Anda, bagian mana yang ingin diproses berikutnya? Buatlah daftar rekomendasi strategi penguatan berdasarkan hasil penelitian jurnal ini. Buatlah draf deskripsi Teknik Analisis Data kualitatif yang sesuai dengan metodologi jurnal ini. Bantu saya menyusun latar belakang masalah yang mengaitkan nasionalisme di bidang pendidikan (jurnal sebelumnya) dengan bidang infrastruktur ini.

14. Nurbani, R.R., Fitriani, Y., Arzaqi, R.N. (2024). "Implementasi Manajemen Ekstrakurikuler Tari dalam Pembentukan Karakter Nasionalisme". *Aulad : Journal on Early Childhood* Volume 7, 10 Desember 2024. Isi dan temuan: Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif ini mengkaji Implementasi Manajemen Ekstrakurikuler Tari dalam Pembentukan Karakter Nasionalisme pada anak usia dini di TK Islam Widya Cendekia. Melalui pengumpulan data berupa observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan analisis dokumen, studi ini menemukan bahwa efektivitas tata kelola manajerial yang mencakup perencanaan berbasis budaya lokal Banten (seperti Tari Ahlan Wasahlan), pengorganisasian dengan pembagian kelompok latihan terstruktur, pelaksanaan latihan bertahap yang interaktif, serta pengawasan berkala dua pekan sekali mampu berkontribusi signifikan terhadap stimulasi karakter kebangsaan *murid*. Hasil akhir dari manajemen ekstrakurikuler seni tari tradisional ini secara nyata berhasil memfasilitasi internalisasi empat pilar karakter nasionalisme utama pada diri murid sejak dini, yaitu pembentukan pribadi yang demokratis

(didengar suaranya), memiliki semangat kebangsaan dan rasa cinta tanah air (bangga pada identitas budaya daerah), serta menanamkan sikap berkebhinekaan global melalui pengenalan keragaman tarian Nusantara.

15. La Ode Muhammad Ichwan Sjachrawy, L.O.M.I., H. et. al. (2026). “Implementasi Nilai Nasionalisme Dalam Pengembangan Infrastruktur” (The Implementation of Nationalism Values in Infrastructure Development). Jagad dhita – Jurnal kebhinnekaan dan wawasan kebangsaan Pusat Kajian Pancasila UNINDRA PGRI Volume 5, No.2 Juni 2026. Isi dan temuan bahwa penelitian deskriptif kualitatif melalui studi literatur ini membahas mengenai Implementasi Nilai Nasionalisme dalam Pengembangan Infrastruktur. Artikel ilmiah ini menekankan peran nasionalisme bukan hanya sebatas rasa cinta tanah air, melainkan sebagai sebuah komitmen kolektif, landasan moral, dan fondasi etis untuk memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia secara merata. Berikut adalah poin-poin visualisasi data dan isi utama dari dokumen tersebut: Wujud Konkret Implementasi Nasionalisme: Pemerataan Wilayah 3T: Negara hadir nyata dengan membangun jalan, pelabuhan, dan jaringan komunikasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar untuk mereduksi disparitas barat-timur. Sumber Daya Lokal: Proyek mengutamakan tenaga kerja domestik, material dalam negeri, serta teknologi buatan bangsa untuk memicu efek berganda ekonomi lokal dan transfer keahlian. Partisipasi Publik: Melibatkan warga lokal sejak perencanaan hingga pengawasan sosial (seperti program PISEW), yang mencerminkan luhurnya semangat gotong royong. Keberlanjutan Ekologis: Nasionalisme bertanggung jawab moral menjaga kelestarian alam demi generasi masa depan melalui pembangunan infrastruktur hijau ramah lingkungan. Tantangan & Strategi Penguatan: Hambatan: Praktik di lapangan masih terbentur orientasi pertumbuhan ekonomi jangka pendek, keterbatasan anggaran, ego sektoral/lemahnya koordinasi instansi, dan minimnya partisipasi masyarakat. Solusi Utama:

Penguatan integrasi nilai Pancasila dalam kebijakan, peningkatan kapasitas integritas SDM insinyur, perluasan kolaborasi gotong royong lintas sektor, serta transparansi anggaran demi tata kelola yang bersih (good governance).

16. Abidin, M.Z. (2024). "Kontruksi Nasionalisme dalam Pendidikan Fikih Kebangsaan". *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*. Vol. 7 No. 1, 2024. pp. 165-180. Isi dan temuan: Penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi ini mengkaji Konstruksi Nasionalisme dalam Pendidikan Fikih Kebangsaan di Ma'had Aly Lirboyo Kediri untuk membentengi mahasiswa dari ancaman gerakan transnasional dan potensi disintegrasi bangsa. Mengacu pada teori konstruksi sosial Peter L. Berger (dialektika eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi), studi ini menemukan bahwa penanaman nasionalisme dilakukan secara terstruktur melalui kurikulum wajib kitab Fikih Kebangsaan (jilid I-III), penulisan karya ilmiah bertema kenegaraan, pelatihan kader penggerak (PKPNU), penerbitan mading, serta aktivitas sosiokultural seperti ro'an (kerja bakti) dan bahtsul masa'il (musyawarah hukum). Hasil akhir dari proses internalisasi intensif ini terbukti mampu mengonstruksi pemahaman kebangsaan secara mendalam, sehingga jiwa nasionalisme dan toleransi mendarah daging, menjiwai pola pikir, membentuk kesadaran diri, serta memanifestasikan perilaku cinta tanah air yang aplikatif dalam kehidupan bermasyarakat. Jika Anda ingin melanjutkan penyusunan draf penelitian Anda, bagian mana yang akan diolah selanjutnya? Buatlah kerangka konsep yang mengaitkan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dengan data penelitian ini. Buatlah draf deskripsi Fikih Kebangsaan sebagai bagian dari landasan teoretis karya ilmiah Anda. Bantu saya menyusun tabel komparasi metode penanaman nasionalisme antara sekolah formal, PAUD, dan pondok pesantren berdasarkan dokumen-dokumen ini.
17. Pramitasari, A.W. (2021). "Penanaman Nilai-Nilai Nasionalisme Melalui Pertunjukan Seni Dan Budaya". *Jurnal Education and*

development. Vol.9 No.4 Edisi Nopember 2021. Isi dan temuan: Penelitian deskriptif kualitatif melalui studi literatur ini membahas tentang Penanaman Nilai-Nilai Nasionalisme melalui Pertunjukan Seni dan Budaya sebagai bentuk manajemen pertahanan preventif. Di era globalisasi, Indonesia tidak hanya menghadapi ancaman militer, melainkan ancaman nonmiliter berdimensi sosial-budaya (seperti masuknya budaya asing yang mengikis kecintaan terhadap budaya lokal) yang berpotensi memicu disintegrasi bangsa. Guna mengantisipasi hal tersebut, seni dan budaya dapat dioptimalkan sebagai media inovatif yang bersahabat untuk menyisipkan pesan berbangsa, menumbuhkan jiwa patriotisme, serta mengimplementasikan hak dan kewajiban Bela Negara sesuai amanat Pasal 27 Ayat (3) UUD 1945. Strategi ini didasarkan pada teori partisipasi masyarakat, di mana keterlibatan mental dan emosional publik dalam pagelaran seni akan menumbuhkan rasa memiliki (sense of ownership) yang kuat terhadap identitas bangsa. Implementasi konkretnya dapat diterapkan pada festival seni-budaya modern tahunan yang memiliki minat penonton tinggi, seperti di Yogyakarta melalui Prambanan Jazz Festival (dengan mewajibkan musisi menyanyikan lagu nasional), Ngayogjazz (mengenalkan destinasi wisata desa), Festival Kebudayaan Yogyakarta (menyisipkan gerakan perjuangan dalam tarian), serta Artjog (memasukkan unsur sejarah dan motif kain tradisional). Jika kebijakan ini diaplikasikan secara konsisten di seluruh daerah, integrasi aspek sosial-budaya tersebut akan secara efektif memperkuat fondasi pertahanan dan ketahanan nasional.

18. Hufon, A. et. al. (2025). "Implementasi Pendidikan Inklusif Berbasis Ukhuwah di TMI Al Amien Prenduan dalam Memperkuat Toleransi Dan Nasionalisme Sebagai Fondasi Peradaban Multikultur". At-Tadbir : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam ISSN 2715-7210. Isi dan temuan: Penelitian kualitatif dengan desain studi kasus ini mengkaji Implementasi Pendidikan Inklusif Berbasis Ukhuwah di TMI Al-Amien

Prenduan Sumenep dalam menguatkan nilai toleransi dan nasionalisme sebagai fondasi peradaban multikultur. Melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, riset ini menunjukkan keberhasilan lembaga dalam mentransformasikan paradigma pesantren dari eksklusivitas menuju inklusivitas tanpa mereduksi identitas keislaman. Nilai inklusivitas tersebut dioperasionalkan secara praktis melalui integrasi konsep ukhuwah islamiyyah (persaudaraan sesama muslim) dan ukhuwah wathaniyyah (persaudaraan sebangsa) ke dalam kurikulum holistik yang mencakup tujuh jenis pendidikan utama, salah satunya kajian keagamaan komprehensif berupa perbandingan mazhab untuk menumbuhkan fleksibilitas intelektual santri. Dalam kehidupan sehari-hari, internalisasi karakter toleran distimulasi secara alami melalui strategi kontak antarkelompok (heterogenitas asal daerah dalam satu kamar asrama) serta interaksi lintas budaya pada berbagai program ekstrakurikuler yang sukses mereduksi prasangka primordial. Sementara itu, penguatan nasionalisme diredefinisi melalui model nasionalisme religius, di mana pembelajaran sejarah diintegrasikan dengan nilai perjuangan para ulama, serta pelaksanaan upacara bendera dan lomba kepancasilaan guna membentengi santri dari pengaruh radikalisme digital. Meskipun menghadapi tantangan berupa potensi eksklusivitas kelompok etnis dan literasi media yang terbatas, TMI Al-Amien Prenduan berhasil mengatasinya lewat strategi adaptif berupa doktrin nilai dasar harian, pengembangan kapasitas manajerial diversitas bagi pendidik, serta evaluasi perilaku sosial harian yang holistik.

19. Maysaroh, F. et. al. (2023). "Manajemen Partisipatif Orang Tua dalam Meningkatkan Karakter Nasionalisme Murid di SMA Bani Hasyim Singosari Malang". *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* Volume 6, Nomor 9, September 2023. Isi dan temuan, bahwa Penelitian kualitatif dengan desain studi kasus ini mengkaji Manajemen Partisipatif Orang Tua dalam Meningkatkan Karakter Nasionalisme Murid di SMA Bani

Hasyim Singosari Malang, hasilnya menunjukkan bahwa sinergi kolaboratif antara lembaga pendidikan dan lingkungan keluarga membawa dampak signifikan pada penguatan nilai kebangsaan *murid*. Mekanisme perencanaan & komunikasi dua arah, dilaksanakan rapat koordinasi berkala: kemitraan sekolah dikemas melalui pengadaan rapat wali murid rutin setiap tiga bulan dan enam bulan sekali untuk mendiskusikan kebutuhan serta perkembangan karakter kebangsaan *murid*. Komunikasi dua arah mengadopsi teori patrikakou, bahwa manajemen ini membangun ruang regular penuh makna, memposisikan orang tua sebagai rekan aktif dalam pengambilan keputusan, dan membagi tanggung jawab pengawasan pembiasaan positif di rumah. Adanya keterlibatan multi-pihak, meliputi pihak sekolah (kepala sekolah, wali kelas, komite) yang berperan aktif memberikan pengetahuan edukasi sehingga memicu kemauan intrinsik orang tua untuk meluangkan waktu di tengah kesibukan, kebijakan internal dan program kerja sama peningkatan kapasitas pendidik, yakni sebelum menanamkan nilai pada *murid*, sekolah mendesain peningkatan nasionalisme guru melalui agenda bedah buku Pancasila, kewajiban menulis buku kebangsaan, serta workshop kurikulum. Di samping itu juga terdapat integrasi pembelajaran & kunjungan untuk memahami nilai-nilai patriotisme dijangkar ke dalam seluruh mata pelajaran di kelas, didukung program luar kelas berupa kunjungan belajar ke tokoh/lembaga publik (seperti badan zakat Al-Azizmu) untuk melatih empati sosial.

20. Anwar, Ch. (2014). "Internalisasi Semangat Nasionalisme Melalui Pendekatan Habitiasi (Perspektif Filsafat Pendidikan)". ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman, Volume 14, Nomor 1. Isi dan temuan: Penelitian konseptual-filosofis melalui studi literatur ini mengkaji Internalisasi Semangat Nasionalisme melalui Pendekatan Habitiasi (Perspektif Filsafat Pendidikan). Artikel ilmiah ini menyoroti fenomena melemahnya komitmen kebangsaan di kalangan generasi muda yang

ditunjukkan oleh riset Maarif Institute, di mana sekitar 60% murid di Jabodetabek (SMP dan SMA) tidak mempercayai lagi nilai-nilai Pancasila. Pendekatan filosofis berjalan di atas tiga kerangka dasar: berpikir logis, kritis, dan kreatif untuk mengungkit atau membongkar hal-hal mendasar secara akademis-empiris. Dilema "Bangsa vs Negara" mengacu pada tesis Benedict Anderson tentang "komunitas terbayang" (*imagined communities*). Tulisan ini membedakan secara tajam identitas kultural "bangsa" dengan otoritas politis "negara" yang sering kali tumpang tindih. Adanya ancaman etno-nasionalisme, yakni otonomi daerah pasca-Reformasi 1998 yang bisa berupa simbol daerah sempit, provinsialisme, serta kasus separatisme (seperti gejolak di Papua) dinilai sebagai bentuk lunturnya loyalitas terhadap ikatan NKRI yang lebih besar. Sedangkan proses dan strategi pendekatan habituasi (pembiasaan) dilakukan melalui enam tahap pembentukan karakter, yakni menggunakan teori Ibrahim Elfiky bahwa kebiasaan harus ditanamkan ke dalam folder akal bawah sadar murid melalui alur berkelanjutan, yakni (1) berpikir, (2) perekaman, (3) pengulangan, (4) penyimpanan, (5) pengulangan lanjutan, dan (6) menjadi kebiasaan/karakter tetap. Kombinasi empat ranah kegiatan, meliputi: guru di sekolah dasar dan menengah diyakini mampu menanamkan nilai-nilai kebangsaan secara efektif melalui empat jenis aktivitas, yaitu kegiatan rutin, kegiatan spontan, pemberian keteladanan (*modelling*), serta kegiatan terprogram. Sedangkan bagaimana implementasi praktis di sekolah, yakni: integrasi kurikulum mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dengan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Optimalisasi kegiatan rutin (seperti upacara bendera hari Senin, memperingati hari besar nasional, kepramukaan, kerja bakti, dan piket harian) untuk menyisipkan nilai disiplin, kerapian, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Pembiasaan interaksi personal spontan berupa tradisi mengucapkan salam, menyapa sesama, membuang sampah pada tempatnya, dan menghormati guru guna memupuk rasa saling

menyayangi.

Berdasarkan kompilasi dari hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat diidentifikasi kluster fokus masing-masing studi, sebagai berikut:

Tabel 1: Kluster dan Fokus Penelitian

Kluster	Fokus Penelitian Terdahulu	Temuan Utama	Keterbatasan/Gap
1. Pembelajaran dan keteladanan	Guru, PPKn, pembelajaran, habituasi	Nasionalisme dibentuk melalui keteladanan, pembelajaran dan pembiasaan	Belum melihat keseluruhan proses sebagai sistem manajemen sekolah
2. Manajemen karakter dan program sekolah	Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, ekstrakurikuler, orang tua	Manajemen dan kolaborasi memperkuat karakter	Belum spesifik menghubungkan manajemen karakter nasionalis dengan jiwa patriotik
3. Bela negara dan patriotisme	Bela negara, PPKn, Pramuka, disiplin, kepemimpinan, budaya	Program bela negara berkontribusi terhadap patriotisme	Cenderung mengkaji program tertentu, bukan sistem manajemen pendidikan karakter secara komprehensif
4. Nasionalisme religius	Fikih kebangsaan, ukhuwah, toleransi, inklusivitas	Nasionalisme dapat diperkuat melalui integrasi nilai religius dan kebangsaan	Konteks dominan pesantren/pendidikan keagamaan, bukan SMA negeri
5. Sosial-budaya dan kewargaan	Kearifan lokal, TNI, infrastruktur, masyarakat	Nasionalisme merupakan nilai sosial dan tanggung jawab kolektif	Tidak berfokus pada manajemen pendidikan karakter di sekolah

Tabel 2.1.

Berdasarkan pemetaan terhadap penelitian terdahulu, kajian mengenai pendidikan karakter nasionalisme telah berkembang dalam berbagai perspektif, antara lain melalui keteladanan pendidik, pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, habituasi, kegiatan ekstrakurikuler, pendidikan kepramukaan, pendidikan bela negara, seni dan budaya, keterlibatan orang tua, serta integrasi nilai religius dan kebangsaan. Penelitian terdahulu tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan berbagai strategi dan media pembentukan karakter nasionalis serta patriotisme murid. Namun demikian, kajian-kajian tersebut masih cenderung terfragmentasi pada aspek atau program tertentu dan belum secara komprehensif menempatkan manajemen pendidikan karakter nasionalis sebagai suatu sistem pengelolaan sekolah yang terintegrasi untuk memperkuat jiwa

patriotik murid.

Oleh karena itu, penelitian disertasi ini menempati posisi kajian yang mengintegrasikan manajemen pendidikan, pendidikan karakter nasionalis, dan penguatan jiwa patriotik dalam konteks pendidikan menengah. Penelitian tidak hanya mengkaji keberadaan program atau aktivitas nasionalisme, tetapi menganalisis bagaimana program tersebut direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, serta diawasi dan dievaluasi dalam suatu ekosistem sekolah. Dengan demikian, posisi penelitian ini adalah mengembangkan kajian dari pendekatan yang bersifat parsial dan programatik menuju pendekatan manajerial-integratif, dengan menempatkan penguatan jiwa patriotik sebagai orientasi hasil dari manajemen pendidikan karakter nasionalis.

penelitian terdahulu banyak membahas media, strategi, program, atau aspek tertentu dalam pembentukan nasionalisme dan patriotisme, sedangkan penelitian ini memosisikan manajemen pendidikan karakter nasionalis sebagai sistem integratif yang menghubungkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi berbagai ekosistem pendidikan sekolah untuk menghasilkan penguatan jiwa patriotik murid.

Berdasarkan paparan tersebut, penulisan disertasi ini memiliki posisi dan kedudukan yang penting. Penelitian ini diharapkan menjadi penguatan bagi generasi yang aktif, religius dan rajin, unggul, didiplin, dan akuntabel/amanah, serta berjiwa patriotik yang menghargai bhinneka tunggal ika, sesuai profil lulusan sesuai SKL (P-8), yakni:

1. Keimanan (Keimanan, Ketaqwaan kepada Tuhan YME, dan Berakhlak Mulia);
2. Kewargaan (Kesadaran sebagai warga negara yang baik);
3. Penalaran Kritis (Kemampuan berpikir logis dan analitis);
4. Kreativitas (Kemampuan menciptakan inovasi dan gagasan baru);
5. Kolaborasi (Kemampuan bekerja sama dalam tim);
6. Kemandirian (Kemampuan mengatur diri dan bertanggung jawab);

7. Kesehatan (Kesejahteraan fisik dan mental); dan
8. Komunikasi (Kemampuan bertukar informasi dengan baik).